HOEGENG

POLISI DAN MENTERI TELADAN

"Setiap kali bertemu, Pak Hoegeng selalu menjabat tangan saya dengan erat, kuat, sebagai tanda ketegasannya. Saya menduga-duga, orang ini pasti jujur, karena, biasanya, orang yang tegas pasti punya kejujuran. Dan, dugaan saya benar. Hoegeng memang tokoh jujur. Bukunya ini berisi bukti-bukti kejujuran Pak Hoegeng. Ia adalah sosok yang sederhana, yang tak punya apa-apa kecuali kejujuran itu sendiri." (M. JUSUF KALLA)

Suhartono

Hoegeng: Polisi dan Menteri Teladan

Hoegeng:
Polisi dan Menteri Teladan

Suhartono

KOMPAS

buku ini dipersembahkan untuk Aniek, istriku,

Anya dan Aga, anakku,

yang kerap terusik

hari-harinya

di rumah

Hoegeng: Polisi dan Menteri Teladan
Copyright© 2013, Suhartono

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Buku Kompas, 2013
PT Kompas Media Nusantara
Jl. Palmerah Selatan 26-28
Jakarta 10270

e-mail: buku@kompas.com
KMN: 20205130086

Perancang Sampul: Wiko Haripahargio
Foto Sampul: Dokumentasi *Kompas*

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit
xxvi + 142 hlm.; 14 cm x 21 cm
ISBN: 978-979-709-769-1

Cetakan pertama, Oktober 2013
Cetakan kedua, November 2013
Cetakan ketiga, November 2013
Cetakan keempat, November 2013
Cetakan kelima, Januari 2014

Isi di luar tanggung jawab Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor

Daftar Isi

Pengantar

Hoegeng, Sosok yang Menjaga Integritas di Mana Pun ix

Sekapur Sirih

Hoegeng, Kekhasan Keteladanan yang Dipendam

Selama 48 Tahun xvii

Pengantar Penulis xxiii

Bab I	Menjadi Sekretaris Hoegeng	1
Bab II	Bekerja Bersama Hoegeng	9
Bab III	Hoegeng, Pribadi yang Terbuka	19
Bab IV	Tak Menikmati Fasilitas	31
Bab V	Kenangan Tugas Masa Lalu	47
Bab VI	Pegangan Hidup	67
Bab VII	Hoegeng dalam Keseharian	87
Bab VIII	Silaturahmi Terputus	109

Indeks 137

Daftar Pustaka 141

Tentang Penulis 142

Pengantar

Hoegeng, Sosok yang Menjaga Integritas di Mana Pun

Hari-hari ini, melalui berbagai media massa, kita selalu menyaksikan persidangan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara RI, Inspektur Jenderal Djoko Susilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta. Sidang tersebut mendakwa Djoko melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Polri dan melakukan tindakan pencucian uang yang diduga hasil kejahatan.

Karena dianggap bersalah dan merugikan keuangan negara hingga senilai Rp 121 miliar dari proyek pengadaan simulator tersebut, Djoko pun dituntut hukuman penjara 18 tahun dan denda Rp 1 miliar atau subsider kurungan satu tahun. Terkait tindak pidana pencucian uang, Djoko juga diancam hukuman untuk membayar uang pengganti senilai Rp 32 miliar. Uang pengganti itu harus segera dibayar satu bulan setelah vonis hakim berkekuatan tetap. Jika harta kekayaannya tidak cukup, Djoko tetap harus menggantinya dengan ancaman hukuman penjara tambahan selama lima tahun lagi.

Saat bertugas di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Metro Jaya hingga menjadi Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada tahun 2004-2008, Djoko sebenarnya hanya memiliki gaji sebesar Rp 3-4 juta per bulan. Lalu, sebagai Direktur Lalu Lintas, Djoko hanya mendapat tambahan berupa tunjangan jabatan senilai Rp 1 juta. Namun, pada tahun 2010, kekayaan Djoko tiba-tiba melonjak luar biasa.

Dari paparan jaksa penuntut umum di ruang persidangan, Djoko bisa membelikan tanah lengkap dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta Utara untuk seorang perempuan yang disebut-sebut istri mudanya. Tetapi, Djoko tak menggunakan namanya, melainkan nama Djoko Waskito, yang disebut-sebut orangtua istri mudanya itu. Setahun kemudian, Djoko juga membelikan tanah untuk perempuan lainnya seharga Rp 6,1 miliar. Pada tahun berikutnya, Djoko juga membelikan tanah lainnya di Yogyakarta, dengan nama yang juga berbeda.

Singkat kata, harta dan kekayaan Djoko—seperti yang terungkap di persidangan—jumlahnya sungguh luar biasa. Bahkan, saat jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya di sidang Tipikor, jumlah halaman dakwaan terkait harta kekayaannya mencapai 132 halaman. Harta kekayaan Djoko, boleh dikatakan, tersebar mulai dari Jakarta, Semarang, Solo, hingga Bali.

Pada akhirnya, jalan persidangan ini pun menarik, dan begitu banyak menyita perhatian berbagai kalangan. Untuk itulah, saya hadir dalam persidangan pada pertengahan Juli lalu. Selain kebetulan mampir ke salah satu bagian

di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang satu lantai dengan ruang sidang tipikor, saya juga ingin melihat secara langsung jalannya persidangan serta melihat bagaimana Djoko menjelaskan semua dakwaan jaksa tersebut di muka publik. Kehadiran saya sama sekali bukan untuk mempengaruhi apalagi mengintervensi majelis hakim dalam memutuskan vonis. Jadi, tidak ada sama sekali niat saya untuk "menekan" majelis hakim dalam persidangan tersebut.

Pada tanggal 3 September 2013, terdakwa kasus korupsi pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Polri dan pencucian uang itu akhirnya dinyatakan terbukti bersalah. Djoko divonis hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 500 juta dengan subsider kurungan selama enam bulan. Selain itu, harta Djoko senilai Rp 200 miliar yang menjadi barang bukti juga disita untuk negara.

Selain menyaksikan persidangan Djoko, kita juga tentu mendengar seorang polisi berpangkat Ajun Inspektorat Satu (Aiptu) berinisial LS di daerah Sorong, Papua Barat, yang memiliki rekening dengan nilai mencapai Rp 1,5 triliun. Rekening itu terungkap dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari gajinya itu, tentu kita bisa menghitung berapa pendapatannya setiap bulan. Tentu, tak mungkin dia memiliki rekening yang nominalnya sampai triliunan itu jika mengandalkan gajinya sebagai polisi. Namun, belakangan terungkap bahwa sebagai polisi, dia juga berbisnis bahan bakar minyak dan kayu ilegal sehingga dia bisa memiliki dana simpanan di

bank yang mencapai Rp 1,5 triliun tersebut. Kasusnya kini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri.

Bahkan, baru-baru ini, kita juga membaca berita seorang polisi di Jawa Tengah, yang berpangkat Ajun Komisaris Besar (AKBP) berinisial ES ditangkap oleh Badan Reserse Kriminal Polri karena terindikasi melakukan suap Rp 200 juta untuk mendapatkan posisi atau jabatan tertentu di lingkungan Polri. ES ditangkap di Gedung Utama Polri saat akan menemui seseorang di bagian Sumber Daya Manusia Polri sambil membawa uang yang disimpannya dalam tas hitam terkait permintaan kenaikan jabatannya.

Apa yang bisa kita simpulkan dari tiga kasus tersebut jika kita bandingkan dengan mantan Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol.) Hoegeng Iman Santoso, dalam *Hoegeng: Polisi dan Menteri Teladan?* Andai kata semua polisi menjadi seperti Hoegeng, tentu tak perlu KPK memeriksa dan menahan Djoko Susilo, apalagi membawanya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Tak perlu juga sampai LS harus memiliki rekening hingga triliunan rupiah, dan melakukan bisnis di luar tugas dan fungsinya sebagai polisi yang profesional.

Terlalu naif juga jika seorang oknum polisi harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang tak terpuji untuk membayar kenaikan pangkatnya. Dan, jika seorang polisi meneladan sosok Hoegeng yang sederhana, jujur, disiplin, profesional, tak kompromi, dan tak mudah diimingi-imingi sesuatu oleh siapa pun, tak mungkin terjadi proses jual beli jabatan atau kepangkatan.

Memang, kasus Djoko, LS dan ES tidak mewakili institusi Polri yang selama ini dikenal profesional, memiliki integritas dan dihormati oleh siapa pun. Kasus Djoko, LS dan ES hanya tindakan segelintir oknum yang membuat citra Polri disoroti oleh masyarakat. Di luar mereka, masih banyak polisi Indonesia yang bersih, sederhana, jujur dan disiplin, tak kenal kompromi, apalagi mudah disuap atau disogok.

Kasus-kasus yang terjadi memang bisa dijadikan pelajaran bersama. Tentu banyak yang bisa dilakukan oleh KPK bersama-sama Polri untuk menegakkan hukum dan aturan agar ketertiban masyarakat dan penegakan hukum dijalankan dengan benar-benar dan tanpa pandang bulu. Tak hanya pelanggaran hukum dan aturan di jalan atau kriminalitas yang dicegah dan dihukum, tetapi juga berbagai kejahatan tindak pidana ekonomi yang merongrong dan menggerogoti keuangan negara. Polri pada dasarnya adalah institusi dan korps yang memiliki integritas, disiplin, dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Polri juga lembaga yang antikorupsi, suap, dan persekongkolan, dan selalu menjadi garda depan dalam menindak setiap kejahatan dan tindak pidana serta mencegahnya menjadi subur di negeri ini.

Dalam perjalanan sejarahnya di Republik Indonesia ini, Polri telah melahirkan tokoh polisi yang bersahaja, disiplin, jujur, tak mau kompromi, tak gampang tergiur harta, dan memanfaatkan jabatannya, apalagi mau melakukan korupsi dalam berbagai bentuk—yang paling sederhana misalnya

menerima gratifikasi. Catatan perjalanan hidupnya membuktikan, meskipun ditempatkan di luar korps dan kesatuannya, Hoegeng tak membuat lembaganya tercemar dan memalukan. Hoegeng justru membawa keharuman dan citra yang baik lewat keteladanannya sebagai pejabat birokrasi.

Sebuah keteladanan telah dibuktikan Hoegeng. Tak hanya di dalam institusinya di kepolisian, di luar institusinya pun Hoegeng menunjukkan bahwa ia tetap menjaga dan mencontohkan integritas diri dan menjauhkan segala sesuatu yang bisa mencemarkan nama baik dan lembaganya.

Bahkan, Hoegeng juga tidak aji mumpung meskipun menjadi pejabat Negara. Dia tidak memanfaatkan jabatannya untuk memberikan surat izin bagi anaknya menjadi taruna TNI Angkatan Udara atau masuk ke Seni Rupa ITB, apalagi mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya untuk warisan keluarganya dengan menerima ini-itu dari siapa pun.

Hingga meninggal, Hoegeng tidak memiliki rekening untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk deposito maupun tabungan dengan saldo mencapai miliaran ataupun triliunan. Ia hanya memiliki uang pensiunan yang tiap bulannya harus diambil oleh istrinya dengan jumlah tak seberapa bagi sosok yang sebenarnya telah memberi keharuman bagi institusi Polri di tengah-tengah persoalan bangsa yang kini terpuruk.

Kita harapkan, setelah Hoegeng Iman Santoso, akan lahir Hoegeng-Hoegeng lainnya. Mungkin, boleh saja, tak ada polisi lainnya yang bernama Hoegeng seperti yang diinginkan almarhum kepada putranya, tetapi semoga banyak polisi yang benar-benar bisa menjadi seperti Hoegeng Iman Santoso: menjadi contoh, teladan, dan panutan serta realita jajaran kepolisian Indonesia. ❖

Jakarta, Agustus 2013

Abraham Samad

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sekapur Sirih

Hoegeng, Kekhasan Keteladanan yang Dipendam Selama 48 Tahun

Biasanya orang menulis kisahnya sendiri. Namun, buku ini justru tidak. Buku ini bertutur kisah seorang asisten tentang mantan pimpinannya. Kisah ini tidak dibuat dalam rangka pisah-sambut antara pimpinan lama dan pimpinan baru, yang biasanya berbau feodalistik. Atau, karena dipesan sang mantan pimpinan yang membuat otobiografinya tak ubahnya seperti etalase diri. Sebaliknya, dalam buku ini, sang asisten baru berkisah setelah 48 tahun kemudian. Setidaknya, setelah dirinya pensiun, dan setelah sang mantan pimpinan meninggal dunia.

Siapakah pimpinan yang bisa menanamkan kesan sedemikian mendalam bagi mantan anak buahnya? Dialah Hoegeng Iman Santoso, Menteri Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak)/Kapolri era tahun 1966-1971.

Soedharto Martopoespito, sang asisten, mengenal Hoegeng saat bertugas sebagai sekretarisnya. Saat itu, Hoegeng yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, menjabat sebagai Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet. Sebagai anak muda yang baru bekerja di lingkungan

Sekretariat Negara, Dharto, demikian nama panggilannya, mulai terkesima dengan perilaku atasannya sejak hari pertama bertugas. Yaitu, saat jam hadir masuk ke kantor. Hoegeng ternyata selalu hadir di kantor pukul 05.30.

Setelah itu, satu persatu, perilaku khas dari Hoegeng terekam dalam memori Dharto, dan secara detail dituturkan kepada penulis untuk dituangkan menjadi buku. Memori itu mulai dari kebiasaan Hoegeng yang tidak pernah sembunyi-sembunyi saat berbicara dengan semua orang di ruangannya, kebiasaan tak mau dikawal, hingga kebiasaan tidak mau mengambil jatah beras sejak menjadi Menteri Iuran Negara.

Bisa dibayangkan dalam kurun waktu setengah abad menjadi birokrat, tentu Dharto telah memiliki sekian banyak mantan atasan maupun orang-orang yang silih berganti datang dan pergi di lingkungan Sekretariat Negara. Demikian juga di kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Tetapi, bahwa Dharto masih mengingat Hoegeng secara detail, itu nampaknya karena pribadi Hoegeng yang berbeda sekali dengan rata-rata orang yang ditemui Dharto sehari-harinya. Kekhasan pribadi Hoegeng nampaknya demikian ekstrem, bahkan untuk ukuran ketika itu. Tak heran jika memori akan Hoegeng pun menancap kuat pada ingatan Dharto.

Waktu itu, bisa dibayangkan pula, belum ada pengawasan media atau LSM, serta belum ada konsep tata-pemerintahan yang baik. Mulai dari Ombudsman atau UKP4

(Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) menjadi palang pintu, Hoegeng selaku Kapolri sudah menolak penggunaan mobil dinas oleh keluarga, menolak membuat memo untuk anak yang mau masuk sekolah serta menolak semua pemberian dari berbagai pihak. Dengan kata lain, suasana ketika itu sebenarnya tidak mempermasalahkan jika Hoegeng melakukan hal itu semua.

Bandingkan dengan situasi sekarang di mana penggunaan mobil dinas sembarangan dan lain sebagainya itu sudah menjadi sesuatu yang diregulasi dan diawasi. Walau begitu, *toh* orang ramai-ramai melanggarnya dengan berbagai alasan. Maka, mestinya ada sesuatu yang amat berbeda pada diri Hoegeng, bahkan untuk ukuran waktu itu.

Jika Hoegeng masih aktif hari-hari ini, maka kemungkinan besar ia akan dijuluki "orang Samin". Julukan itu mengacu pada satu komunitas masyarakat di Pulau Jawa yang terbiasa berpikir dan bertindak amat lugu dan logis. Jika aturannya begitu, ya begitu. Jika dinyatakan suatu hal dilarang atau terlarang, ya sudah, jangan dilakukan. Di benak orang Samin, tidak ada kebijakan atau kebijaksanaan, tidak ada pula fleksibilitas ataupun tenggang rasa. Apa kata aturan, ya kemudian ikuti saja.

Satu lagi yang menarik dari "orang Samin" yang juga cocok dengan karakter Hoegeng adalah dirinya tidak mengancam. "Orang Samin" berpikir dan bersikap lurus hanya bagi dirinya sendiri, tidak peduli pada apa yang

dilakukan orang lain. Demikian pula Hoegeng yang, seperti disaksikan Dharto, membuat rikuh banyak koleganya, apalagi anak buahnya, dengan perilaku yang amat lurus dan antikorupsi serta gratifikasi tersebut. Walaupun demikian, tak ada kesan pada Dharto bahwa Hoegeng juga mengharapkan orang lain berbuat hal yang sama dengan dirinya.

Bisa dibayangkan betapa kerepotan yang timbul jika orang seperti Hoegeng menjadi Kepala Polri hari-hari ini. Birokrasi negara serta birokrasi kepolisian, pada umumnya dikenal feodal, tidak efisien, dan menoleransi penyimpangan, khususnya yang tidak serius ataupun perilaku menyimpang yang sudah memperoleh "pembenaran" secara budaya. Apabila pada umumnya setiap orang yang masuk birokrasi akan "menyesuaikan diri" dengan situasi itu, tidak demikian halnya dengan pejabat seperti Hoegeng. Bayangkan kekacauan yang akan timbul kemudian.

Uraian dalam buku ini runtun dan enak dibaca. Dibuat selaras dengan kaleidoskop kehidupan Dharto dan Hoegeng sendiri. Memang, ada beberapa bagian yang dikutip dari sumber-sumber lain, semata-mata karena Dharto sudah tidak lagi menjadi bagian dari "lingkaran dalam" keseharian Hoegeng. Namun demikian, kelihatannya, penulis tidak mengalami kesulitan mengingat sumber-sumber tertulis yang ada tentang Hoegeng itu, semuanya bernada kompak

perihal karakter Hoegeng sehingga "nyambung" dengan alur tulisan ini pula. ❖

Jakarta, Agustus 2013

Profesor Dr. Adrianus Meliala

Kriminolog dan Guru Besar FISIP UI, dan Komisioner pada Komisi Kepolisian Nasional

Pengantar Penulis

Riwayat penulisan buku ini berawal dari perkenalan penulis dengan Soedharto Martopoespito pada bulan Mei 2013. Soedharto pernah menjadi sekretaris Hoegeng Iman Santoso saat Hoegeng menjadi Menteri/ Sekretaris Presidium Kabinet pada periode Maret 1966 hingga Juli 1966. Meski bekerja di bawah Hoegeng hanya selama sekitar lima bulan, hubungan Dharto—begitu nama panggilannya—dan Hoegeng tak berhenti sampai di situ. Secara pribadi dan kekeluargaan hubungan keduanya terus berlanjut hingga Hoegeng menjadi Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri) dan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) di masa peralihan antara era Orde Lama dan Orde Baru.

Hubungan mereka terputus saat Hoegeng mulai bergabung dengan Petisi 50, kelompok yang dijuluki sebagai *dissident* (pembangkang) oleh pemerintah Orde Baru. Sementara posisi Hoegeng kian tersisih dari lingkaran kekuasaan, karier Dharto sebagai pegawai negeri sipil justru terus meningkat. Ia kemudian menjadi Kepala Biro Umum

Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa (2009). Diharapkan, buku *Hoegeng: Polisi dan Menteri Teladan* ini dapat melengkapi buku-buku sebelumnya tentang keteladanan seorang polisi.

Jika kedua buku pertama berisi kisah tentang Hoegeng sebagai polisi, maka buku ini lebih banyak berkisah tentang Hoegeng sebagai seorang pejabat birokrasi. Meskipun ditunjuk sebagai menteri, Hoegeng tetap tak berubah sikap dan prinsip hidupnya. Ia menjaga nama baik, citra, dan integritasnya, juga korpsnya sebagai Bhayangkara sejati. Ia juga menunjukkan sikap profesionalnya, tak hanya di jalan raya dan sudut-sudut yang rawan dengan kejahatan, tetapi juga sebagai administrator di kantor.

Penulisan buku ini dibuat sederhana. Didasarkan pada cerita yang diungkapkan Dharto yang kronologis, mengikuti perjalanan hidupnya sejak ia menjadi sekretaris Hoegeng yang menjabat Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, hingga persinggungannya dengan Hoegeng saat yang bersangkutan menjabat Wakapolri dan kemudian Kapolri. Beberapa cerita Dharto dirujuk pada kisah dari sumber-sumber lain yang dikonfirmasikan kembali kepada keluarga Hoegeng.

Diharapkan, buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca umum dan dapat ikut mendorong perubahan, terutama di antara para anggota Polri. ❖

Selamat membaca.

Oktober 2013

Suhartono

Bab I

Menjadi Sekretaris Hoegeng

Bekerja di Sekretariat Negara

Nama lengkapnya, Soedharto Martopoespito. Namun, ia cukup dipanggil Dharto saja. Beberapa bulan setelah lulus dari Fakultas Sosial Politik (Sospol) Jurusan Administrasi Negara, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, pada Juli 1963, ia datang ke Jakarta untuk mengadu nasib.

Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, pada 16 Agustus 1939 itu kemudian melamar pekerjaan di Sekretariat Negara (Setneg). Dharto yang pada waktu itu berpostur tubuh kecil—tinggi 159 sentimeter dan berat badan 49 kilogram—kebetulan langsung diterima.

Selain modal ijazah sarjananya, penampilan Dharto yang selalu berpenampilan rapi, ramah, santun, dan mudah bergaul tampaknya mendukung meskipun dia memelihara kumis agak tebal. Setneg juga tengah membutuhkan pegawai baru untuk mengisi pos-pos tertentu. Gelar *dokterandus* (drs)-nya sendiri, boleh dibilang masih sedikit

di Indonesia. Itulah yang membuat Dharto bisa diterima tanpa seleksi.

Sebagai *wong deso* yang belum lama datang ke Jakarta, tentu Dharto merasa bangga bisa langsung bekerja. Apalagi lingkungan pekerjaannya sangat dekat dengan pusat kekuasaan pemerintah. Ditambah, esok harinya, Dharto juga sudah diminta untuk masuk dan mulai bekerja di Setneg.

Hari pertamanya bekerja, Dharto ditempatkan di Bagian Kepegawaian dan Arsip-Ekspedisi di Biro I bidang Administrasi dan Organisasi Setneg. Kantornya di gedung utama Setneg, yang letaknya di sebelah barat Istana Negara. Sebagai staf, ia menangani administrasi kepegawaian, surat menyurat, arsip, ekspedisi, hingga reproduksi dokumen.

Namun, Dharto juga mendapat tugas tambahan sebagai protokoler dan membantu menerima tamu-tamu di rumah kediaman Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I Bidang Politik dan Luar Negeri Soebandrio, Waperdam II Bidang Kesejahteraan Rakyat Johanes Leimena, serta Waperdam III Bidang Ekonomi dan Pembangunan Chaerul Saleh.

Menghafal Gelar Bung Karno

Sebagai protokol, Dharto menjadi pembawa acara, selain juga mendampingi rombongan tamu-tamu negara yang berkunjung ke Indonesia. Ia juga rutin membantu upacara bendera tanggal 17 setiap bulannya di Setneg, selain rapat-rapat seremonial seperti Panca Tunggal dan

Penyelenggaraan Pendidikan Kader Revolusi serta acara-acara kenegaraan lainnya.

Kenangan yang tak terlupakan adalah saat Dharto menjadi pembawa acara di pembukaan pabrik tekstil Patal Senayan pada tahun 1965 di Senayan, Jakarta. Acara itu akan dibuka oleh Presiden Soekarno. Semalaman, ayah empat anak dan delapan cucu itu mengaku tak bisa tidur karena harus menghafal penyebutan Presiden Soekarno yang sangat panjang.

Waktu itu, sebutan untuk Soekarno tak hanya Presiden Republik Indonesia, tetapi juga Mandataris MPRS, Paduka yang Mulia, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, dan Penyambung Lidah Rakyat Indonesia Bung Karno.

Dharto membayangkan jika dalam upacara itu ia salah mengucapkan sebutan Presiden atau tak lancar menyebutkannya, tentu kariernya sebagai PNS berakhir. Untungnya, semuanya berjalan lancar. Dharto yang menikah dengan Noek Sri Soebandini pada tanggal 27 Agustus 1965 ini cukup lantang dan tegas serta tak salah ucap saat menyampaikan sebutan tersebut. Karena senang bisa mengemban tugas "berat" itu, Dharto sempat lupa untuk duduk kembali ke kursinya sehingga Presiden Soekarno mengingatkannya untuk duduk. Setelah itu, baru Presiden Soekarno menyampaikan pidato amanatnya tanpa teks tertulis.

Dharto juga menjadi anggota Batalion Sukarelawan Satya Negara RI, yang didirikan di lingkungan Setneg

untuk menghadapi konfrontasi melawan Malaysia. Ketika itu, Kepala Bagian Kepegawaian Biro I Setneg Soemardi menjadi komandan batalionnya.

Di tengah-tengah pekerjaannya, Dharto juga masih harus ikut membantu pengelolaan Yayasan Eka Kapti. Yayasan yang didirikan Setneg itu bergerak di bidang pengkaryaan kendaraan bus antar-jemput pegawai Setneg. Seusai antar-jemput pegawai, sore hingga malam, bus-bus tersebut dikaryakan lagi untuk membantu angkutan umum di Jakarta. Angkutan umum saat itu memang masih sangat sulit sehingga Setneg diminta ikut membantu mengatasinya.

Setahun menjadi PNS, Dharto dipromosikan menjadi Pejabat sementara (Pjs) Kepala Bagian Administrasi Negara Biro VIII bidang Politik, Keamanan dan Subversi di Setneg pada Oktober 1965.

Ditunjuk Jadi Sekretaris Menteri

Dharto yang belum lama dipercaya sebagai Pjs Kepala Bagian Administrasi Biro VIII bidang Politik, Keamanan, dan Subversi Setneg, kemudian diminta membantu tugas Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Inspektur Jenderal (Pol.) Drs Hoegeng Iman Santoso sebagai sekretaris. Hoegeng masuk dalam jajaran Kabinet Dwikora III, yang dilantik Presiden Soekarno pada tanggal 27 Maret 1966 di Istana Negara.

Sebelum Hoegeng, Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet pada Kabinet Dwikora I—yang disebut juga kabinet 100

Soedharto Martopoespito bersama Soemarjo (alm.), stafnya sewaktu menjadi sekretaris Hoegeng. (Dok. Kel. Soedharto Martopoespito)

menteri—dijabat oleh Abdul Wahab (AW) Surjoadiningrat. Hoegeng sendiri menjadi Menteri Iuran Negara pada kabinet tersebut. Pelantikan kabinet dilakukan Presiden Soekarno pada tanggal 27 Agustus 1964.

Namun, pada Kabinet Dwikora II (kabinet disempurnakan) yang mulai bekerja pada tanggal 24 Februari 1966, jabatan Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet ditiadakan. Hoegeng kemudian diangkat lagi menjadi Menteri Urusan Iuran Negara, yang hanya berjalan sekitar sebulan.

Saat diangkat sebagai sekretaris Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, pengangkatan Dharto tanpa disertai surat keputusan (SK), melainkan hanya secara lisan oleh

atasannya, Kepala Biro di Biro VIII, Komisaris Besar (Pol.) Tjoek Soejono. Dharto hanya diberitahu bahwa dia akan menjadi sekretaris seorang menteri, yaitu Hoegeng, seorang polisi.

Akibat situasi politik yang labil, kebijakan Presiden Soekarno pun berubah-ubah sehingga pemerintahan berjalan kurang tertib dan efektif, termasuk di Setneg. Tak heran jika pengangkatan seorang sekretaris menteri tak disertai sebuah SK. Tjoek hanya menyebutkan Dharto akan dibantu oleh Soemarjo (almarhum), rekannya yang lebih senior di Biro VIII untuk menjadi stafnya di sekretariat Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet. Biro VIII Setneg merupakan unit kerja baru yang dibentuk Menteri Setneg Mohammad Ikhsan.

Di Kabinet Dwikora III, tercatat ada enam Wakil Perdana Menteri (Waperdam) yang menangani masalah keamanan, politik, hubungan kelembagaan, hingga ekonomi dan pembangunan. Enam Waperdam ini berfungsi sebagai Presidium Kabinet (Kabinet Inti), yang masing-masing dijabat oleh Leimena, Adam Malik, Sultan Hamengku Buwono, Idham Chalid, Roeslan Abdulgani, dan Letjen (TNI) Soeharto. Pimpinan Presidium Kabinet adalah Soeharto.

Tanpa Referensi

Saat ditunjuk menjadi sekretaris menteri, perasaan Dharto bercampur baur. Selain ingin bisa melayani pimpinan barunya dengan baik, juga muncul kekhawatiran

bahwa ia tak bisa optimal untuk menjalankan tugas-tugas-nya.

Maklum, Dharto sebelumnya cuma pegawai biasa, yang bertugas membantu administrasi kepegawaian dan merangkap petugas protokoler meskipun dia belum lama menjadi Pjs Kepala Bagian Administrasi Negara Biro VIII. Apalagi, Dharto merasa bagaikan *cah cilik* (anak kecil/ kemarin sore), yang belum punya banyak pengalaman. Tentu saja, di balik itu, Dharto mendapat kepercayaan dan tanggung jawab serta tantangan besar.

Hoegeng sendiri merupakan sosok baru yang sama sekali belum dikenalnya meskipun sebenarnya pernah menjadi kepala jawatan dan menteri. Tjoek juga tak menceritakan sosok Hoegeng yang akan dilayaninya itu meskipun dirinya juga seorang polisi. Waktu itu, belum ada koran maupun televisi sehebat seperti sekarang ini, yang hari demi hari memberitakan kiprah seorang menteri. Kecuali, menteri-menteri tertentu, yang memang banyak disorot. Sebut saja seperti Soebandrio, Chaerul Saleh, dan beberapa menteri lainnya.

Belakangan Dharto baru tahu kalau Hoegeng ternyata juga pernah menjadi Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia (sekarang Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Azasi/Kemenkum dan HAM) dan Menteri Iuran Negara (dulu, untuk urusan pajak dan bea cukai ditangani seorang menteri. Kini, jabatan tersebut dijabat seorang direktur jenderal). ❖

Bab II

Bekerja Bersama Hoegeng

Selalu Datang Lebih Pagi

Jam kerja di lingkungan Setneg setiap hari adalah tujuh jam, kecuali pada hari Jumat, hanya 4,5 jam. Sebab itu, pegawai mulai masuk pukul 07.00, dan pulang ke rumah pukul 14.00. Sedangkan pada hari Jumat, sebelum salat, mereka sudah pulang kantor, yakni pukul 11.30.

Hari pertama sebagai sekretaris Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Dharto dan stafnya masuk seperti biasa, yaitu beberapa menit sebelum pukul 07.00. Namun, Dharto terkejut, sebab Hoegeng ternyata sudah lebih dulu datang ke kantor. "Selamat pagi Mas Dharto," sapa Hoegeng dengan ramah, saat Dharto masuk ke ruangan di lantai satu gedung utama Setneg.

Dharto terkejut dan tersipu karena Hoegeng ternyata lebih dulu masuk kantor. Ini sesuatu yang berbeda dengan saat Dharto masih bekerja di Bagian Kepegawaian dan Arsip-Ekspedisi di Biro I bidang Administrasi dan Organisasi di Setneg.

Disaksikan Presiden Soekarno, Hoegeng menandatangani SK sebagai Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet di Istana pada tanggal 27 Maret 1966. (Dok. Keluarga Hoegeng)

Esoknya, meskipun Dharto berusaha datang lebih awal, Hoegeng ternyata selalu "mengalahkannya" dengan datang lebih pagi dibandingkan Dharto dan Soemarjo. Hoegeng saat itu tinggal di rumah sewaannya di Jalan Madura, Menteng, Jakarta Pusat. Tentu, lebih dekat jaraknya dengan Setneg dibandingkan Dharto yang rumahnya di Kompleks Setneg, Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Meskipun jarak rumahnya dengan kantor relatif jauh, ini tak boleh jadi alasan bagi Dharto untuk selalu "kalah" cepat masuk ke kantor.

Suatu hari, Dharto pun bertekad "mengalahkan" bosnya dengan datang lebih dulu di kantor. Kebetulan, pada saat itu, ia harus menjemput ibundanya, Siti Marlinah Martopoespito (alm.), yang datang dari Solo, Jawa Tengah, di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Setelah menjemput ibundanya pukul 05.00 pagi, Dharto pun turun di kantor. Dan, ia meminta tolong Soemarjo untuk mengantarkan ibunya ke rumah. Dengan demikian, Dharto bisa "mengalahkan" Hoegeng.

Hari itu, Dharto memang lebih dulu tiba di kantor dan bisa menyapa Hoegeng saat masuk ruangan. Namun, karena merasa "dikalahkan" anak buahnya, Hoegeng tak mau kalah. Keesokannya, Hoegeng datang lebih pagi lagi, yaitu pukul 05.30 sehingga kembali menyapa Dharto lebih dulu, "Selamat pagi Mas Dharto."

Sejak itu, Hoegeng selalu datang pukul 05.30, sambil meminta Dharto datang seperti biasa atau beberapa menit sebelum jam kerja dimulai. "Mas Dharto tidak perlu datang seperti saya. Datang pukul 07.00 saja itu sudah bagus," katanya.

Hari-hari selanjutnya, Dharto dan Soemarjo selalu datang sesuai seperti yang diminta Hoegeng. Maka, setiap pagi, Dharto akan selalu mendengar sambutan khas yang ramah saat masuk kantor, "Selamat pagi Mas Dharto,". Dari situ, Dharto mulai mengenal sedikit demi sedikit sosok Hoegeng sebagai pimpinan yang disiplin dan ramah.

Memang, meskipun bekerja di lingkungan sipil, sikap kedisiplinannya sebagai polisi tetap tak berubah.

Menurut Aditya Soetanto Hoegeng, anak kedua Hoegeng yang akrab dipanggil Didit, ayahnya memang seorang yang disiplin pada waktu. Bukan hanya dalam bekerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarganya. "Papi memercayai seseorang dari ketepatan waktu yang dijanjikannya. Sebab, dari ketepatan waktu, semua orang bisa memulai sesuatu dengan baik. Jika orang tidak menepati waktu, sulit untuk melakukan sesuatu, apalagi memercayai omongannya," tandasnya. Ketepatan waktu, yang menjadi warisan berharga ayahnya, dijadikan pegangan oleh Didit dalam bekerja sehari-hari.

Pertahankan Sekretaris

Meskipun belum lama melayani Hoegeng sebagai Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Dharto sudah merasa cocok. Sebagai orang yang baru belajar menjadi sekretaris, Dharto menyadari masih banyak kekurangan yang dimilikinya. Namun, ia tetap berusaha melayani Hoegeng dengan baik agar tugas yang dipercayakan negara kepadanya dapat dilakukan secara optimal. Apalagi situasi dan kondisi negara pada waktu itu tergolong morat-marit. Jadi, Dharto berusaha bekerja dengan baik seperti yang sudah dilakukannya dengan baik pula oleh Hoegeng selaku Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet.

Baru sebulan bekerja, atasannya memanggil Dharto. Dharto diberitahu bahwa ia akan ditarik kembali ke Biro

Mantan sekretaris Hoegeng, Soedharto Martopoespito bersama Meriyati Roeslani, istri Hoegeng. Saat bertugas, Hoegeng dan Soedharto tak pernah berfoto. Foto ini diabadikan di rumahnya pada Agustus 2013. (Suhartono/*Kompas*)

VIII Politik dan Keamanan Setneg. Alasannya, Dharto diperlukan untuk membantu di biro tersebut. Dharto waktu itu hanya menjawab bahwa dirinya ibarat tas atau koper yang tergantung pada pemiliknya akan dibawa ke mana. Jadi, ia tak dapat menolaknya.

Namun, kepastian jadi atau tidaknya ditarik kembali ke Setneg, semuanya tergantung keputusan atasan. Beberapa hari setelah dipanggil atasannya, Dharto ternyata belum juga dipindah. Padahal, Dharto sudah bersiap-siap kembali ke Biro VIII Setneg. Belakangan, Dharto baru tahu kalau Hoegeng ternyata menolak permintaan atasannya untuk kembali ke Biro VIII Setneg. "Hoegeng sudah merasa cocok

dengan Mas Dharto. Jadi, Hoegeng mempertahankan Mas Dharto," ujarnya.

Berkunjung ke Rumah

Tiga bulan setelah bekerja, Dharto dan stafnya sudah mendapat rumah dinas di kompleks perumahan pegawai Setneg di Cidodol, Kebayoran Lama. Lokasi rumah dinas itu cukup jauh dari kantornya di pusat Kota Jakarta.

Cidodol terletak di selatan Kota Jakarta, dan agak terpencil lokasinya. Orang sering menjuluki kawasan tersebut sebagai tempat jin buang anak. Bahkan, tingkat kriminalitas kawasan di pinggiran Jakarta itu masih cukup rawan, sebab waktu itu masih sering berkeliaran anak buah Mat Item, yang dituduh oleh aparat keamanan sering melakukan tindakan melawan hukum.

Kawasan tersebut juga tergolong masih sepi dari pemukiman. Selain banyak lahan kosong dengan semak belukar, juga banyak lahan kebun milik penduduk asli Betawi.

Suatu sore, tanpa diduga, Hoegeng bertamu ke rumahnya. Dharto pun terkejut menyambut tamu istimewa yang mendadak sudah ada di depan pintu rumahnya. "Mas Dharto, kebetulan Hoegeng diberitahu sepupu Hoegeng kalau rumah Mas Dharto itu di sebelah rumahnya. Jadi, sekalian menengok, Hoegeng ingin tahu rumah Mas Dharto. Apakah ibu ada?" tanya Hoegeng.

Setahun setelah bekerja di Setneg, Soedharto Martopoespito menikahi Noek Sri Subandini pada tahun 1965. (Dok. Kel. Soedharto Martopoespito)

Karena senangnya, Dharto mengira Hoegeng ingin bertemu dengan ibundanya, Siti Marlinah, yang belum lama datang ke Jakarta untuk menengok keluarganya. Ibundanya pun dipanggil dan dikenalkan. "Bu, perkenalkan, saya Hoegeng, atasan Mas Dharto," katanya dengan sopan, seraya mengajaknya bersalaman. Meskipun terjadi kesalahpahaman, Hoegeng hanya tersenyum. Dharto kemudian mengenalkan istrinya, Noek Sri Subandini.

Tak lama bertamu, Hoegeng kemudian pamit. Sebelum pamit, Hoegeng berterima kasih karena sudah diterima dengan baik oleh keluarga Dharto. Seperti kata pepatah, dunia ternyata sempit. Siapa yang menduga kalau R Moehirman, tetangga yang rumahnya tepat di sebelah rumahnya, adalah sepupu Hoegeng.

Satu Ruang, Tanpa Penyekat

Gedung utama Setneg, yang letaknya di samping barat Istana Negara, terdiri dari tiga lantai. Di lantai satu, Hoegeng bersama sekretaris dan stafnya berada dalam satu ruang yang berukuran sekitar 10 x 12 meter persegi. Dua ruangan lainnya yang kosong pernah ditempati Waperdam Chaerul Saleh dan Menteri Penghubung MPRS, DPR-GR, DPA, dan Front Nasional.

Adapun lantai duanya pernah digunakan sebagai ruang kerja Menteri Negara Oei Tjoe Tat dan Sekretaris Presiden untuk Urusan Khusus, St Munadjat Danusaputro. Sementara lantai tiganya masih ditempati oleh Leimena.

Ruangan kerja Hoegeng sama sekali tidak memiliki sekat-sekat atau pembatas ruangan sehingga Dharto bisa melihat aktivitas Hoegeng bekerja setiap saat. Posisi duduk Hoegeng dan Dharto juga berhadap-hadapan. Meja kerja Hoegeng berada di sebelah barat gedung utama. Sedangkan meja kerja Dharto dan stafnya berada di sebelah timur.

Karena satu ruangan, Dharto bisa mendengar dan melihat apa yang dikerjakan Hoegeng setiap hari. Mulai dari tamu-tamu yang datang, hingga percakapannya, termasuk pembicaraan di telepon. Sambungan telepon ke Hoegeng dan Dharto juga jadi satu. Jadi, kalau ada telepon masuk, Dharto maupun Hoegeng bisa *dulu-duluan* mengangkatnya. Sebagai sekretaris, tentu Dharto lebih sering mengangkat lebih dulu. Namun, adakalanya juga Hoegeng yang lebih dulu mengangkatnya.

Jika telepon itu salah sambung, Hoegeng dengan nada bercanda menjawabnya," Maaf, ini toko Pasar Baru." Dharto sering tertawa geli dengan Hoegeng yang ternyata juga suka iseng itu.

Pernah ada telepon yang sebenarnya ditujukan kepada Dharto. Telepon berasal dari Soegijat Wiyadji (alm.), sekretaris dari Sekretaris Presiden Munadjat, rekan Dharto di Setneg. Namun, tampaknya, Hoegeng pun ikut mengangkat dan mendengarkannya tanpa setahu Dharto. Dalam teleponnya, Soegijat mengatakan," Wah, Mas Dharto *iku penak ya melu* (enak ikut) Pak Hoegeng. *Entuk* (dapat) ini-itu." Dharto langsung menepis tuduhan itu berkali-kali.

Selesai berbicara di telepon, Dharto terkejut. Sebab, Hoegeng langsung menelepon Munadjat. "Itu, sekretaris Pak Munadjat tidak *bener*. Meskipun Mas Dharto ikut kerja bareng Hoegeng, tetapi dia tidak dapat apa-apa. Hoegeng tidak punya apa-apa," tambahnya.

Tak lama, Soegijat datang dan menegur Dharto karena Dharto dituding melaporkan hal itu kepada Hoegeng. "*Ngono wae* (begitu saja) kok lapor. Kita, kan, *guyon* (bercanda)," ujarnya, sambil agak marah. ❖

Bab III

Hoegeng, Pribadi yang Terbuka

Tak Ada Rahasia

Sehari-hari, Hoegeng merupakan sosok yang terbuka. Tak ada dokumen ataupun kegiatannya yang ditutup-tutupinya tanpa sepengetahuan Dharto sebagai sekretaris. Intinya, Hoegeng memang tak memiliki rahasia menyangkut pekerjaannya sehari-hari.

Hal itu terlihat dalam kesehariannya di kantor, misalnya dalam hal menerima tamu. Hoegeng tak pernah menerimanya di luar kantornya. Siapa pun tamunya dan dari mana pun asal-usulnya, selalu diterima di ruang kerjanya. Oleh sebab itu, tamu-tamu Hoegeng bisa dilihat oleh sekretaris dan stafnya.

Dalam hal menerima tamu, Hoegeng tergolong unik. Siapapun tamunya, dan dari mana asal usulnya—apakah dia orang Jawa, atau luar Jawa—Hoegeng selalu menyapanya ramah dengan bahasa yang khas. "*Monggo-monggo* (silahkan) duduk," sapa Hoegeng.

Demikian pula menyangkut isi pembicaraannya dengan para tamu. Dharto sering kali ikut mendengarkan isinya.

Mulai dari yang ringan hingga rahasia. Dharto dan stafnya juga tak pernah diminta ke luar ruangan jika Hoegeng menerima tamu.

Suatu kali, Hoegeng pernah menerima tamu di mejanya. Mulanya, Dharto mengira pertemuan ini penting dan bersifat rahasia sehingga ia keluar ruangan diam-diam. Tetapi, Hoegeng malah memanggilnya. "'Mas Dharto mau ke mana? Tidak apa-apa, di sini saja," ungkapnya.

Dokumen penting yang sifatnya rahasia, seperti terkait Presiden Soekarno atau sejumlah menteri lainnya, juga bukan sesuatu yang rahasia untuk diketahui oleh Dharto. Sebagai sekretaris, Dharto bahkan wajib untuk membaca dan mengetahui isinya. "Mas Dharto baca dulu dokumennya ya, biar paham kalau bekerja," begitu selalu Hoegeng mengingatkan.

Meskipun mengetahui isi seluruh dokumen yang berklasifikasi sangat rahasia tentang kondisi negara ataupun terkait seorang menteri bahkan presiden, semuanya disimpan Dharto dalam hati. Hoegeng memang ingin agar Dharto tak hanya sekadar bekerja, tetapi juga memahami apa yang dikerjakannya. Setelah mengetahui isinya, Dharto langsung melupakannya. Alasannya, agar Dharto tidak pusing memikirkan lagi. Hingga kini, Dharto mengaku tak ingat sama sekali isi dokumen-dokumen tersebut.

Dengan pengalamannya itu, Dharto mendapat gambaran bahwa Hoegeng adalah sosok yang terbuka dan tak mau menyembunyikan sesuatu. Hoegeng juga sosok pejabat

yang bekerja sungguh-sungguh dan profesional. Tentu, jika Hoegeng bersifat tertutup, bermain-main dalam tugas, bahkan mau curang dan memanfaatkan jabatannya, Hoegeng bisa saja menyuruh Dharto dan stafnya keluar lebih dulu. Tetapi, itu tak pernah dilakukan Hoegeng selama dilayaninya.

Serius Bekerja

Sebagai Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Hoegeng bertugas mengatur rapat Presidium Kabinet dan menyiapkan bahan-bahan rapat bagi anggota Presidium Kabinet. Dalam rapat Presidium Kabinet yang berlangsung seminggu sekali, Hoegeng menjadi juru tulis atau notulis dalam rapat yang dipimpin oleh Soeharto.

"Mas Dharto, sebagai Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Hoegeng ini seperti *carik* (juru tulis di desa). Kalau rapat, tugas Hoegeng ya mencatat inti pembicaraan dan hasil rapat," ujar Hoegeng.

Hoegeng juga hadir dalam Sidang Kabinet di Istana Negara yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun, Hoegeng tak menjadi notulis karena peranan itu dilakukan oleh Mensesneg Ikhsan.

Rapat Presidium Kabinet yang dipimpin Soeharto biasanya dilakukan di salah satu ruangan yang tak jauh dengan ruang kerja Hoegeng di gedung Setneg. Setiap kali memimpin rapat, ajudan Soeharto—yaitu Suroso atau Harso, yang bergantian bertugas—selalu menunggunya. Karena tak ada tempat untuk menunggu, Dharto selalu

menawarinya untuk menunggu di ruang tamu Hoegeng. Sambil menunggu, Dharto biasanya menyediakan segelas teh atau kopi.

Hoegeng juga sosok menteri yang bekerja dengan rapi. Setiap dokumen yang terkait anggota Kabinet Dwikora III diberi nama dan tanda khusus untuk memudahkan pencarian dokumennya. Hoegeng langsung menuliskan dan memberinya tanda khusus untuk setiap dokumen.

Surat dinas yang akan dikirimkannya juga tak pernah diketiknya. Hoegeng selalu menuliskannya dengan tangan dan menggunakan tinta beraneka warna sehingga kantong bajunya penuh dengan pulpen berwarna. Misalkan, untuk menulis "kepada"-nya ditulis dengan tinta berwarna biru. Sedangkan nama yang dituju diberi warna hijau atau kuning. Pilihan warnanya sesuai dengan selera dan *mood* (perasaan) Hoegeng pada saat itu. Lain waktu, bisa saja warna lain digunakannya jika menurutnya cukup indah.

Untuk setiap surat yang isinya sangat rahasia, sebelum dikirimkan, Hoegeng selalu memasukkannya dalam tiga amplop yang berbeda, dan kemudian dijadikannya satu dalam amplop. Setelah itu, baru dilem dan dikirimkan. Adapun setiap dokumen yang dijadikan arsip, selalu diberi nama dan tanda khusus oleh Hoegeng. Misalnya, pada dokumen terkait salah seorang menteri yang waktu itu disorot oleh publik karena manuver politiknya, Hoegeng pun memberinya tanda dengan gambar *buto* rambut *geni* (raksasa berambut api), yaitu wajah raksasa dengan lidah api di kiri kanan kepalanya seperti dalam cerita pewayangan.

"Tanda lidah api itu bisa diartikan bermacam-macam makna, misalnya seseorang yang mulai bermain api," ujar Hoegeng. Sosok seperti yang digambarkan Hoegeng tersebut, pada akhirnya memang dipenjara.

Mengingat tugasnya yang penting, Hoegeng pun sangat serius bilamana tengah bekerja. Sejak pukul 07.00 hingga pukul 14.00, Hoegeng menghabiskan waktunya bekerja di kantor. Sesekali dia menerima tamu di meja kerjanya. Setelah itu, dia bekerja kembali dengan serius.

Setiap hari, Dharto selalu mengurusi surat dinas yang masuk atau keluar. Isinya bermacam-macam. Bisa terkait laporan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan, atau hubungan kedinasan antarmenteri.

Seperti biasanya, selesai bekerja pada pukul 14.00, Hoegeng selalu menghampiri meja kerja sekretarisnya. "Mas Dharto, apakah kantor sudah bisa ditutup? Ini Hoegeng sudah selesai. Kalau belum selesai, ya Hoegeng tunggu saja," ujarnya. Sambil menunggu, kemudian Hoegeng bercerita berbagai pengalamannya. Hoegeng biasanya duduk di kursi di depan meja Dharto.

Selama di kantor, Hoegeng tak pernah makan siang. Ia hanya minum teh hangat yang selalu disediakan petugas bagian rumah tangga Setneg. Sebagai orang Jawa, Hoegeng memegang kuat adat Jawa, yaitu menghargai apa yang telah dimasak oleh istrinya, Meriyati Roeslani, yang dipanggil Meri.

Di rumah, menurut penuturan Meri, dia memang selalu menunggu suami dan anak-anaknya pulang untuk makan siang dan malam bersama. Masakan yang disukai Hoegeng adalah sayur lodeh dan tempe goreng. Apalagi, jika dilengkapi dengan lalap pete atau jengkol dan sambal terasi pedas.

Tradisi makan bersama terus dilakukan Hoegeng hingga ia menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menteri/Pangak), yang kemudian berganti menjadi Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri). "Kami sering makan bersama kalau Papi sudah pulang kerja. Sambil makan, kami menceritakan apa saja yang menarik dan yang kami alami pada hari itu," ujar Didit, putra Hoegeng.

Bawa Tas Sendiri

Setiap berangkat ke kantor, Hoegeng selalu membawa dua tas kerja. Tas kerjanya pada waktu itu berbentuk kotak yang berwarna hitam. Satu tas berisi dokumen-dokumen dinas yang diperlukan pada hari itu, dan satu tas lagi berisi buku besar yang berisi catatan kegiatan pribadinya beserta daftar tamu dan isi pertemuannya. Dua tas koper tersebut tak pernah dilupakannya dan selalu dibawa ke mana-mana.

Suatu hari, Hoegeng ada acara di luar kantor. Karena kebetulan mobilnya belum datang dan Hoegeng sudah ditunggu di Mabak untuk mengikuti pertemuan, Hoegeng minta tolong Dharto untuk mengantarkannya. Dharto setuju saja, tetapi beralasan mobilnya kecil, dan sulit buat

Hoegeng duduk. Hoegeng menjawab, "*Ora opo-opo* (tidak apa-apa) Mas Dharto. Hoegeng, diizinkan menumpang."

Dharto saat itu hanya terpikir, Hoegeng yang tinggi badannya, tentu agak janggal jika berada di mobil Mazda "kotak" yang ruangan kemudinya sangat kecil. Berbeda dengan postur tubuh Dharto yang memang kecil. Dilihat orang juga agak lucu. Namun, tampaknya Hoegeng tak menganggap ini sebagai persoalan. Dharto pun mengantarkannya.

Saat berjalan dari ruang kerjanya ke ruang parkir kendaraan di Setneg, Hoegeng membawa sendiri dua tas kerjanya. Pada saat itu, Dharto pun berinisiatif menawarkan diri membawakan salah satunya. Namun, Hoegeng menolak. "Terima kasih Mas Dharto, tidak usah. Hoegeng masih kuat dan bisa membawa sendiri," ujarnya. Tetapi, Dharto merasa tidak enak melihat bosnya membawa dua tas di kanan kirinya. Sedangkan Dharto yang berjalan di sampingnya *lenggang kangkung* (tak membawa apa-apa). Dharto pun memaksa diri. Namun, Hoegeng tetap bersikeras.

Dharto lalu berkata, "Pak Hoegeng, misalkan, Pak Hoegeng itu bapak saya, dan saya ini anaknya. Apakah pantas anaknya jalan *lenggang kangkung* dan tidak membantu apa-apa padahal bapaknya bawa dua tas di kanan kirinya?" tanya Dharto. Mendengar hal itu, Hoegeng tampaknya terpengaruh. Dia setuju, dan memberikan salah satu tasnya ke Dharto, "Monggo, kalau Mas Dharto mau membantu."

Dharto kemudian mempersilakan Hoegeng naik ke mobilnya. Dharto duduk di belakang kemudi, Hoegeng duduk di sebelahnya. Kalau mengenang peristiwa tersebut, Dharto tersenyum geli sendiri. Sebab, Hoegeng yang berpostur tubuh tinggi harus duduk di mobil yang kecil. Bukan hanya dengkulnya yang menyentuh *dashboard* mobil, tetapi juga kepalanya mentok ke atap mobil.

Suka Bercerita

Hoegeng adalah sosok yang senang bercerita jika sudah pulang kantor. Kalau sudah bercerita, adakalanya ia tak ingat waktu. Ceritanya, selain pengalamannya saat ia menjadi Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia, juga saat menjadi Menteri Iuran Negara.

Adakalanya isi ceritanya diselingi dengan *joke-joke* segar yang lucu. Bahkan, terkadang nakal sehingga membuat orang tertawa terpingkal-pingkal. Misalnya, cerita tentang Marilyn Monroe, aktris seksi Hollywood, AS.

Pernah karena asyiknya bercerita, jam pulang kantor sudah lama terlewati. Hoegeng pun segera menghentikan ceritanya, dan buru-buru minta maaf ke Dharto.

"Ayo, tutup kantornya Mas Dharto, kita pulang. Maaf, Hoegeng terlalu menyita waktu dengan banyak cerita sehingga Mas Dharto tidak bisa pulang tepat waktu. Kasihan *manten anyar* (pengantin baru)," katanya meledek Dharto yang waktu itu belum lama menikah.

Meskipun serius saat bekerja, Hoegeng adalah pribadi yang terbuka dan senang bercerita. Hoegeng di meja kerjanya saat menjadi Kepala Polri. (Dok. Keluarga Hoegeng)

Sebelum meninggalkan kantor, Hoegeng pun seperti biasa selalu memberi hormat kepada Dharto, yaitu dengan cara mengangkat telapak tangan kanannya di depan dahi dengan sikap sempurna. Sikap Hoegeng tersebut sangat mengesankan Dharto. Baginya, Hoegeng merupakan sosok pemimpin yang bisa menghargai siapa pun meskipun hanya kepada anak buahnya.

Harus Diterima Langsung

Hoegeng juga sosok yang tertib dalam bekerja, terutama dalam urusan surat-menyurat. Surat-surat dinas yang ditujukan kepada pejabat tertentu, Hoegeng minta

agar langsung diterima oleh yang bersangkutan. Ia tak mau suratnya dititipkan kepada petugas penerima surat, sekretaris, dan ajudan, apalagi pengawal. Surat kepada beberapa menteri, misalnya, apa pun kendalanya, harus sampai ke tangan sang menteri. Hanya surat kepada Presiden Soekarno yang cukup diterima oleh ajudannya. Namun, Hoegeng biasanya memberitahukan lebih dulu kepada ajudan Presiden tentang orang yang akan mengantar surat tersebut.

Suatu saat, Dharto diminta menyampaikan surat kepada Presiden Soekarno melalui ajudannya di Istana Negara. Selepas melewati pintu penjagaan pengawal Presiden yang waktu itu dikenal dengan Tjakrabirawa, Dharto pun diizinkan masuk. Baru beberapa meter dari pos penjagaan, tiba-tiba ada seseorang berteriak memanggil namanya dari arah pintu masuk ke Istana Negara.

"Mas Dharto... Mas Dharto... sini," ujar pria yang berdiri di ujung Istana sambil melambaikan tangannya. Dia adalah Mangil, bernama lengkap Mangil Martowidjojo, ajudan Presiden yang berpangkat Komisaris Besar. Mangil juga dikenal sebagai Komandan Detasemen Kawal Pribadi Presiden Tjakrabirawa.

Dharto tentu terkejut karena ada yang memanggil namanya di kawasan Istana. Mangil langsung mendekati dan mengenalkan diri," Saya Mangil, ajudan Presiden. Saya sudah ditelepon Pak Hoegeng. Katanya, nanti ada sekretaris Pak Hoegeng namanya Mas Dharto. Saya agak ragu karena

menurut Pak Hoegeng, Mas Dharto itu orangnya tinggi besar, dan berkumis baplang, "ujar Mangil seraya tertawa.

Mangil memang sudah terbiasa dengan kebiasaan Pak Hoegeng yang senang guyon. Jadi, dia tak marah melihat Dharto dengan ciri-cirinya yang bertolak belakang dengan yang disebutkan Hoegeng. Dharto sendiri paham dengan gaya Hoegeng yang suka bercanda.

Suatu saat, Hoegeng juga pernah meminta Dharto untuk mengantarkan dua surat dengan kategori sangat rahasia kepada Waperdam Roeslan Abdulgani dan Idham Chalid. Permintaan Hoegeng, surat tersebut harus sampai ke tangan mereka. Jangan lewat sekretaris apalagi ajudan, kata Hoegeng.

Pertama, surat harus diantar ke Roeslan Abdulgani. Kebetulan, sekretarisnya rekan Dharto waktu di Setneg sehingga Dharto berharap suratnya mudah disampaikan kepada Roeslan. Namun ternyata tak mudah. Meskipun sekretarisnya adalah rekannya, dia tetap minta Dharto menitipkan suratnya itu kepadanya.

Menurut sekretarisnya, Roeslan tengah beristirahat tidur siang sehingga tak bisa diganggu untuk sekadar menerima surat. Surat pun dimintanya untuk disampaikan nanti setelah Roeslan bangun tidur. Tetapi, Dharto bersikeras bahwa surat harus langsung disampaikan kepada Roeslan, tanpa perantara siapa pun.

"*Mosok karo konco dewe ora percoyo sih* (Masa sama teman sendiri tidak percaya?) Saya sama sampeyan itu, kan, sama-sama dari Setneg. *Wong mosok* sekretaris *karo* sekretaris *wae kok ora percoyo,*" ujar rekan Dharto itu.

Namun, Dharto tetap menolak jika tidak diterima langsung oleh Roeslan.

Rupanya Hoegeng sebelumnya juga menelpon Roeslan perihal pengiriman surat tersebut sehingga dia sempat menengok dari jendela ruang kerjanya saat ada suara ribut di bawah. "Surat dari Pak Hoegeng ya?" tanya Roeslan, dan kemudian Dharto diminta naik untuk menyampaikan surat tersebut.

Adapun surat yang kedua harus diantarkan kepada Idham Chalid. Tiba di rumahnya di Jalan Mangunsarkoro Menteng, Idham Chalid ternyata berada di rumahnya yang lain, di Jalan Bambu Kuning Kebayoran Baru. Dharto pun segera meluncur. Namun, setibanya di tujuan, Dharto terlambat. Sebab, Idham Chalid sudah pergi ke Tugu, Puncak. Padahal, waktu itu, jam sudah menunjukkan pukul 17.30—sebentar lagi berlaku jam malam yang dimulai pukul 18.00 petang hingga pukul 06.00 pagi.

Agar tak terjebak di jalan, Dharto pun meminjam telepon rumah Idham Chalid untuk melaporkan kepada Hoegeng jika suratnya belum bisa diterima. Hoegeng setuju mereka pulang dulu karena akan berlaku jam malam, dan berpesan agar surat tersebut disimpan baik-baik. Esoknya, pagi-pagi sekali, Dharto menuju rumah Idham Chalid dan menyampaikan surat tersebut. Setelah diterima Idham Chalid, Dharto melapor kembali. Hoegeng mengucapkan terima kasih. ❖

Bab IV

Tak Menikmati Fasilitas

Tak Mau Dikawal

Setelah diangkat sebagai sekretaris Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Dharto melapor kepada mantan atasannya, Kepala Biro I bidang Administrasi dan Organisasi Setneg, Sarojo Hanggoro. Dharto ingin mengetahui apa saja yang menjadi hak Hoegeng sebagai menteri. Menurut Hanggoro, Hoegeng berhak memperoleh pengawalan pribadi, baik di kantor maupun di rumah kediamannya. Selain juga uang operasional, beras satu karung atau 100 kilogram (kg), gula pasir 50 kg, dan minyak goreng satu kaleng.

Kalau uang operasional, Dharto bisa mewakilinya untuk menandatangani di Bagian Keuangan Setneg jika Hoegeng tak bisa mengambilnya. "Dharto bisa menandatanganinya, dan diberikan kepada Pak Hoegeng. Jadi, tidak perlu Pak Hoegeng yang harus mengambilnya," kata Hanggoro.

Namun, untuk mengambil jatah bahan pokok setiap bulannya, Dharto harus mengambilnya sendiri di Yayasan Soedirman. Dharto harus menemui Roto Soewarno, petugas

di yayasan yang akan mengurusnya. Yayasan Soedirman merupakan yayasan yang didirikan oleh pemerintah untuk mengelola kesejahteraan para menteri dan pejabat tinggi lainnya.

Dharto pun melaporkan hal tersebut kepada Hoegeng. Namun, Hoegeng justru tak mau memanfaatkan fasilitas negara tersebut. Dia menolak secara halus. "Mas Dharto, sampaikan salam hormat dan rasa terima kasih Hoegeng kepada Pak Hanggoro. Sampaikan juga permohonan maaf Hoegeng karena Hoegeng tidak memerlukan pengawal pribadi di kantor maupun di rumah," ujar Hoegeng.

Menurut Hoegeng, dia tetap bisa bekerja dengan baik meskipun tanpa pengawalan. "Hidup Hoegeng berserah saja, tak perlu dikawal-kawal. Kalau Hoegeng mau mati, ya mati saja. Tidak usah pakai pengawal atau penjaga di rumah," tambah Hoegeng meyakinkan.

Terhadap tawaran pengawalan di depan rumah, yang dikenal dengan "gardu monyet", Hoegeng juga menampik. "Nanti, teman-teman Hoegeng tidak ada yang berani berkunjung ke rumah karena harus lapor lebih dulu ke petugas penjaga. Jadi, tidak usah, Mas Dharto. Biar saja bebas," tambahnya.

Soal uang operasional yang menjadi haknya, Hoegeng menerimanya meskipun sebelumnya sempat mempertanyakan. Pengambilan uang itu dilakukan oleh Dharto, dan diserahkan kemudian kepada Hoegeng.

Hoegeng ternyata juga tidak menggunakan semua fasilitas negara sejak dipercaya menjadi Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia maupun Menteri Iuran Negara. Hal itu diketahui oleh Dharto lewat supirnya, Aco, yang kebetulan sering mengobrol di kala senggang.

Bahkan, saat ditunjuk menjadi Wakil Menteri/ Panglima Angkatan Kepolisian (Pangak) dan Menteri/ Pangak (kemudian berubah menjadi Kepala Polri), Hoegeng juga tetap menolak pengawalan tersebut. Hanya ada dua ajudan dinas yang bergantian bertugas saat hari kerja dan staf ajudan yang membantunya sehari-hari. Hoegeng tak mengizinkan mereka memakai pakaian dinas, kecuali ajudan dinas yang memang mendampinginya sehari-hari. Staf ajudan juga dimintanya hanya berpakaian preman.

Jatah Anak Buah Bertambah

Saat mengurus jatah beras, gula pasir, dan minyak goreng di Yayasan Soedirman, Dharto bertemu dengan Roto Soewarno, petugas di yayasan yang sebelumnya juga sudah dikenalnya. Karena Roto tahu Hoegeng menolak fasilitas negara lainnya kecuali jatah beras, gula, dan minyak goreng, Roto pun menambah jatah beras Hoegeng untuk kesejahteraan anak buahnya. Namun, tambahan satu karung itu diberikan untuk anak buahnya.

"Mas Dharto *duwe staf piro lan sopire* Pak Hoegeng *piro*? (Mas Dharto punya staf berapa dan sopirnya Pak Hoegeng berapa?)," tanya Roto. Dharto kemudian menjelaskan.

Selain dia, ada seorang staf serta dua orang sopir. Jadi, seluruhnya empat orang.

"*Mung ojo matur karo* (tetapi, jangan bilang) Pak Hoegeng*yo* kalau jatahnya ditambah?" pinta Roto. Hoegeng memang mempunyai dua supir sejak menjadi Kepala Jawatan Imigrasi dan Menteri Iuran Negara. Satu orang, yakni Aco, untuk urusan dinasnya, dan yang satunya sopir untuk urusan rumah tangganya.

Dharto bersama stafnya pun sepakat soal pembagian beras. Dharto dan Soemarjo akan mendapatkan masing-masing 30 kg dan dua orang sopir Hoegeng mendapatkan masing-masing 20 kg. Sedangkan untuk jatah minyak goreng dan gula, Dharto beserta stafnya tidak mendapatkan.

Tak hanya Dharto dan stafnya yang merasa senang dengan jatah beras, tetapi juga sopir Hoegeng. "Sejak ikut Pak Hoegeng, kami tidak pernah dapat jatah beras seperti ini," ujar Aco, yang seumur-umur baru mendapat beras gratis sebanyak 20 kg dan berkualitas bagus.

Untuk menjaga pesan Roto, mereka juga sepakat untuk tidak memberitahukan hal itu kepada Hoegeng kalau jatah berasnya ditambah untuk kesejahteraan mereka. Jika Hoegeng adalah tipe pejabat yang meminta ini-itu, tentu mereka tak akan merasakan tambahan beras gratis berkualitas.

Sebagai PNS, Dharto sebenarnya mendapat jatah beras 10 kg ditambah 10 kg untuk istri dan masing-masing jatah anak sesuai jumlah anak. Namun, kualitasnya tentu berbeda

dengan jatah beras yang diterima menteri. Beras untuk pegawai biasanya berwarna kuning, baunya apek, dan rasanya pera. Berbeda dengan jatah beras untuk pejabat yang biasanya berwarna putih, wangi, dan rasanya juga pulen.

Acapkali berasnya penuh kutu. Bahkan suatu kali Dharto pernah mendapat jatah beras bulgur. Namun, istri Hoegeng, Meri, pernah mengajarinya memasak beras dengan daun pandan wangi agar bau apeknya hilang.

Saat menjadi Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia dan Menteri Iuran Negara, Hoegeng memang tetap digaji oleh kesatuannya sehingga dia tak mau lagi memanfaatkan fasilitas apa pun terkait jabatan barunya itu.

Tolak Mobil Dinas

Sebagai Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Hoegeng sebenarnya akan mendapat jatah dua mobil: satu mobil dinas sebagai menteri dan satu mobil untuk keluarga. Waktu itu, Hoegeng sudah menerima satu mobil dinas. Sedangkan untuk keluarganya, Hoegeng belum menerima. Adapun mobil dinasnya saat menjadi Menteri Iuran Negara, sudah dikembalikannya setelah berganti jabatan.

Tak lama, Hoegeng ditawarkan mobil jenis Holden keluaran terbaru tahun 1965, yang diperuntukkan untuk keluarganya. Namun, Hoegeng menolaknya. Alasannya, Hoegeng sudah punya dua mobil dinas. Selain mobil *jeep* Willis dari korpsnya di Kepolisian, juga satu mobil dinas sebagai Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet.

"Hoegeng mau simpan di mana lagi, Mas Dharto? Hoegeng tak punya garasi lagi?" katanya beralasan ketika Dharto memberitahukan soal jatah mobil untuk keluarganya.

Karena harus diambil sesuai ketentuan Setneg, Hoegeng pun akhirnya mengalah. "Ya sudah, tetapi tolong disimpan di rumah Mas Dharto saja ya, suatu saat Hoegeng perlu, Hoegeng akan pinjam saja," tambah Hoegeng. Dharto sebenarnya juga tak punya garasi di rumah dinasnya. Namun, karena Hoegeng yang meminta, ia pun mengangguk saja. Apalagi sebelumnya Dharto yang memberitahukan adanya mobil dinas baru tersebut.

Karena Dharto juga tak punya garasi, Dharto pun melapor kepada atasannya di Biro I Bagian Organisasi dan Administrasi Setneg. Oleh atasannya, Dharto dipinjami satu garasi untuk menyimpan mobil dinas Hoegeng. Garasi yang dipinjami merupakan garasi umum milik Setneg di kompleks perumahannya. Kebetulan, saat itu, masih ada satu garasi kosong untuk penitipan mobil Hoegeng.

Dharto sendiri waktu itu sudah punya mobil dinas jenis Mazda "kotak", yang bentuknya memang kotak. Karena itu, Dharto pun sudah terbiasa ketika harus mengurus mobil dinas Hoegeng sebelum berangkat ke kantor. Selain dibersihkan, Dharto juga memanasi mesinnya setiap hari.

Suatu saat, pernah Dharto mencoba menjalankan mobil dinas Hoegeng supaya mesinnya tidak rusak karena selama itu tak pernah digunakan. Namun, Dharto kapok. Nomor plat mobilnya yang berkode khusus membuat Dharto

diberi penghormatan oleh polisi yang kebetulan bertugas di sepanjang jalan.

Hoegeng suatu saat memang pernah meminjam mobil dinasnya karena ada keperluan keluarga. "Mas Dharto, boleh Hoegeng pinjam mobil Holden-nya karena Hoegeng ada keperluan keluarga? Tolong diantar ke rumah ya, Mas Dharto?" pintanya. Dharto kemudian mengantarkannya ke rumah Hoegeng. Esoknya, mobil sudah dikembalikan lagi oleh sopir Hoegeng kepada Dharto.

Menurut Moehirman, sepupu Hoegeng, yang rumahnya di sebelah rumah Dharto, setiap kali Hoegeng mendapat mobil dinas saat masih bertugas di Polri maupun Menteri Iuran Negara, di dalam mobilnya Hoegeng selalu menulis, "Mobil Dinas, Tidak Boleh Dipinjam." Moehirman pun pernah bertanya kepada Dharto, "Apakah di mobil Holden yang dititipkan ke Mas Dharto, ada tulisan seperti itu?" Dharto menjawab tidak ada. "Berarti, Pak Hoegeng percaya sama Mas Dharto," katanya lagi.

Setelah Hoegeng diganti, mobil dinas menteri yang dititipkannya diserahkan Dharto kepada Sudharmono selaku Sekretaris Kabinet (Sekab) yang baru. Jabatan Menteri/Sekertaris Presidium Kabinet dibubarkan dan diganti dengan Sekretaris Kabinet. Hoegeng waktu itu ditunjuk menjadi Wakil Menteri Muda/Wakil Panglima Angkatan Kepolisian urusan Operasi (Wamen/Wapangak) pada tanggal 3 Agustus 1966, sekaligus juga diberhentikan sebagai Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet.

Serahkan Hadiah Mobil ke Temannya

Beberapa minggu menjadi Menteri/Sekretaris Presidiun Kabinet, Hoegeng mendapat hadiah mobil baru dari Dasaad Musin Concern, yaitu salah satu perusahaan milik pengusaha pribumi yang dikenal sebagai pemegang lisensi beberapa merek mobil Eropa dan Jepang seperti Mazda dan Fiat. Perusahaan tersebut dikenal berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Soekarno sejak awal berdirinya pemerintahan.

Mobil yang diterima Hoegeng adalah Mazda "kotak" keluaran terbaru, seperti yang dimiliki Dharto. Hoegeng tak tahu apa maksud pemberian hadiah mobil baru tersebut. Yang jelas, dalam suratnya, Dasaad menyebutkan Hoegeng mendapatkan fasilitas kendaraan untuk menjalankan tugasnya sebagai menteri. Mobil tersebut dapat diambil di *show room* mobil perusahaan tersebut. Syaratnya, asalkan membawa surat pemberitahuan tersebut sebagai bukti pengambilannya.

Sejak diterima, untuk beberapa saat, Hoegeng membiarkan saja surat itu tergeletak di meja kerjanya, tanpa ditindaklanjutinya. Sebab, Hoegeng tak mau begitu saja menerima hadiah dari seseorang terkait jabatan barunya itu.

Hingga suatu hari, Hoegeng kedatangan seorang tamu, teman lamanya. Dharto sendiri tak mengenalnya. Namun, dari cara Hoegeng menyambutnya, tamu tersebut sangat akrab dan cukup dikenal dengan baik oleh Hoegeng.

Tanpa basa-basi, setelah dipersilakan masuk, tamu tersebut langsung duduk di depan meja kerja Hoegeng. Suaranya cukup keras. "Selamat ya Mas Hoegeng. *Saiki penak, yo* (Sekarang enak, ya). *Wis dadi* (Sudah jadi) menteri. *Kabare* (kabarnya) Mas Hoegeng *entuk* (dapat) mobil baru jenis Mazda *saka* (dari) Dasaad, *yo* (ya)," kata tamu tersebut.

Mendengar hal itu, sejenak Hoegeng tampak tertegun. Namun, Hoegeng kemudian menjawab, "Oh ya, memang benar. Ini suratnya." Hoegeng kemudian menunjukkan surat dari Dasaad. Namun, menurut Hoegeng, mobilnya belum diambilnya karena dia masih mempertimbangkan. "*Sampeyan gelem* (Kamu mau)?" ujarnya menawarkan mobil tersebut kepada temannya.

Sang tamu langsung menjawab seraya mengambil surat dari tangan Hoegeng, "*Yo, gelem wae* (Ya, mau saja) Mas." Surat hadiah mobil pun berpindah tangan. Beberapa saat lamanya setelah ngobrol *ngalor ngidul* (ke sana ke mari), sang tamu pulang.

Hoegeng kemudian berkata kepada Dharto, "Mas Dharto, Hoegeng heran ya. *Saiki* (Sekarang), ada orang *sing tego-tegone* (yang tega-teganya) mau menerima mobil, padahal teman Hoegeng tadi hidupnya lebih kaya dari Hoegeng."

Hoegeng memang tak mau mengambil begitu saja hadiah tersebut. Dia justru mempertanyakan, apakah dia pantas dan layak menerima hadiah mobil dari pengusaha yang belum dikenalnya secara pribadi. Apalagi, jika

dikaitkan dengan jabatan barunya sebagai Menteri/ Sekretaris Presidium Kabinet.

"Dengan kejadian tersebut, barangkali Hoegeng diingatkan agar tidak perlu menerima hadiah mobil yang tak diketahui juntrungannya. Kejadian itu membuat Hoegeng bersyukur tidak menerima hadiah apa pun dari siapa pun apalagi terkait tugas dan jabatan Hoegeng," paparnya lagi.

Saat menjadi Kapolri, Hoegeng juga menolak sejumlah pemberian hadiah. Hal itu seperti diceritakan Didit. Sepulang dari sekolah, Didit terkejut. Sebab, ada dua motor kiriman yang sebagian masih terbungkus plastik di rumahnya di Jalan Madura. Dua motor tersebut diletakkan di dekat kamarnya. "Semoga Papi tidak menolak. Mungkin kalau motor boleh. Daripada tidak dapat mobil, Lambretta pun lumayan," pikirnya. Lambretta merupakan salah satu merek *scooter* terkenal pada zaman itu.

Sorenya, Hoegeng pulang dari kantor. Didit hanya mengintip dari lubang angin di kamarnya. Dia melihat ayahnya memanggil ajudan saat melihat ada dua motor Lambretta di rumahnya. Sesaat kemudian ayahnya melihat jam tangan, lalu berkata, "Ini masih jam 16.00, masih ada orang di kantornya. Tolong motor ini dikembalikan lagi ke pengirimnya."

Didit, yang mendengar perintah ayahnya, hanya diam saja. Selain sedih, dia hanya bisa bergumam dalam hati, "Ya, pahit lagi." Namun, Didit tak berani mengutarakannya pada ayahnya.

Jual Sepatu

Suatu saat, setelah mengantarkan Hoegeng ke kantor, Aco, sopir Hoegeng terlihat murung. Dharto kemudian menanyakan apa yang tengah terjadi. Ternyata, sopir Hoegeng sedih dan bingung karena belum berhasil menjalankan amanat majikannya.

Amanatnya adalah, Aco dimintai tolong oleh Hoegeng untuk menjualkan sepatunya ke pasar loak di Pasar Rumput, Manggarai. Namun, sampai siang itu, sepatunya tidak laku-laku. Selain ukurannya terlalu besar, sepatu yang dijual juga bukan sepatu dengan merek terkenal. Pedagang loak tentu ingin membeli sesuatu barang bekas apa pun jenisnya, asalkan bisa segera dijual kembali dengan harga yang mahal sehingga menguntungkannya.

Dharto pun terdorong untuk membantu Hoegeng. Setelah berbicara dengan Aco, Dharto mengambil inisiatif untuk ikut membantu menjualkan sepatunya tanpa setahu Hoegeng.

Dharto kemudian mencoba menghubungi sekretaris Menteri Negara Komisaris Besar (Pol.) Boegie Soepeno, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Totok Soesilo, seorang perwira polisi yang diperbantukan sebagai sekretaris menteri. Kebetulan, Dharto mengenalnya dengan dekat. Sebab, suatu kali bertemu, Totok yang memiliki perusahaan pengolah ulang karet dengan cara penggilingan (*remiling*) di Medan, pernah berpesan: jika ada kesulitan, berbicara saja padanya. Mungkin dia bisa membantunya.

Karena ingin menolong, Totok pun kemudian membeli sepatu Hoegeng dengan harga yang cukup mahal, yaitu seharga sepatu baru yang bermerek. Harga sepatunya yang dibeli waktu itu sekitar Rp 1.200. Nilai itu sebesar satu kali gaji Dharto selama sebulan! Namun, Totok mewanti-wanti Dharto agar tidak usah bilang kepada Hoegeng jika dia yang membelinya. Selain suka menolong, Totok juga ingin membantu Dharto, dan merasa satu korps dengan Hoegeng yang merupakan seniornya di Kepolisian.

Dengan membawa uang hasil penjualan sepatunya, Dharto pun berpesan kepada Aco agar tak usah memberitahukan siapa yang membantu menjualkan sepatunya itu. Pokoknya, kata Dharto kepada Aco, ada seseorang yang membeli sepatunya, tetapi bukan Dharto. Demikian pesannya kepada sang sopir. Dharto sama sekali tak menyebut identitas si pembeli sepatu Hoegeng itu.

Esoknya, Hoegeng datang ke kantor, dan langsung memeluk Dharto sambil menyampaikan terima kasih, "Terima kasih ya, Mas Dharto. Ampera... Ampera." Ampera merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sebuah slogan politik yang pada waktu itu kerap dipakai untuk memperjuangkan nasib rakyat yang hidupnya susah.

Cerita ini baru disampaikan Dharto pada keluarga Hoegeng pada tahun 2013, setelah Hoegeng meninggal dunia.

Kesederhanaan untuk menerima apa adanya dengan ucapan syukur juga diturunkan Hoegeng kepada anak-anaknya. Mereka juga diminta untuk hidup sederhana dan

tak bergantung pada orangtua atau orang lain. Meri ingat saat melahirkan anaknya yang kedua, Didit, ia diminta oleh Hoegeng untuk tidak meminta bantuan apa-apa kepada orangtuanya. Hoegeng bahkan menolak jika ada pemberian orangtuanya untuk keluarganya.

Marah Istrinya Dipengaruhi

Pada saat Hoegeng menjadi Wakil Menteri/Wapangak, yang berkantor di Markas Besar Kepolisian (Mabak) di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Dharto menjadi sekretaris Sudharmono, yang saat itu masih Sekab. Suatu saat, Dharto dimintai pertolongan Hoegeng untuk menghadap Menteri Setneg Ikhsan. Hoegeng ingin meminjam mobil dinas menteri yang sudah dikembalikannya karena jabatannya berganti. Sementara, mobil dinasnya sebagai Wakil Menteri/Wapangak belum ada.

Anjuran Ikhsan, Dharto diminta menghubungi Buang, pejabat yang berkantor di Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, Jakarta. Buang adalah salah seorang yang khusus mengurus kendaraan dinas para menteri. Dharto pun menyampaikan hal itu kepada Buang. Namun, menurut Buang, Hoegeng tidak usah meminjam, tetapi membeli saja mobil dinas menteri yang pernah dipakainya dengan harga yang murah, yaitu sekitar Rp 150.000. Sebab, mobil dinas menteri tersebut sudah ada yang mau membeli dengan harga tinggi, yaitu seharga Rp 630.000.

Bahkan, tambah Buang, ada calon pembeli yang bersedia lebih dulu membayarnya Rp 150.000, dan kemudian dipotong dari harga pembeliannya. "Sisa uangnya, silakan dibawa untuk Pak Hoegeng," tambah Buang, seraya berjanji akan membantu mengurusnya hingga penjualan mobil eks menteri tersebut.

Dharto kemudian menyampaikan tawaran yang akan menguntungkan Hoegeng tersebut. Namun, Hoegeng menolak meskipun dia akan mendapat keuntungan lumayan dari selisih mobil yang dibelinya dengan mobil yang akan dijualnya lewat lelang itu. Berkali-kali diyakinkan Dharto, Hoegeng tak berubah pikiran. "Mas Dharto, Hoegeng tidak mau beli mobil, Hoegeng hanya mau pinjam saja," ujarnya singkat.

Karena Hoegeng tak mau, Dharto pun berinisiatif menyampaikan tawaran itu kepada istrinya, Meri. Pertimbangan Dharto, jika istri Hoegeng bersedia dengan tawaran Buang, tentu hal itu akan menguntungkan keluarga Hoegeng. Sayang jika keluarga Hoegeng membuang kesempatan baik itu. Hanya dengan uang Rp 150.000, Hoegeng bisa mendapat keuntungan Rp 480.000. Sebuah jumlah yang tak sedikit pada waktu itu. Dharto juga berharap, tawaran yang akan disampaikan istri Hoegeng bisa lebih diterima oleh suaminya ketimbang tawaran orang lain dan Hoegeng pun mengubah sikapnya. Sebenarnya, Dharto sebatas membantu mantan atasannya, yang diketahuinya sosok yang sederhana. Dharto sendiri tidak memiliki kepentingan apa-apa.

Namun, esoknya, Dharto dipanggil. Bukannya mendapat pujian, Dharto malah dimarahi oleh Hoegeng. "Mas Dharto jangan begitu ya. Hoegeng tidak mau Mas Dharto mempengaruhi istri Hoegeng. Meri jangan dipengaruhi dengan apa pun, dan oleh siapa pun," pinta Hoegeng.

Itulah pengalaman berharga yang diperoleh Dharto dari Hoegeng. Dia memang tak pernah mau dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk istrinya meskipun hanya menyampaikan apa yang diusulkan Dharto. Namun, untuk hal-hal yang prinsipiil dalam kehidupannya, Hoegeng sangat memegangnya. ❖

Bab V

Kenangan Tugas Masa Lalu

Jadi Sasaran Penembak Jitu

Sekitar tahun 1956, Hoegeng dipanggil ke Jakarta oleh Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara (DPKN) Markas Besar Angkatan Kepolisian (Mabak) Oemar Chatab untuk menghadap Kepala Kepolisian Negara RS Soekanto di Jakarta terkait penugasan ke Medan, Sumatera Utara. Pada saat dipanggil itu, Hoegeng menjabat sebagai Kepala DPKN di Kepolisian Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, ia juga baru menjadi Wakil Kepala DPKN.

Tugas di DPKN merupakan penempatan pertama Hoegeng setelah menyelesaikan pendidikan kepolisiannya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta pada November 1952. Karier Hoegeng di kepolisian sebelumnya diawali saat mengikuti Kursus Kepolisian di Pekalongan di zaman pendudukan tentara Jepang dan selanjutnya di Sekolah Pendidikan Polisi (SPN) di Sukabumi, Jawa Barat.

Dalam bukunya, *Hoegeng, Polisi Idaman dan Kenyataan* (1993), Kursus Kepolisian diikuti Hoegeng sambil menunggu panggilan bekerja di Radio Hoso Kyoku, eks

Setelah lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan ditempatkan di Dinas Pengawasan Keamanan Negara, Hoegeng ditugaskan sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Kepolisian Provinsi Sumatera Utara di Medan. (Dok. Keluarga Hoegeng)

radio pemerintah Hindia Belanda yang diambil alih Jepang pada tahun 1942. Hoegeng kemudian diterima mengikuti Kursus Kepolisian tersebut. Lulus dari sana, Hoegeng ditempatkan di kantor Jawatan Kepolisian Keresidenan Pekalongan.

Pada saat itu, dibuka lowongan mengikuti pendidikan lanjutan untuk menjadi kader tinggi kepolisian di SPN Sukabumi. Hoegeng sebenarnya tak tertarik. Ia justru didaftarkan oleh Wakil Kepala Kepolisian Keresidenan Pekalongan, Komisaris Polisi Kelas 1 Soemarto untuk mengikuti pendidikan tersebut melalui tes seleksi. Meskipun tak sepenuh hati mengikuti seleksi, Hoegeng ternyata lulus. Memang sudah jalan hidupnya, apa pun alasannya, Tuhan sudah mengaturnya sebagai polisi.

Pada waktu itu, Hoegeng juga *ogah-ogahan* untuk meneruskan kariernya sebagai polisi karena disiplinnya yang dinilai sangat ketat. Apalagi, saat itu ia juga merasa kecewa karena sebagai lulusan *Aglemeene Middelbare School*/AMS atau setingkat sekolah menengah atas (SMA) dan *drop out* (tak lulus) Sekolah Tinggi Hukum (*Recht Hoge School*/RHS) di Batavia, pangkat Hoegeng setelah mengikuti Kursus Kepolisian tergolong rendah, yaitu dua tingkat di bawah Inspektur Polisi Kelas II atau bintara.

Sejak masuk sekolah dasar (SD) pada tahun 1927 atau *Hollandsch Inlandsche School*/HIS di Pemalang, Hoegeng sebenarnya juga tak pernah bercita-cita menjadi polisi. Dari HIS Pemalang, Hoegeng pindah ke HIS Pekalongan karena tugas ayahnya dipindah ke Pekalongan. Lulus dari HIS pada tahun 1934, Hoegeng masuk *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*/MULO atau setingkat sekolah menengah pertama (SMP) di Pekalongan. Kemudian dari MULO, Hoegeng meneruskan pendidikannya ke AMS di Yogyakarta pada tahun 1937, dan masuk ke RHS. Namun, pendidikannya ini tak selesai karena Jepang keburu masuk dan menjajah Hindia Belanda (Indonesia) pada tahun 1942. RHS dibekukan. Hoegeng kembali ke Pekalongan, dan sempat ikut-ikutan temannya menjadi pedagang.

Oleh sebab itu, saat diberitahu akan menjadi Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal (Ditserse dan Kriminal) Kantor Kepolisian Provinsi Sumatera Utara, Hoegeng menyambutnya dengan antusias. Sebab, bertugas di Medan pada saat itu tak mudah bagi seorang polisi muda yang

baru merintis karier. Waktu itu, Medan dikenal bukan sebagai wilayah kerja yang enteng. Terutama bagi polisi yang jujur dan tak mau kompromi, tetapi banyak yang menggiurkannya melanggar hukum.

Medan marak dengan berbagai kasus kejahatan. Mulai dari *smokel* (penyelundupan) berbagai barang masuk ke Indonesia maupun keluar negeri lewat pelabuhan dan perairan, hingga perjudian, perampokan, dan suap-menyuap dari kalangan pengusaha kepada aparat negara.

Penyelundupan dan perjudian diduga banyak di-*backing* oleh oknum-oknum aparat penegak hukum seperti polisi maupun tentara. Bahkan, ada penyelundupan senjata yang dilakukan oleh sekelompok oknum militer di Sumatera Utara yang kecewa dengan pusat. Mereka melakukan penyelundupan senjata untuk melawan pemerintah pusat dengan membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Tujuannya, melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ujian pertama sebagai polisi dihadapi saat Hoegeng bersama keluarganya tiba di Pelabuhan Belawan, Medan, setelah berlayar dari Jakarta. Masih dalam bukunya *Hoegeng, Polisi Idaman dan Kenyataan*, Hoegeng disambut oleh seorang pengusaha keturunan China bertubuh gemuk, yang mengaku sebagai ketua "Panitia Selamat Datang". Panitia tersebut khusus dibentuk oleh sejumlah pengusaha Medan untuk menyambut datangnya Hoegeng.

Pengusaha itu memberitahukan bahwa mereka sudah menyediakan rumah dan kendaraan untuk Hoegeng dan

keluarganya selama bertugas di Medan. Bahkan, saat ini, Hoegeng siap diantar ke sebuah hotel yang sudah disiapkan oleh panitia penyambutan. Namun, Hoegeng menolak secara halus dengan menyatakan supaya barang tersebut disimpan saja dulu. Demikian pula tawaran mengantarnya ke sebuah hotel. Kata Hoegeng, jika memang diperlukan, dia akan segera mengontaknya. Pengusaha itu kemudian menitipkan kartu nama.

Kepada Dharto, Hoegeng juga menceritakan tentang hal yang sama. Sebagai polisi, Hoegeng tetap bersikap profesional dan menjaga integritas. Setibanya di rumah dinasnya di Jalan A Rivai, Medan, Hoegeng mendapat kiriman sejumlah barang perabotan rumah tangga dari para pengusaha Medan. Barang-barang seperti mesin cuci, kulkas, mesin jahit, dan perabotan rumah tangga lainnya, sudah ada di dalam rumahnya. Jika Hoegeng mau menerimanya, Hoegeng dan Meri tak perlu lagi berbelanja perabotan rumah tangga lainnya. Apalagi, Hoegeng tak membawa semua barang perabotan dari Jakarta.

Awalnya, Hoegeng menolak secara halus agar si pengirim barang segera mengambilnya kembali barang-barang tersebut. Jika tidak diambil, Hoegeng akan mengeluarkannya dari rumah. Namun, si pengusaha itu tetap bersikeras tak mau mengambilnya. Hoegeng pun mengancam akan mengeluarkannya. Karena tak diambil juga, akhirnya Hoegeng mengeluarkan sendiri barang-barang tersebut. Barang-barang tersebut diletakkannya begitu saja di depan rumahnya.

Berhari-hari barang-barang tersebut tak ada yang mengambil hingga akhirnya rusak terkena hujan dan panas matahari. Hoegeng dan istrinya benar-benar membuat barang-barang tersebut menjadi tak bernilai.

Karena tak mau kompromi, Hoegeng juga tak jarang menghadapi ancaman pembunuhan. Salah satunya, saat Hoegeng dijadikan sasaran penembak jitu (*sniper*) ketika bertugas di kawasan pinggiran hutan di Kota Medan. Namun, Hoegeng tak menceritakan dalam kasus apa dia dijadikan sasaran tembak. Hoegeng juga tak menceritakan siapa pelaku penembakan tersebut.

"Hoegeng memang pernah ditembaki *sniper*. Untungnya, tak ada yang mengenai sasaran. Rupanya, Hoegeng dijadikan sasaran tembak karena Hoegeng tak pernah mau kompromi," ujarnya. Hoegeng memang lolos dari maut, tetapi pelaku penembakan juga tak berhasil ditangkap karena melarikan diri.

Hoegeng memang sering keluar masuk daerah di Medan untuk menyergap pelaku perjudian dan penyelundupan. Tak jarang, dalam penyergapan tersebut, ada oknum polisi ataupun tentara yang tertangkap menjadi *backing*. Bahkan, ada yang terluka karena melarikan diri dan jatuh saat menghindari penyergapan.

Menurut Hoegeng, kalau ada aparat penegak hukum yang bertugas di Medan, dan tak mau kongkalikong dengan para pengusaha hitam, biasanya penugasannya memang tak mulus. Bahkan, tugasnya bisa jadi tak akan berlangsung lama. Hoegeng sendiri pernah dipanggil ke Jakarta. Ia

diminta untuk menjelaskan kasus-kasus penyelundupan yang kerap ditanganinya.

Memang, pada akhirnya, Hoegeng ditarik kembali ke Jakarta pada tahun tahun 1960. Namun, sebelum ditarik ke Jakarta, Hoegeng sempat mengikuti pendidikan Brigade Mobil (Brimob) di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Oktober 1959. Hoegeng menyatakan bangga sepulangnya bertugas di Medan. Sebab, semuanya bisa dilakukan sesuai aturan dan prinsip hidupnya yang sederhana, jujur, dan tegas; meskipun berisiko dengan keselamatan jiwanya.

Menurut Didit, selesai diberhentikan sebagai Kapolri, ayahnya juga pernah mendapat ancaman pembunuhan. Kemudian, Kapolri yang waktu itu dijabat oleh Anton Soedjarwo berinisiatif melakukan pengawalan terhadap Hoegeng. Namun, ayahnya menolak. Polri tetap memaksa karena ancaman tersebut disebutkan nyata dan sewaktu-waktu bisa terjadi. Hoegeng akhirnya mengizinkan. Namun, ia berpesan agar pengawalan tidak mencolok dan membatasi kesehariannya dan keluarga.

Tak lama setelah itu, di dekat rumah Hoegeng di Jalan Madura, tiba-tiba ada warung rokok. Hoegeng pun mengeceknya. "Saat datang ke depan warung, Papi malah diberi hormat. Ternyata, penjaga warung adalah intel-intel Polri yang memang diminta bertugas untuk menjaga Papi. Namun, Papi keberatan, dan meminta mereka untuk pergi," ungkap Didit.

Lontang-lantung di Jakarta

Sepulang bertugas di Kota Medan, Sumatera Utara, pada 1960, Hoegeng sempat lontang-lantung alias tak punya pekerjaan di Jakarta. Sebab, untuk beberapa saat, dia menganggur dan tak diberikan pekerjaan apalagi jabatan. Padahal, sebelum berangkat ke Medan, Hoegeng adalah Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara (DPKN), salah satu bagian di Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang sehari-hari menjalankan tugas intelijen untuk pengamanan kondisi wilayah dari ancaman komunisme waktu itu.

Meskipun lontang-lantung, pria tinggi kurus kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, 14 Oktober 1921 tersebut tetap menjalani hari-harinya dengan santai. Baginya, jabatan tak perlu dicari, tetapi akan datang sesuai dengan rencana Tuhan.

Saat menunggu penempatan yang baru di Jakarta, Hoegeng sempat mendengar akan dijadikan Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Komisariat Daerah Kepolisian (Kadit Reskrim Komdak) Metro Jakarta Raya. Namun, informasi tersebut tak ada realisasinya meskipun sempat beberapa kali latihan mengikuti upacara serah terima jabatan Kadit Reskrim Komdak tersebut.

Jabatan tersebut pada akhirnya memang tak pernah diberikan kepada Hoegeng. Dari bukunya; *Hoegeng, Polisi Idaman dan Kenyataan*, Hoegeng baru tahu kalau dia dipulangkan dari Medan ketika tengah terjadi perpecahan

Sempat lontang-lantung sepulangnya dari Medan, Hoegeng kemudian diangkat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi pada tahun 1960. Hoegeng saat serah terima jabatan di Jawatan Imigrasi. (Dok. Keluarga Hoegeng)

di tubuh Polri. Sekarang, kabar untuk menjadi Kadit Reskrim Komdak Metro Jaya pun tentu sulit terwujud.

Sebagai pengangguran, Hoegeng banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama keluarga, bermain musik, atau melukis dan berjalan-jalan dengan sepeda ontelnya di sekitar rumahnya di kawasan Menteng. Suatu pagi, saat berjalan-jalan, tak sengaja Hoegeng bertemu dengan Menteri Koordinator Keamanan Nasional/Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal AH Nasution, yang memang sudah dikenal sejak masa perjuangan. "Apa pekerjaanmu sekarang, Geng?" tanya Nasution. Jawab Hoegeng, "Ya, *policeman* (seorang polisi) pak, tetapi sekarang lontang-lantung, belum ada *job*."

Nasution tentu terkejut. Setelah itu, tampaknya Nasution melapor kepada Presiden Soekarno sehingga Hoegeng kemudian diusulkan menjadi Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia. Hoegeng kemudian dipanggilnya ke kantor Nasution di Jalan Merdeka Barat. Hoegeng ditawari jabatan baru di luar bidangnya sebagai polisi. Saat diberitahu apakah Hoegeng bersedia menjadi Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia, Hoegeng mengangguk, "Hoegeng siap ditempatkan di mana saja."

Secara resmi, Hoegeng kemudian diangkat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia pada tanggal 19 Januari 1961. Saat memimpin rapat pertama di Jawatan Imigrasi, Nasution ikut hadir. Dalam rapat tersebut, Nasution berharap Hoegeng membawa perubahan dalam organisasi dan manajemen. Tugas utama pelayanan kepada masyarakat diutamakan. Dalam periode kepemimpinan Hoegeng, Jawatan Imigrasi tak lagi banyak diintervensi oleh pihak-pihak lain. Bahkan, campur tangan dari lembaga lain berhasil diminimalisasi oleh Hoegeng.

Cukup lama Hoegeng mengemban jabatan sebagai Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia yang berkantor di Teuku Umar, Jakarta Pusat. Pada bulan Juni 1965, Hoegeng menyatakan mundur sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Dia kemudian digantikan oleh Widigda Sudigman, Wakil Kepala Jawatan Imigrasi.

Dituduh Anti-China

Jabatan sebagai Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia merupakan karier pertama Hoegeng di luar korpsnya sebagai seorang polisi. Hoegeng tergolong pejabat yang cukup lama memimpin Jawatan Imigrasi Indonesia. Sejak diangkat pada tanggal 19 Januari 1961, Hoegeng baru mengakhiri jabatannya pada sekitar awal Juni 1965.

"Kemudian saya ketahui bahwa di tubuh Jawatan Imigrasi diperlukan kepemimpinan yang tegas. Kantor Imigrasi saat itu tampaknya tidak dikuasai oleh orang Imigrasi sendiri. Yang berkuasa justru orang-orang non-Imigrasi, di antaranya bagian intel TNI Angkatan Darat atau DPKN Kepolisian, Corps Polisi Militer, dan Kejaksaan Agung. Orang-orang Imigrasinya hanya berfungsi sebagai juru tulis dan tukang cap belaka," tulis Hoegeng di bukunya, *Hoegeng, Polisi Idaman dan Kenyataan*. Ketegasannya saat bertugas sebagai Ditreskrim Komisariat Polisi Medan, menjadi pertimbangan pengangkatan Hoegeng sebagai Kepala Jawatan Imigrasi.

Tantangan sebagai Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia saat itu cukup berat. Nasution mengatakan, sebagai Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia, Hoegeng harus melancarkan prosedur dan mekanisme kerja di Jawatan Imigrasi tersebut. Juga mempercepat proses pengurusan *exit permit*, paspor dan layanan imigrasi, serta mengembalikan kewibawaan Jawatan Imigrasi.

Suatu kali, sebagai Kepala Jawatan Imigrasi, Hoegeng dipanggil mendadak oleh Presiden Soekarno ke Istana Negara. Menurut Soekarno, berdasarkan laporan dari Menteri Negara Oei Tjoe Tat, Hoegeng disebut-sebut bersikap diskriminatif dan anti-China.

Hoegeng sempat terkejut atas tudingan tersebut. Ia kemudian menanyakan kepada Presiden dari mana tuduhan tersebut berasal. Setelah Presiden menjelaskan asal-usul tuduhan tersebut, Hoegeng lalu menjelaskan. "Hoegeng tak pernah anti-China," tandasnya.

Menurut Hoegeng, pada saat itu banyak sekali imigran gelap dari Indo China yang masuk ke Indonesia sebagai pengungsi. Mereka datang dengan kapal-kapal layar dari perairan Indochina menuju Indonesia. Padahal, Indonesia saat itu negara yang tengah menghadapi berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Akibatnya, pemerintah tidak cukup memiliki dana untuk menanggung kehidupan mereka di pengungsian. Memberi makan kepada rakyatnya sendiri saja sulit pada waktu itu, apalagi memberi makan bangsa asing, pikir Hoegeng.

"Oleh sebab itu, pada saat kapal mereka masuk ke wilayah Indonesia, Hoegeng pun segera *menggusah* (mengusir)-nya kembali ke lautan bebas. Hoegeng mengantar kapal mereka sampai ke luar perbatasan Indonesia agar bisa menuju negara lain. Apakah itu berarti Hoegeng anti-China?" tanya Hoegeng lagi kepada Presiden Soekarno.

Presiden pun akhirnya yakin dengan penjelasan Hoegeng. Ia kemudian tak lagi dituduh anti-China. Hoegeng meninggalkan Istana dengan hati lapang, dan tak membenci Oei Tjoe Tat yang salah mendapatkan informasi tentang kebijakannya sebagai Kepala Jawatan Imigrasi terhadap imigran gelap.

Buku Kecil Sang Menteri

Pada tanggal 27 Agustus 1964, Hoegeng dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Iuran Negara. Hoegeng menjadi salah satu dari anggota kabinet yang waktu itu populer disebut dengan Kabinet Dwikora. Sebagai Menteri Iuran Negara, Hoegeng berada dalam kompartemen Kementerian Keuangan.

Sebelum dilantik di Istana Negara, Hoegeng dan Meri dipanggil Presiden Soekarno ke Istana Bogor, Jawa Barat, untuk mendengarkan pengangkatannya sebagai menteri. Tak lama setelah dipanggil Presiden, Hoegeng juga dipanggil oleh Sultan Hamengku Buwono IX di kantornya di Jalan Prapatan. Dari pertemuan dengan Sultan, Hoegeng baru tahu kalau usulan sebagai Menteri Iuran Negara berasal dari Sultan Hamengku Buwono.

Di bukunya, *Hoegeng, Polisi Idaman dan Kenyataan,* Hoegeng sebelumnya mendapat telepon dari salah seorang staf Sultan Hamengku Buwono. Sultan pada waktu itu menjabat Menteri Koordinator Pembangunan. Hoegeng pun kemudian datang ke kantornya. Sultan sebelumnya

Pada tanggal 27 Agustus 1964, Hoegeng dilantik menjadi Menteri Iuran Negara, dan pada 24 Februari 1966, Hoegeng diangkat kembali. (Dok. Keluarga Hoegeng)

sudah dikenal Hoegeng sebagai Raja Yogyakarta yang dermawan. Hoegeng pernah mendapat kiriman uang sebanyak 12,50 gulden sebagai gaji para polisi yang bertugas di Yogyakarta. Saat itu, memasuki Agresi Belanda yang kedua, pemerintahan Indonesia tengah kocar-kacir setelah Presiden Soekarno ditangkap.

Penunjukannya sebagai Menteri Iuran Negara diyakini Hoegeng karena komitmen yang selama ini dia tunjukkan, tak hanya kejujuran, kesederhanaan, juga ketegasannya selama menjadi Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal di Polda Sumut dan mengurusi Jawatan Imigrasi. Dari bidang tugasnya sebagai Menteri Iuran Negara, Hoegeng pun bertugas mengelola semua iuran atau pendapatan negara yang berasal dari pajak, bea dan cukai, serta *landrente* atau hasil dari penyewaan tanah.

Ketiga komponen penerimaan negara itu masing-masing ditangani oleh satu direktur jenderal (Ditjen), yang masing-masing dinamakan Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, dan Ditjen *Landrente*. Hoegeng berkantor di lingkungan Kementerian Keuangan di dekat Lapangan Banteng.

Pengalaman Hoegeng saat menjadi Kepala Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Sumatera Utara dan Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia, yang menangani banyak kasus penyelundupan barang dan manusia, akhirnya membawa Hoegeng menjadi Menteri Iuran Negara. Sebagai menteri, Hoegeng harus mencegah terjadinya penyelundupan barang yang merugikan keuangan negara. Setelah menjadi

Menteri Iuran Negara dalam Kabinet Dwikora I, Hoegeng diangkat kembali sebagai Menteri Urusan Iuran Negara dalam Kabinet Dwikora II masa kerja tanggal 24 Februari 1966 hingga tanggal 28 Maret 1966.

Karena jabatannya itu, dengan nada bercanda, sepupu Hoegeng, Moehirman, yang tinggal di sebelah rumah Dharto, selalu mengatakan Hoegeng sekarang tak lagi membawa buku besar untuk mencatat seluruh kegiatannya dan siapa-siapa saja yang ditemui dan menemuinya, tetapi sebaliknya justru membawa buku kecil. Buku kecil tersebut untuk mencatat setiap iuran atau pendapatan ke kas negara.

Namun Hoegeng tak mau kalah. Dengan berkelakar juga, Hoegeng membalas menjawab, "*Wong* Hoegeng ini bukan Menteri Iuran Negara, tetapi Menteri Sayuran Negara hehehe... Jadi, Hoegeng tetap membawa buku besar."

Sebagai Menteri Iuran Negara, Hoegeng juga tak mau mengumpulkan harta kekayaan bagi keluarganya. Padahal, jika ia mau, di tengah situasi negara yang morat-marit, Hoegeng bisa memanfaatkannya dengan cara menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingannya sendiri. Sikapnya itu membuat kehidupan sehari-hari Hoegeng dan keluarganya tetap bersahaja.

Hingga menjadi Kapolri, Hoegeng tak memiliki kekayaan apa-apa—apalagi rekening di bank—kecuali sebuah kebanggaan bahwa bisa menjaga integritasnya sebagai polisi yang sederhana dan jujur. Menurut Didit, praktis kehidupan ekonomi keluarga hanya ditopang dari gaji ayahnya sebulan dan tunjangannya sebagai menteri atau Kapolri. "Meskipun

Papi pernah menjadi menteri dan Kapolri, kami hidup dalam ekonomi yang pas-pasan. Bahkan, adakalanya kekurangan. Kami hanya punya rumah, itu pun masih disewa dengan membayar uang bulanan," paparnya.

Uang pensiunan Hoegeng, sejak berhenti sebagai Kapolri hingga pada tahun 2001, hanya Rp 10.000 per bulan. "Namun, Papi hanya menerima Rp 7.500 setiap bulannya karena potongan ini itu. Baru pada tahun 2001, ada perubahan surat keputusan pensiun sehingga pensiun Papi naik menjadi Rp 1.170.000 per bulan. Tetapi, setelah Papi meninggal pada tahun 2004, Mami hanya menerima separuhnya karena Mami pensiunan janda Kapolri," tambah Didit.

Seorang pencuri yang pernah meloncat dari tembok belakang rumahnya di Jalan Madura, Menteng, pernah terkecoh. Mungkin sebagai mantan menteri, yang kini menjadi Kapolri, ia mengira Hoegeng memiliki banyak harta. Tetapi, ternyata tak ada sama sekali.

"Pencuri hanya berhasil membawa baju seragam Kapolri Papi yang baru dijemur. Waktu itu, (di) baju seragam Papi masih menempel tanda-tanda kepangkatannya, yang baru selesai dibraso oleh Pak Pardi, staf ajudan Papi," kata Didit.

Namun, saat dilaporkan adanya pencurian itu, Hoegeng bukannya marah. Dia malah tertawa terpingkal-pingkal, sembari berujar, "Mungkin dikiranya baju itu penuh emas ya, padahal itu cuma logam yang tiap hari digosok."

Buku Besar yang Menyelamatkan

Dalam bekerja, Hoegeng tak pernah lepas menulis apa pun yang dikerjakannya di sebuah buku yang disebutnya buku besar. Buku tersebut sebenarnya buku catatan harian biasa yang ditulisnya setelah melakukan pekerjaan dan bertemu dengan siapa pun. Disebut buku besar, karena buku yang digunakan adalah buku besar yang biasa dipakai untuk pembukuan atau neraca.

Di buku tersebut, Hoegeng selalu menuliskan secara rapi dan berurutan setiap tamu yang datang menemuinya. Mulai dari nomor tamu, tanggal, nama tamu, maksud kedatangan, hingga isi pembicaraan. Boleh dibilang, buku tersebut juga dijadikan semacam buku harian bagi Hoegeng.

Suatu saat, Dharto menanyakan mengapa Hoegeng selalu mengisi dalam buku tersebut tamu-tamu yang datang menemuinya dan maksud kedatangannya. Hoegeng menjawab, "Buku besar itu pernah menolong Hoegeng."

"Hoegeng pernah dipanggil *oude heer* (Bahasa Belanda, yang berarti yang dituakan atau sepuh) ke Istana," tutur Hoegeng, mengawali ceritanya kepada Dharto selepas jam kantor. Dharto sempat bertanya apa yang dimaksud dengan *oude heer*. Hoegeng kemudian menjawab, "Itu, si *embahe* (kakek)." Si *embahe* ternyata adalah julukan yang dipakai Hoegeng untuk menyebut Presiden Soekarno yang dihormatinya.

Presiden kemudian bertanya, "Geng, katanya kamu akan ikut mendongkel Menteri/Pangak Jenderal

(Pol.) Soetjipto Joedodihardjo, ya?" Hoegeng terkejut dan lantas bertanya, "Siapa yang bilang?'" Presiden menyebut satu nama. Hoegeng lalu minta agar dirinya dikonfrontasi dengan orang tersebut. Presiden setuju dan menjadwalkan pertemuan dengan yang bersangkutan untuk mengkonfrotasi tuduhan tersebut.

Lalu, saat dikonfrontasi dengan orang tersebut, Hoegeng tak lupa membawa buku besar tersebut. Di hadapan Presiden, Hoegeng membenarkan bahwa dirinya memang didatangi oleh yang bersangkutan di kantor dan di rumahnya. Lalu, secara rinci, Hoegeng menyebutkan tanggal dan pertemuannya, serta detail isi pembicaraanya. Hoegeng juga membeberkan jawabannya setelah diajak yang bersangkutan untuk menggulingkan Menteri/Pangak Jenderal (Pol.) Soetjipto.

"Dalam pertemuan itu, Hoegeng memang diajak untuk ikut menggulingkan Menpangak. Namun, di catatan buku ini, Hoegeng menyatakan tidak bersedia ikut mendongkel Menteri/Pangak. Selama Pak Tjipto adalah atasan Hoegeng, Hoegeng tidak mau mendongkelnya, apa pun alasannya. Jadi, jangan memutarbalikkan fakta begitu mas. *Wong sampeyan* sendiri yang mengajak Hoegeng untuk mendongkel Pak Tjipto, mengapa Hoegeng yang kemudian dituduh?" jelas Hoegeng, sambil membacakan dan menunjukkan catatan di buku besarnya kepada Presiden dan orang yang bersangkutan.

Di catatan buku tersebut, Hoegeng menunjukkan orang tersebut datang dua kali ke kantor dan ke rumahnya saat

mengajak Hoegeng ikut menggulingkan Soetjipto. Namun, Hoegeng tetap tak bisa dibujuk untuk merebut jabatan orang lain tanpa hak dan mengorbankan orang lain.

Akhirnya, Presiden bertanya kepada yang bersangkutan, "Apakah yang diceritakan Hoegeng itu benar?" Polisi itu menjawab, "*Inggih Kasinggian* (ya, betul)." Hoegeng kemudian meminta yang bersangkutan untuk tidak lagi memutar-balikkan fakta.

Presiden Soekarno kemudian menegurnya, dan menganggap persolannya selesai. Dengan alasan tak mau mempermalukan pihak lain, Dharto sengaja tak mau menyebutkan siapa orang yang dimaksud Hoegeng yang telah mencoba memfitnahnya lewat Presiden Soekarno itu.

Buku besar juga diceritakan kepada anak-anaknya. Namun, buku yang harus diisi setiap hari itu tak hanya peristiwa yang baik-baik saja, tetapi juga harus mencatat peristiwa buruk atau tidak enak yang dialaminya. "Dengan demikian, kita bisa belajar dan memahami apa yang sudah kita lakukan dan kerjakan setiap saat. Itu ajaran Papi," kata Didit.

Menurut Didit, buku besar yang tiap saat ditulis ayahnya tersebut, tak bisa diselamatkan. Buku-buku tersebut, sayangnya, kehujanan dan akhirnya rusak saat Hoegeng pindah rumah dari Jalan Madura, Menteng, menuju rumahnya di Depok, Jawa Barat. ❖

Bab VI

Pegangan Hidup

Memilih Kebenaran daripada *Kebeneran*

Dalam hidupnya sehari-hari, Hoegeng memiliki keyakinan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang hakiki dalam kehidupan sehari-hari manusia, apabila dibandingkan dengan sesuatu yang *kebeneran* (bahasa Jawa yang berarti kebetulan). Kebenaran merupakan sesuatu yang mutlak tentang sebuah kebaikan atau kebenaran itu sendiri. Adapun *kebeneran* merupakan sesuatu yang sifatnya situasional atau sesaat, mengandung suatu ketidaksengajaan, yang belum tentu sebuah kebenaran.

Namun, dalam berbagai hal, di tengah zaman yang semakin tanpa kepastian, adakalanya orang mendapat sesuatu *kebeneran* daripada sebuah kebenaran itu sendiri. Sebab, *kebeneran* itu sesuatu yang adakalanya juga memang tak perlu dicapai dengan kerja keras dan usaha sungguh-sungguh. Misalnya, suatu saat mendapat keberuntungan

seperti hadiah atau kode buntut. Jelas, hal itu adalah suatu *kebeneran*, dan bukan kebenaran.

Saat bercerita bertemu dengan Menteri Koordinator Keamanan Nasional/Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal AH Nasution di pinggir jalan Menteng, Hoegeng menganggap peristiwa tersebut dapat dimaknai termasuk salah satu *kebeneran* atau kebetulan. Sebab, pada waktu itu, Hoegeng masih *luntang-lantung* dan belum diberi jabatan sepulangnya dari tugas sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Kepolisian di Sumatera Utara, Medan. Namun, sebenarnya hal itu merupakan *kebeneran* yang sudah menjadi kehendak Tuhan.

Memang, setelah pertemuannya tanpa sengaja dengan Nasution itu, Hoegeng akhirnya diangkat menjadi Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia, dan selanjutnya menjadi Menteri Iuran Negara. Sejak itu, jalan hidup Hoegeng terus terbuka lebar. Jabatan-jabatan lainnya menunggu. Mulai dari Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Wakil Menteri/ Menpangak, dan akhirnya mencapai jabatan tertinggi yang dicita-citakan semua anggota polisi, yaitu menjadi Menteri/ Pangak atau Kepala Kepolisian Negara RI.

"Meski demikian Mas Dharto, janganlah menjadi orang yang selalu *kebeneran* atau kebetulan, tetapi jadilah orang yang benar. Karena, selain *kebeneran* itu hanya sesaat, juga adakalanya berdampak negatif di kemudian hari bagi orang tersebut. *Kebeneran* itu belum tentu sebuah kebenaran," jelas Hoegeng.

Bayar Rumah dengan Wesel

Suatu ketika, setelah dilantik menjadi Menteri/Pangak (Kapolri), Hoegeng ingin bertemu dengan Dharto, yang saat itu masih bertugas di lingkungan Setneg. Setelah mengontak, Dharto pun datang ke rumah Hoegeng. Ketika datang ke rumah di Jalan Madura, Hoegeng mengatakan bahwa rumah yang ditempatinya sekarang itu bukan rumah miliknya sendiri, tetapi rumah sewaan.

Sejak sebelum menjadi Kapolri, Hoegeng memang pernah menegaskan menolak jika ditawari tinggal di rumah dinas Kapolri di Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, dekat dengan Mabak. "Wah, Hoegeng tidak mau nanti jika sudah pensiun, Hoegeng tidak punya rumah tinggal lagi. Jadi, Hoegeng tetap akan tinggal di rumah sewaan sendiri saja," tutur Hoegeng suatu kali saat Dharto berkunjung ke rumah Hoegeng. Waktu itu, Dharto menanyakan kemungkinan Hoegeng tinggal di rumah dinas saat diangkat menjadi Kapolri.

Menurut Hoegeng, sejak tinggal di rumah tersebut, urusan sewa-menyewa sebenarnya berjalan lancar, termasuk waktu Hoegeng menjadi Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet. Artinya, pembayaran sewanya tak pernah menunggak, dan pemilik rumahnya juga tak pernah mengeluh kepada Hoegeng.

Namun, ketika Hoegeng menjadi Kapolri, si pemilik rumah tak mau lagi menerima pembayaran uang sewa rumahnya. Setiap kali utusan Hoegeng membayar uang

sewa rumahnya, si pemilik pasti mengembalikannya kembali. "Hoegeng jadi bingung, Mas Dharto," ujar Hoegeng. Dengan spontan, sambil berkelakar, Dharto langsung menjawab," Ya, kebetulan *toh* pak. Pak Hoegeng tidak usah bayar saja."

Hoegeng langsung menyergah, dengan muka yang serius, "Eeh, jangan begitu *dong* Mas Dharto. Itu, tidak Hoegeng sukai. Bagaimana kalau suatu saat, dia meminta tolong Hoegeng karena ada masalah. Dan, minta Hoegeng membantu menyelesaikan karena Hoegeng seorang Kapolri. Padahal, masalah itu bertentangan dan menyimpang dari tugas pokok Hoegeng sebagai polisi. Hoegeng bakal mengalami kesulitan, dan tak bisa menolak. Itu, yang tidak boleh Mas Dharto."

Hoegeng kembali menujukkan sikap profesionalisme dan integritasnya sebagai seorang polisi, yang memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolri. Dharto yang tersipu malu dengan omongan Hoegeng, kemudian menyarankan Hoegeng agar uang sewa rumah dibayarkan lewat pos wesel, dengan alamat yang jelas. Dengan pos wesel, jika alamat si penerimanya jelas, maka hal itu sulit dikembalikan lagi, kecuali dengan alasan alamat tak dapat diketahui lagi atau tak diterima karena pindah rumah. Surat wesel itu diuangkan kembali atau tidak, itu terserah si penerimanya. Namun, yang jelas, Hoegeng tetap menerima bukti pembayaran sewa rumah lewat pos wesel tersebut. Hoegeng senang dengan usulan Dharto, dan mengucapkan

terima kasih. "Ide yang bagus Mas Dharto, terima kasih," tandas Hoegeng.

Beberapa bulan kemudian, saat tengah bekerja di Setneg, Dharto didatangi oleh seseorang yang mengaku utusan Gubernur DKI Jakarta, Bang Ali. Menurut utusan tersebut, Bang Ali ingin mengetahui status dari rumah yang kini ditempati oleh Hoegeng dan keluarganya. Dharto pun menceritakan sesuai dengan apa yang pernah diceritakan oleh Hoegeng pada waktu memanggil Dharto ke rumahnya terkait sewa-menyewa rumah tersebut.

Belakangan, setelah Hoegeng berhenti dari Kapolri, Dharto mendapat kabar bahwa Hoegeng mendapat hadiah rumah dari Kapolri Mohammad Hasan yang menggantikannya. Rumah yang dihadiahi kepada Hoegeng adalah rumah sewaan di Jalan Madura, yang selama ini disewa oleh Hoegeng bersama keluarganya.

Didit juga ingat saat ayahnya menjadi Kapolri. Waktu itu, Hoegeng berhak mendapat tanah kavling seluas 2.000 meter persegi di Komplek Polri Ragunan. Namun, kavling tersebut ditolak Hoegeng dan ia tetap memilih tinggal di rumah miliknya yang disewa itu.

Sebenarnya, saat menjadi Menteri Iuran Negara, Hoegeng berhak tinggal di rumah dinas menteri. Didit dan kakaknya, Reni, sudah senang saat mendengar ayahnya menjadi menteri. Apalagi saat ayahnya ditawari tinggal di rumah dinas. Mereka berharap ayahnya mau menerimanya. "Selain fasilitasnya sudah lengkap tersedia, siapa yang tak

bangga tinggal di rumah dinas menteri," pikir Didit. Namun, ternyata Hoegeng juga menolaknya.

Alasan Hoegeng, ekonomi negara lagi morat-marit. "Papi ini Menteri Iuran Negara, yang tugasnya mengumpulkan semua pendapatan Negara dari pajak, bea dan cukai, dan penyewaan tanah, masak Papi dan keluarga malah memboroskan keuangan negara. Tidak usah ikut-ikutan menteri lainnya. Kalau kita tinggal di rumah dinas, kita malah ikut-ikutan mengeluarkan banyak anggaran negara. Kita tetap tinggal di rumah sendiri saja," jelas Hoegeng.

Anak-anaknya pun mengerti, meski berpikir, lantas apakah kelebihannya sebagai anak menteri. Didit merasa, sebagai anak menteri dan kapolri, mereka tak pernah merasakan apa yang disebut fasilitas negara, kecuali mobil dinas saja.

Tolak "Katebelece" Anaknya

Selain sayang kepada anak-anaknya, Hoegeng juga memiliki sikap tegas. Di balik ketegasan sikapnya, Hoegeng juga mengajarkan mereka hidup sederhana, mandiri dan bertanggung jawab. Meskipun Hoegeng seorang pejabat negara, dia tak ingin anak-anaknya hidup manja dan menggantungkan diri pada jabatan ayahnya.

Sejak duduk di bangku SMP hingga SMA, anak-anaknya tak pernah mendapatkan uang jajan. Bahkan, mereka sama sekali tak pernah merasakan perayaan ulang tahun dalam

Hoegeng dikaruniai tiga anak, yaitu Sri Pamujining Rahayu (anak ketiga), Aditya Soetanto Hoegeng (anak kedua), Reni Soerjanti (anak pertama). (Dok. Keluarga Hoegeng)

keluarga. Itulah kesederhanaan yang diterapkan Hoegeng bersama Meri.

Untuk mengajarkan kemandirian dan kerja keras, Hoegeng justru mengajarkan anak-anaknya berjualan. Tujuannya, bukan hanya agar anaknya memiliki uang, tetapi juga untuk mengajarkan bagaimana mereka berusaha mencari uang dan menggunakannya dengan baik dan terencana.

"Mas Dharto, Hoegeng izinkan anak-anak Hoegeng berjualan koran atau kue agar mereka tahu bagaimana mendapatkan uang dan menggunakannya dengan baik. Jadi, mereka harus bekerja dulu sebelum memiliki uang. Tak bekerja, ya, tidak ada uang," tandas Hoegeng.

Sikap Hoegeng tak hanya mengejutkan Dharto, tetapi juga rekan Dharto di Setneg. Pernah Dharto menceritakan hal itu kepada rekannya saat pulang kantor. Rekannya terkejut. "Wah, kalau saya tak akan mengizinkan. Pak Hoegeng kan, seorang pejabat. *Kok* mau mengizinkan anak-anaknya jualan?" kata rekan Dharto itu.

Namun, bagi Didit, didikan ayahnya sebuah pengajaran yang benar. Dampaknya dirasakan Didit sekarang ini. Profesionalisme dan integritasnya selalu dicontohkan dalam tugas sehari-harinya. "Banyak hal yang bisa dirasakan sekarang. Selain kerja keras, tak gampang putus asa, juga tak membiasakan menggantungkan diri pada orang lain," ujar Didit, yang menjual koran *Berita Minggu* setiap malam Minggu, sejak SMP hingga SMA.

Demikian pula kakaknya, Reni. Dia juga juga harus berjualan kue-kue seperti lemper dan lainnya di sekolahnya di Cikini. Kue tersebut dibuatnya bersama ibunya, Meri.

Didikan Hoegeng soal kemandirian juga diingat oleh Didit. Selesai lulus SMA, Didit pernah ingin menjadi taruna Angkatan Udara di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Tanpa setahu ayahnya, Didit pun melamar. Waktu itu, pendaftarannya di Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau) V di Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah melewati semua persyaratan dan seleksi, Didit lulus. Namun, menjelang keberangkatan ke Magelang, Jawa Tengah, dia harus melewati seleksi terakhir. Salah satu syaratnya, Didit harus punya surat izin orangtua. Alasannya, Didit anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga.

Mau tak mau, Didit akhirnya harus memberitahu orang-tuanya. Hari itu juga, setelah menelpon ajudan ayahnya di kantor, Kadar Mulyono, Didit diizinkan bertemu. Dia berharap hari itu juga urusan surat izin bisa diterimanya sehingga esok dia bisa langsung ke Kodau lagi. Namun, ajudan menyatakan waktu ketemu nanti setelah ayahnya selesai bertemu dengan semua tamunya.

Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya Didit dipanggil. Sebagai anak kepada ayahnya, Didit mengira dia akan disambut dengan ramah dan akrab seperti halnya jika di rumah. Namun, ternyata tidak. Ayahnya justru terlihat menunjukkan wajah yang tak suka karena kedatangan anggota keluarganya dalam jam kerja.

Saat di pintu masuk ruang kerja, ayahnya langsung bertanya, "Ada perlu apa ke sini?" Dengan rasa takut, Didit langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Hoegeng hanya menjawab, "Ya sudah, nanti saja." Didit pun keluar, dan pulang.

Di rumah, dia menunggu ayahnya memanggil dan membicarakan surat izin tersebut. Namun, hingga esok hari, ayahnya tak memanggilnya juga. Didit sendiri tak berani langsung menanyakannya meskipun sehari-hari mereka akrab jika di rumah. Padahal, Didit khawatir waktu penyerahan surat izin itu terlambat dan dia gagal menjadi taruna.

Tiga hari kemudian, ajudan ayahnya menyampaikan pesan agar Didit datang ke kantor ayahnya siang itu. Didit mengira ayahnya akan langsung memberikan surat

izin yang sudah ditunggu-tunggunya itu. Namun, sampai di ruang kerja ayahnya, ternyata tidak. Hoegeng justru bertanya, "Tidak menjadi polisi kan? Biar bapakmu saja yang menjadi polisi. Hanya ada satu Hoegeng di Kepolisian. Tak boleh ada dua Hoegeng di Kepolisian." Hoegeng juga tak mau Didit masuk Angkatan Darat.

Didit menjawab bahwa dia mendaftarkan diri sebagai taruna Angkatan Udara. Namun, karena dia satu-satunya anak laki di keluarga, maka Didit harus punya surat izin dari orangtua. Setelah mendengarkan penjelasan, Hoegeng malah menjawab, "Tanya ke sana dulu (tempat pendaftaran)." Didit segera ke Kodau. Ternyata, sampai di sana, pendaftarannya sudah ditutup dua hari yang lalu. Didit langsung marah kepada ayahnya dan mengunci pintu kamarnya.

Sorenya, Hoegeng mengetuk, tetapi tak dibukakan pintunya. Saking marahnya kepada ayahnya, Didit melampiaskan kemarahannya dengan menggunting semua ujung kuas melukis ayahnya sehingga tak bisa digunakan lagi. Hingga akhirnya, Didit membuka pintu kamarnya dan kemudian berbicara dengan ayahnya di kamar. Hoegeng kemudian menjelaskan mengapa dia tak memberi surat izin orangtua. "Meskipun itu surat izin orangtua, tetapi itu akan menjadi sebuah kemudahan untuk menjadi taruna," kata Hoegeng.

Meskipun tandatangan Hoegeng adalah sebagai orangtua, tetapi jabatan Hoegeng waktu itu adalah Kapolri. Didit akhirnya bisa menerima. Kini, Didit menyesal jika

mengingat karena pernah membuat marah ayahnya dengan cara menggunting semua ujung kuas lukisnya.

Hal yang sama juga dialami Reni saat ingin masuk ke Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Pada waktu itu, Reni tak yakin bisa masuk ke ITB. Oleh karena itu, dia meminta ayahnya membuat surat katebelece, sebab pada waktu itu ada ketentuan ITB hanya diperuntukkan khusus bagi warga Jawa Barat, dan bukan orang luar Jawa Barat, termasuk Jakarta. Terkecuali, jika dia bisa lolos seleksi masuknya yang diadakan oleh ITB sendiri. Namun, ayahnya menolak permintaan tersebut. Untungnya, Reni tergolong cerdas dan berbakat seni lukis sehingga bisa lolos masuk ke ITB.

Ada Robby Tjahjadi di Cendana

Saat menjadi Kapolri, sikap Hoegeng tak berbeda dengan saat dia bertugas sebagai Kadit Reskrim Kantor Kepolisian Sumatera Utara di Kota Medan. Selain sederhana, Hoegeng tetap jujur, lurus, dan tanpa kompromi terhadap siapa pun juga. Hoegeng juga tetap tak mau menikmati fasilitas pemerintah terkait jabatannya itu. Tak hanya pengawalan yang ditolaknya, rumah dinas Kapolri di dekat kantor Mabak Kebayoran Baru juga.

Saat menjadi Kapolri, tak jarang Hoegeng juga turun ke jalan raya untuk ikut mengatur lalu lintas apabila kebetulan jalan macet dan tak ada polisi di sana. Ia juga sering memutar mencari jalan dari rumahnya menuju kantornya hanya untuk mengetahui kesiapan anggotanya bertugas di lapangan dan kondisi lalu lintas. Hoegeng juga tak pandang

bulu menindak siapa pun yang melanggar aturan sekalipun dia dekat atau dilindungi oleh pejabat mana pun.

Semua kiprahnya itu tercatat dalam pemberitaan media massa pada waktu itu, dan terekam dalam benak pikiran masyarakat Indonesia yang mengikuti kiprahnya sebagai Kapolri. Dari soal transparansi penanganan kasus pemerkosaan Sum Kuning di Yogyakarta yang melibatkan anak-anak pejabat, penembakan mahasiswa ITB Rene Conrad oleh mahasiswa Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI), hingga soal kewajiban pemakaian helm untuk keselamatan pengendara motor.

Bahkan, dalam hal pemberantasan korupsi pun, Hoegeng sudah berkiprah. Sebagaimana dilaporkan Harian *Kompas*, 2 Juli 1969, di hadapan Kepala Kepolisian Daerah dan Komando Keamanan Pelabuhan se-Indonesia, Hoegeng menginstruksikan mereka untuk mendaftarkan kekayaannya. Tak heran jika sejumlah pejabat—termasuk Presiden Soeharto—pun merasa gerah dengan sikap dan tindakan Hoegeng.

Satu ketika Dharto berkunjung ke rumah Hoegeng untuk bertamu. Saat itu, Hoegeng bukan lagi menjabat sebagai Kapolri. Setelah disambut dengan baik, Hoegeng pun bercerita akan pengalamannya sebagai Kapolri. Salah satu yang diceritakannya adalah bagaimana Hoegeng melawan para penyelundup mobil mewah yang kerap memasukkan barang dari luar negeri maupun mengirimkannya ke luar negeri tanpa prosedur yang benar alias tak mau membayar bea masuk atau keluar pemasukan barang

Sebagai Kepala Polri, Hoegeng juga melakukan peninjauan ke daerah untuk melihat situasi Kamtibmas dan kondisi anak buahnya. Hoegeng saat meninjau Kota Mataram, NTB. (Dok. Keluarga Hoegeng)

sehingga merugikan negara. Salah seorang pengusaha yang diceritakannya adalah Robby Tjahjadi, yang banyak di-*backing* oleh sejumlah aparat polisi dan TNI.

Sejak Hoegeng dipercaya sebagai Kapolri pada 1968, saat itu memang tengah marak terjadi penyelundupan mobil-mobil mewah yang pelakunya di antaranya Robby Tjahjadi. Menurut Hoegeng dalam bukunya *Hoegeng, Polisi Idaman dan Kenyataan*, sebelum Jaksa Agung Ali Said pada tahun 1972 menerjunkan tim gabungan Badan Koordinasi Pelaksana (Bakolak) untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Penyelundupan, polisi yang dipimpinnya sebenarnya sudah membongkar kasus Robby Tjahjadi.

Di bawah periode kepemimpinannya, Hoegeng tak pandang bulu untuk membongkar setiap kasus penyelundupan.

Tercatat 3.000 mobil mewah yang berhasil masuk duane tanpa membayar bea masuk. Dari ribuan mobil mewah yang dimasukkan secara ilegal, hanya ratusan yang bisa ditangkap kembali oleh polisi. Cukup besar kerugian negara akibat penyelundupan terebut. Robby sendiri akhirnya hanya menjalani hukuman 10 tahun penjara. Sebelumnya, banyak kasusnya yang dibongkar oleh polisi dipetieskan sehingga tidak lanjut ke pengadilan. Tak jarang juga banyak mobil yang sudah ditangkap dilepaskan kembali oleh petugas dan berkeliaran di jalan Jakarta. Pada waktu itu, banyak oknum-oknum aparatur yang diduga terlibat dalam kasus Robby Tjahjadi. Selain oknum Bea dan Cukai, juga oknum ABRI dan pejabat tinggi lainnya.

"Suatu saat, sebagai Kapolri, Hoegeng dipanggil untuk menghadap Presiden Soeharto di rumahnya di Jalan Cendana Nomor 8, Menteng. Hoegeng sekalian akan melaporkan kasus penyelundupan mobil mewah yang kerap dilakukan, salah satunya oleh Robby Tjahjadi dengan di-*backing* oknum pejabat." ujar Hoegeng. Namun, sesampainya di rumah Presiden, Hoegeng terkejut. "Sebab, orang yang akan Hoegeng laporkan itu ternyata sudah lebih dulu berada di Jalan Cendana untuk menghadap Presiden Soeharto," ujar Hoegeng.

Hoegeng pun langsung berbalik 180 derajat keluar rumah Presiden, dan langsung pulang ke kantornya. "Dengan segala pertimbangan, saya akhirnya balik badan dan tidak jadi melapor ke Presiden," ujar Hoegeng.

Menurut Didit, ayahnya waktu itu memang dipanggil Presiden. Namun, dia tak tahu maksud pemanggilannya. "Papi waktu itu lagi sakit gigi. Di pipinya sampai dipasangi *koyo* (obat model plester) untuk untuk mengurangi rasa sakitnya. Tetapi, setelah menunggu lama, karena ada tamu, Papi terkejut. Ternyata, tamunya adalah Robby Tjahjadi. Papi langsung pulang dan tak mau datang meskipun ajudan menelponnya. Papi beralasan giginya sakit, dan tak bisa ditahan lagi," paparnya.

Hoegeng merasa terpukul menyaksikan apa yang terjadi. Pada satu sisi, ia melakukan pemberantasan penyelundupan yang merugikan keuangan negara, tetapi justru banyak pejabat tinggi negara yang berkompromi dengan mereka. Hoegeng juga tak pandang bulu "melawan" siapa

pun yang dinilainya berkompromi dengan kejahatan. Sekali lagi, sikap profesionalisme dan menjaga integritasnya sebagai sosok polisi tetap dipertahankan di hadapan petinggi negeri meskipun pada akhirnya Hoegeng kurang disukai.

Gampang Bersihkan Korupsi

Sikap Hoegeng yang sederhana, terbuka, jujur, dan tak mau kompromi merupakan cerminan sikapnya yang antikorupsi. Dari hal-hal yang sederhana yang dilakukan Hoegeng setiap hari di kantornya, bagi Dharto itu merupakan komitmennya menolak apa pun yang bisa mengarah pada tindakan dan perbuatan korupsi.

Caranya menerima tamu di kantor, yang dilakukan di hadapan anak buahnya tanpa ada pembicaraan rahasia karena didengar oleh siapa pun di ruangannya, menunjukkan langkah awal Hoegeng mencegah korupsi. Sikap itu ditunjukkan pula saat Hoegeng menolak setiap pemberian dan hadiah berupa barang rumah tangga, mobil, atau motor dari siapa pun yang diyakininya bisa mempengaruhi sikapnya bekerja.

Sebagai pejabat, Hoegeng juga tak mau aji mumpung atau mentang-mentang berkuasa untuk memanfaatkan jabatannya atau mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Misalnya, saat si pemilik rumah sewaannya tak mau lagi rumahnya dibayar, Hoegeng terpaksa membayarnya dengan wesel. Hoegeng juga meminta sang istri untuk menutup toko kembang yang baru dirintis

istrinya, agar saat bertugas Hoegeng tidak menghadapi masalah seperti *conflict of interest* dari relasinya.

Hoegeng pun menolak fasilitas-fasilitas terkait jabatannya yang dinilai berlebihan meskipun hal itu dimungkinkan secara aturan seperti pemberian kavling tanah, rumah, atau mobil dinas. Bahkan, termasuk pengawalan sehari-hari dan penjagaan di depan rumahnya.

"Kalau mau menghilangkan korupsi di negara ini, sebenarnya gampang. Ibaratnya, kalau kita harus mandi dan membersihkan badan, itu semuanya harus dimulai dari atas ke bawah. Membersihkan korupsi juga demikian. Harus dimulai dengan cara membersihkan korupsi di tingkat atas atau pejabatnya lebih dulu, lalu ke turun badan atau level pejabat eselonnya, dan akhirnya ke kaki hingga telapak atau ke pegawai di bawah," jelas Hoegeng. Hal itu ditanyakan Didit saat ayahnya sakit dan dirawat di rumah sakit.

Didit kemudian menceritakan bagaimana ayahnya tidak membiasakan menerima gratifikasi dengan cara yang paling sederhana seperti menolak setiap bingkisan dari kepala kepolisian di daerah (kapolda, dulu disebut kadapol) sepulangnya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

"Papi itu, kalau kunjungan kerja ke daerah, selalu menggunakan pesawat milik kepolisian sendiri meskipun kondisinya kurang baik. Dia tak mau menggunakan pesawat komersial karena akan memboroskan anggaran kepolisian. Setiap pulang kunjungan kerja, para kadapol selalu memberikan bingkisan berupa makanan atau buah-buahan dan lainnya. Bingkisan itu sudah diletakkan di pesawat

sebelum Papi naik. Namun, saat Papi melihat bingkisan-bingkisan itu, ia turun lagi, dan minta bingkisan-bingkisan itu diturunkan. Papi tidak mau terbang sebelum barang-barang tersebut disingkirkan dari pesawat," tutur Didit.

Iman yang "Sentoso"

Hoegeng lahir di Kota Pekalongan, sebuah kota pesisir di utara Jawa Tengah. Nama lengkapnya Hoegeng Iman Santoso, tetapi dia lebih senang menyingkat namanya menjadi satu kata saja, Hoegeng.

Nama itulah yang tercantum dalam *name tag* di seragam dinas kepolisiannya sejak lulus dari Sekolah Polisi Sukabumi pada tahun 1944 hingga lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta.

Soal nama, Hoegeng juga pengalaman menarik saat ditanya Presiden Soekarno di Istana Negara. Pada sekitar tahun 1952, sebagai siswa PTIK angkatan pertama yang baru lulus, Presiden Soekarno ingin bertemu dengan mereka. Satu per satu, mereka pun dipanggil maju dan memperkenalkan diri kepada Presiden.

Saat giliran Hoegeng maju, Presiden Soekarno menanyakan siapa namanya. "Hoegeng, Pak," jawab Hoegeng, dalam bukunya *Hoegeng, Polisi Idaman dan Kenyataan*. Bung Karno mengernyitkan dahinya dan merasa heran. "Apa tidak salah? Biasanya, kan, Soegeng," ujar Bung Karno. Hoegeng tetap menjawab bahwa nama pemberian

orangtuanya memang seperti itu. Namun, Bung Karno tetap bersikeras, "Hoegeng bukan nama orang Jawa."

Bung Karno kemudian mengusulkan agar sebaiknya nama Hoegeng diganti saja seperti namanya, yang diambil dari nama wayang. Dia mengusulkan, "Namamu diganti Soekarno, seperti nama saya." Hoegeng menjawab, "Tidak bisa Pak, namanya sudah Hoegeng." Namun, Presiden memaksa. Akhirnya, agar Bung Karno tidak marah, Hoegeng mengajaknya bercanda dengan gaya Pekalongan, "Kalau Hoegeng itu nama pemberian orangtua saya. Kalau Soekarno itu nama pembantu rumah tangga saya di rumah, Pak." Teman-temannya dari PTIK dan tamu yang hadir tertawa.

Bung Karno melotot marah saat diolok-olok Hoegeng, tetapi kemudian tersenyum dan tertawa *ngakak*, "Kurang ajar kamu ya!"

Saat menjadi menteri, Hoegeng tetap menggunakan satu kata namanya. Termasuk dalam setiap korespondensi di lingkungan kedinasan, cukup ditulisnya "Hoegeng" saja. Bahkan, hingga menjadi Kapolri, nama di lencananya tetap Hoegeng.

Dharto pun penasaran. "Nama pemberian orangtua Hoegeng memang Hoegeng Iman Santoso. Namun, bagi Hoegeng, nama Hoegeng saja sudah cukup. Nama Hoegeng Iman Santoso cukup berat disandang. Memangnya, Hoegeng sudah memiliki iman yang *sentoso* (teguh)? Wah, berat Mas Dharto kalau (memakai) nama Iman Santoso itu. Jadi, Hoegeng cukup pakai nama Hoegeng saja," katanya dengan santai sambil terkekeh.

Saat Hoegeng sakit dan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Cawang, Jakarta Timur, Didit pernah menanyakan hal yang sama dengan Dharto. Jawaban Hoegeng juga sama persis seperti jawabannya kepada Dharto. "Nama Hoegeng akan tetap Hoegeng, sampai kapan pun. Kecuali, sampai akhir hayat, jika Hoegeng tetap bisa menjaga iman yang *sentoso*," ujarnya.

Ketika Hoegeng akan dimakamkan secara militer di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Giritama, Desa Tonjong, Kecamatan Bojongede, Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 14 Juli 2004, Didit yang mewakili keluarganya kembali menceritakan hal itu di hadapan Komandan Inspektur Upacara, Kapolri Jenderal (Pol.) Da'i Bachtiar.

"Kini, setelah ayah saya mampu menjaga imannya tetap teguh sampai akhir hayatnya, saya nyatakan bahwa nama lengkap ayah saya adalah, Hoegeng Iman Santoso," tandas Didit. Tentu, bagi Didit, wujud iman yang *sentoso* itu tak hanya menjaga akidah agama, tetapi juga dalam perbuatannya sehari-hari di mana pun dia berada, tetap menjaga sikap, tindak dan perbuatan yang terpuji.

Sebagian besar pelayat yang hadir dalam pemakaman tersebut terharu dan meneteskan air mata. Didit kemudian dipeluk dengan hangat oleh Kapolri, seraya ikut meneteskan air mata. ❖

Bab VII

Hoegeng dalam Keseharian

Sayang Istri

Meriyati Roeslani—yang kemudian dipanggil Meri oleh Hoegeng—adalah putri seorang dokter, Soekmano, dan wanita keturunan Belanda, Jeanne Reyneke van Stuwe. Hoegeng berkenalan dengan Meri saat mereka dijodohkan oleh Kapten (TNI) Iskak, yang menjadi Kepala Bagian Penerangan Markas Besar Angkatan Darat serta memimpin seksi hiburan Radio Aldo (Angkatan Laoet Darat dan Oedara).

Hoegeng yang pernah mengisi program musik *Hawaiian* di beberapa radio di Yogyakarta dan Batavia akhirnya bersedia bermain dalam sandiwara radio *Saija dan Adinda*, sebuah cerita yang disadur dari novel *Max Havelaar*, karya Multatuli atau Eduard Douwes Dekker pada abad ke-19. Hoegeng berperan sebagai Saija, dan Meri menjadi Adinda-nya.

Hoegeng yang pada waktu itu berpangkat mayor tengah bertugas di Yogyakarta sebagai Penyelidik Militer Angkatan Laut. Pada periode itu, Hoegeng memang tengah pindah

Sekitar 2003 sebelum meninggal, Hoegeng berfoto bersama istrinya, Meri. (Dok. Keluarga Hoegeng)

dari kepolisian ke Kesatuan Angkatan Laut. Sedangkan Meri dikenal sebagai gadis cantik dari Pekalongan yang bekerja sebagai penyiar radio militer Aldo. Hubungan mereka jadi lebih intensif selesai pertunjukan *Saija dan Adinda* yang dianggap sukses di Radio Aldo. Sandiwara itu ditampilkan ulang di Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta atas permintaan Presiden Soekarno, yang juga ikut mendengarkan sandiwara tersebut.

Mereka menikah pada tanggal 31 Oktober 1946 di Yogyakarta dan dikaruniai tiga anak, Reni Soerjanti Hoegeng, Aditya Soetanto Hoegeng, dan Sri Pamujining Rahayu.

Hoegeng merupakan sosok yang sangat sayang kepada keluarga. Suatu saat, Meri jatuh sakit dan terpaksa harus diopname di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jalan Salemba. Oleh sebab itu, Hoegeng datang ke kantor dengan wajah kuyu, tidak seperti biasanya selalu berseri-seri. Dharto ikut merasakan kesedihan yang dialami Hoegeng.

Sejak datang hingga menjelang pulang kantor, Hoegeng tak habis-habisnya menelpon kerabat dan rekan-rekannya untuk memberitahukan dan meminta doa agar istrinya lekas sembuh. "Istri Hoegeng sakit, dan dirawat di rumah sakit. Tolong didoakan, ya, agar Meri cepat sembuh," ujarnya, dengan suara lirih saat menelpon.

Tampak sekali ekspresi wajah Pak Hoegeng yang sedih dan sangat mengasihi istrinya yang tengah sakit itu. Seingat Dharto, setelah selesai kantor, Hoegeng langsung pulang untuk menemani istrinya di rumah sakit. Dharto

dan stafnya juga menyempatkan diri menengok Meri yang dirawat di RS Cipto Mangunkusumo.

Saat menengok itulah Hoegeng sekaligus memperkenalkan Dharto dan Soermarjo kepada istrinya. "Ini Mas Dharto dan Mas Marjo yang membantu Hoegeng di kantor," ujar Hoegeng. Meskipun sakit, Meri kemudian menjulurkan tangannya untuk menyalami staf suaminya itu dengan senyum lebar dan hangat. Saat menjabat tangan Dharto, Meri sempat berujar, "Bantu Pak Hoegeng ya, dan doakan saya lekas sembuh," ujar Meri.

Dharto berpikir, pantas jika Hoegeng sangat mencintai istrinya, karena Meri sosok istri yang tak hanya cantik dan memberi perhatian dan hormat kepada suaminya dan anak buahnya, tetapi juga memiliki pengertian yang luar biasa akan prinsip hidup suaminya. Meri rela mengorbankan kepentingannya untuk kelancaran tugas suaminya.

Saat ada banyak istri yang ikut mendorong karier suaminya hingga berhasil, tetapi juga tak ikut mengendalikan sikap hedonis duniawi akan harta benda yang dimilikinya, Meri justru ikut menopang prinsip suaminya yang sederhana, jujur, dan tak mudah kompromi—apalagi menerima suap atau korupsi. Sejak Hoegeng bertugas di Medan, menjadi Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri, hingga Kapolri, jika Meri tipe istri yang *doyan* harta, tentu Meri bisa mengumpulkan harta kekayaan yang melimpah dengan meminta Hoegeng menerima dan melakukan apa pun yang melanggar hukum dan aturan.

Namun, hal itu sama sekali tidak dilakukannya. Meri justru menuruti apa yang dimaui suaminya meskipun hal itu dilakukannya untuk membantu ekonomi keluarga. Salah satu pengorbanan Meri yang cukup besar adalah saat Hoegeng ditunjuk menjadi Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia.

"Waktu itu, Papi yang sebelumnya masih lontang-lantung, Mami membantu dengan berjualan kembang di Pasar Cikini. Karena laris, Mami bisa membuka toko kembang. Didit yang membantu mengirimkan pesanan bunga dan kembang tersebut ke pelanggan-pelanggan. Namun, ketika Papi diangkat jadi Kepala Jawatan Imigrasi, Mami diminta menutup toko bunga tersebut. Alasan Papi, kalau Mami masih buka toko bunga, nanti relasi Papi akan banyak yang membeli bunga ke toko Mami. Itu tidak baik bagi Papi saat menjalankan tugas. Mami, dengan sukarela, menutup toko kembangnya itu," tutur Didit.

Saat Hoegeng dilantik sebagai Kapolri, Hoegeng juga tidak mengizinkan Meri menjadi Ketua Umum Bhayangkari, yang biasa dijabat oleh istri Kapolri. Hoegeng justru meminta kepada pengurus Bhayangkari untuk melakukan pemilihan Ketua Umum Bhayangkari. Pada periode itulah, jabatan Ketua Umum Bhayangkari diisi oleh bukan istri Kapolri.

"Kalau kita main ke Mabes Polri, pada periode kepemimpinan Papi, foto Ketua Umum Bhayangkari bukan foto Mami, tetapi foto orang lain," ujar Didit. Hoegeng waktu itu mengatakan pada istrinya, "Hoegeng ini komandan polisi di Indonesia, tetapi Meri bukan komandan dari istri-istri para polisi."

Meski demikian, Hoegeng adalah sosok suami yang sangat mencintai istrinya. Hoegeng tak hanya ingin selalu berdua selama masa hidupnya, tetapi juga saat di pemakaman. Sebelum kematian menjemputnya, Hoegeng sempat menyampaikan pesan kepada keluarganya bahwa dia tak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. "Kalau Hoegeng dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Meri tak bisa dimakamkan di samping saya. Hoegeng ingin Meri selalu mendampingi," begitu kata Hoegeng, seperti dituturkan Didit.

Ajarkan Anak Bertanggung Jawab

Menurut Dharto, Hoegeng juga mengajarkan anaknya disiplin dan bertanggung jawab jika dia memang bersalah. Meskipun Kapolri, Hoegeng tak pandang bulu jika memang anaknya harus diperiksa polisi. Suatu saat, Hoegeng dilapori oleh Kepala Polda Metro Jaya Widodo Boedidharmo tentang penangkapan sejumlah anak-anak muda yang tengah mengisap ganja. Salah seorang yang ditangkap kemudian menyebutkan bahwa anak Kapolri, Didit, disebut-sebut juga termasuk yang ikut-ikutan membeli ganja.

Hoegeng pun meminta Didit menemui Widodo di Polda Metro Jaya. Widodo diminta untuk memeriksa Didit terkait tuduhan tersebut. Namun, ternyata, Didit tak bersalah. Dia sama sekali tak terlibat. Padahal, sebelumnya saat pemeriksaan, tersangka yakin melihat putra Kapolri itu ikut membeli ganja. Bahkan, dia bisa mengenali wajah putra Kapolri yang ditudingnya itu.

Namun, ketika Didit dikonfrontasi, tersangka justru tak mengenal siapa Didit itu. Didit pun akhirnya dilepaskan. Belakangan diketahui, orang yang dimaksud si tersangka ternyata salah seorang putra pejabat tinggi lainnya, yang memang sering memakai narkotika dan obat-obatan terlarang. Tersangka mengaku asal menyebutkan anak Kapolri agar hukumannya bisa dikurangi.

Suatu siang, menjelang ujian negara SMA, Didit juga pernah meminta izin ayahnya untuk meminjam mobil dinasnya. Alasannya, Didit akan belajar bersama dengan teman-temannya di rumah salah seorang rekannya. Karena sayang kepada anaknya, Hoegeng pun mengizinkan. Namun, Hoegeng mewanti-wanti agar mobil segera dikembalikan sebelumnya jam 24.00.

Kenyataannya, Didit baru pulang pukul 02.00 dini hari karena ketiduran setelah belajar. Hoegeng pun marah besar. Salah seorang staf ajudannya, Pardi, yang sudah menunggu di depan rumah, langsung meminta Didit menemui ayahnya yang sudah menunggu di ruang makan. Didit yang semula ingin menghindari ayahnya, terpaksa harus melewati ayahnya karena untuk menuju kamarnya harus melewati ruang makan.

Benar saja. Saat lewat, Hoegeng berkata, "Catat siapa saja ayah teman-temanmu yang ikut belajar dan naik mobil dinas Papi. Serahkan pagi ini, dan suruh mereka menghadap Kapolri di kantor pukul 06.30." Didit diam saja karena merasa bersalah. Ia juga ketakutan luar biasa.

Bukan karena ayahnya marah, tetapi karena ayah teman-temannya yang ikut belajar dan menumpang mobil dinasnya harus menghadap ayahnya di kantor. Mereka tidak bersalah, pikir Didit. Ia membayangkan orangtua teman-temannya pagi-pagi ini harus datang ke kantor Polri dan menjalani pemeriksaan. Didit pun memutuskan untuk menjelaskan kepada ayahnya dan siap menerima hukuman karena konsekuensi kesalahannya.

Didit kemudian masuk mengetuk kamar ayahnya untuk berbicara. Ayahnya mengizinkan masuk. Saat di kamar, ayahnya tengah membaca Surat Yasin. Didit langsung menyerahkan KTP dan SIM-nya, serta punggungnya yang sudah dibuka, tanpa baju. "Silakan Papi marah, dan pukul Didit sepuas Papi. Tetapi, tolong, jangan ayah teman-teman Didit yang harus dihukum karena Didit. Mereka tidak bersalah. Hukum saja Didit," tandasnya, memohon.

Hoegeng hanya menjawab, "Terus?". Didit pun menceritakan bahwa saat akan belajar di salah satu rumah rekannya, rumah rekannya ternyata tak bisa dijadikan tempat berkumpul karena ada acara. Didit kemudian pindah lagi ke rumah temannya yang lain. Namun, di sana, rumah temannya juga tak bisa dipakai. Didit pun kemudian mendatangi rumah kawannya yang lain sambil membawa teman-temannya yang akan ikut belajar itu. Rumah temannya yang terakhir bisa dipakai untuk belajar. Tetapi, setelah belajar hingga malam, mereka ketiduran, dan baru bangun dini hari itu.

Ayahnya yang mendengarkan cerita hanya mengatakan "terus" dan "terus". Meri yang tidur di samping ayahnya kemudian terbangun. Setelah menanyakan apa yang terjadi, Meri ikut mendengarkan. Di ujung cerita, Didit akhirnya meminta maaf kepada ayahnya. Ternyata, dengan kata-kata "terus", Hoegeng sebenarnya menunggu putranya meminta maaf atas kesalahannya itu. Barulah setelah Didit meminta maaf, Hoegeng bisa menerima alasan Didit.

"Dit, kamu tahu, saat kamu membawa mobil dinas itu, Papimu itu sudah bersalah. Apalagi kamu membawa mobil itu ke mana-mana. Meskipun plat nomornya bukan plat dinas ayahmu, tetapi mobilnya adalah mobil dinas Polri. Polisi di jalan itu tahu itu mobil siapa," jelas Hoegeng. Didit bisa mengerti alasan ayahnya marah. Sejak itu, Didit tak lagi berani meminjam mobil dinas ayahnya.

Di SMA Negeri 4 Jalan Batu, Jakarta, Didit pernah diceritakan teman-temannya yang melihat ayahnya mengatur lalu lintas di jalan raya. Didit merasa malu karena ayahnya Kapolri, tetapi masih mengatur lalu lintas di jalan. Apalagi, saat mengatur lalu lintas itu, teman-temannya melihat.

Saat makan malam, Didit meminta ayahnya agar tidak usah mengatur lalu lintas di jalan raya. "Kan, sudah ada petugas yang mengaturnya, Pap," ujar Didit. Namun, sambil menggebrak meja makan, Hoegeng berkata, "*God verdomme*! Jadi, kamu malu, Papimu mengatur lalu lintas di jalan raya?" Didit diam saja.

Hoegeng kemudian menjelaskan, "Sebagai Kapolri, Papi tidak bisa membiarkan jalanan macet, padahal petugas

belum datang. Papimu ini, meskipun Kapolri, juga seorang polisi. Jadi, wajib, kalau di jalan raya terjadi kemacetan, Papimu harus turun membantu. Jangan menunggu petugas polisinya datang. Mengerti kamu?!" tandasnya.

Didit juga bercerita pengalamannya bepergian dengan ayah-ibunya apabila menengok kakaknya di Bandung. Perjalanan ke Bandung yang harusnya bisa ditempuh selama empat jam jika melewati Jalur Puncak, ternyata bisa lebih dari delapan jam. "Soalnya, Papi selalu memberhentikan bus angkutan yang kelebihan penumpang agar tak membahayakan keselamatan. Lalu, kami harus ikut menunggu Papi menghentikan bus lainnya untuk mengangkut penumpang yang diturunkan Papi dari bus sebelumnya. Kami pun jadi harus menunggu berjam-jam sampai semua penumpang terangkut semuanya," paparnya.

Selama dalam perjalanan, Hoegeng juga tak mau makan di restoran karena takut ada orang yang membayari. Meri akhirnya selalu membawa bekal makan untuk dinikmati di perjalanan. "Ceritanya, suatu kali saat perjalanan ke Bandung, Papi mengajak kami makan di sebuah restoran di Puncak. Namun, saat ingin membayar, kasir restoran tak mau menerima karena sudah ada yang membayar. Papi marah besar, tetapi orang yang membayar sudah tak ada lagi. Sejak itu, Papi tak mau lagi makan di restoran mana pun," kenang Didit.

"Rembrandt" Semata Wayang

Hoegeng ternyata juga seorang seniman otodidak. Dia orang yang serba bisa. Selain pernah bermain drama *Sajja*

dan Adinda di radio di Yogyakarta, Hoegeng juga pandai melukis, membuat karikatur seseorang, memainkan alat musik ukulele, serta membawakan lagu-lagu berirama *Hawaiian*. Bakat Hoegeng bermain musik, membuat karikatur, dan melukis sudah tumbuh sejak masih remaja di Pekalongan. Ibunya, Oemi Kalsoem, sering memainkan siter, dan ayahnya Soekaryo Haryo Hatmodjo memainkan akordeon.

Bakatnya sebagai seorang pembuat karikatur mulai ditunjukkan saat Hoegeng kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta. Sejumlah karyanya bahkan sempat menjadi ilustrasi majalah internal terbitan PTIK. "Karikaturnya banyak bercerita tentang kondisi kepolisian, termasuk rasa kecintaannya, kritik sosialnya, dan harapannya terhadap institusi yang dicintainya," kata Didit.

Sebagai pelukis, Hoegeng dikenal memiliki aliran naturalis. Awalnya, Hoegeng senang melukis wajah manusia. Mulai dari Raden Saleh hingga orangtuanya sendiri. Namun, kemudian obyeknya berubah. Belakangan, Hoegeng senang menggambar pemandangan dan akhirnya sejumlah bunga.

Pada saat memiliki kesempatan dan *mood*, Hoegeng menyempatkan diri untuk melukis di rumahnya. Namun, karena Hoegeng polisi yang sederhana dan jujur, dia tak punya banyak uang untuk memenuhi hobinya itu. Apalagi, putri sulungnya, Reni, yang waktu itu mahasiswi Seni Rupa Institut Teknologi Bandung (ITB), juga senang melukis. Saat masih duduk di SMA Perguruan Cikini, Jakarta, Reni sekelas

Dari dulu hingga akhir jabatannya, Hoegeng merupakan sosok yang tak pernah berubah dalam bersikap. Inilah judul karikatur yang dibuatnya sendiri, dan dimuat dalam buletin yang diterbitkan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1950-an. (Dok. Keluarga Hoegeng)

dengan putri Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, yang pernah menjadi Wakil Presiden RI dan Presiden RI.

Hoegeng dan Reni pun adakalanya sering berebut peralatan jika ingin melukis. Salah satu peralatan melukis yang sering jadi rebutan adalah cat pewarna untuk melukis, yang dipakai Hoegeng dan anaknya. Kebetulan, alat lukis yang dipakai dikenal cukup bagus dan mahal harganya. Mereknya, Rembrandt, diambil dari nama pelukis asal Belanda, Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Saking mahalnya dan hanya semata wayang, Hoegeng pun mengaku *eman-eman* (sayang-sayang) jika akan menggunakannya untuk melukis. Sebab, jika sudah terpakai, cat pewarna itu habis dan Hoegeng tak mampu membelinya kembali.

"Karena *eman-eman*, cat pewarna lukisan itu Hoegeng tidak pernah dipakai, tetapi hanya dicium-cium saja, setelah itu disimpan lagi," tutur Hoegeng.

Entah sudah berapa banyak lukisan yang dihasilkan oleh Hoegeng selama ini. Pernah suatu kali rekan Dharto, Totok Soesilo, mendengar Hoegeng senang melukis sehingga Totok pun berminat untuk membeli salah satu lukisannya. Dia meminta tolong Dharto untuk menanyakan kepada Hoegeng tentang lukisan Hoegeng yang akan segera dijualnya. Alasan Totok, lukisan tersebut bakal dijadikan kenang-kenangan.

Namun, ternyata, Hoegeng menolak lukisannya dibeli orang. "Mas Dharto, maaf Hoegeng tak menjual lukisannya kepada siapa pun," ujarnya. Namun, belakangan, setelah pensiun dari Kapolri, beberapa lukisan Hoegeng kabarnya

Hoegeng bersama Jack Lesmana mempersiapkan rekaman di studio. (Dok. Keluarga Hoegeng)

dijual untuk menopang hidupnya. Hingga kini, tak hanya sejumlah lukisannya yang masih ada, tetapi karikaturnya juga masih tersimpan rapi di Hoegeng Gallery, semacam tempat pameran yang didirikan secara berpatungan oleh anaknya.

Sebagai seniman musik, sejak remaja, Hoegeng juga sudah membentuk *band* sekolah. Selanjutnya, ia membentuk kelompok musik yang diberi nama The Hawaiian Seniors. Disebut The Hawaiian Seniors karena kelompok musik ini membawakan lagu-lagu dengan irama musik *Hawaiian*. Selain memainkan alat musik ukulele, Hoegeng juga ikut menjadi vokalis.

Hoegeng adakalanya tampil bersama dengan istrinya. Penampilan Hoegeng jika sedang mengisi acara selalu mengenakan pakaian bermotif kembang-kembang dan menggunakan untaian kalung bunga. Penampilannya menjadi sangat khas pada waktu itu.

Minatnya di musik terus dikembangkan meskipun kariernya sebagai polisi terus meningkat. Sebagai Menteri/Pangak, yang kemudian berubah menjadi Kapolri, Hoegeng juga tetap bermain musik. Bahkan, saat dicopot sebagai Kapolri, dan bergabung dengan Petisi 50 pun, Hoegeng tetap meneruskan bermain musik.

Hingga sampai pada tahun 1980-an, kelompok musik Hoegeng tak boleh tampil di satu-satunya stasiun televisi yang pada waktu itu baru ada, yaitu *TVRI*. Dengan alasan musik The Hawaiian Seniors bukan aliran musik asal negeri sendiri, The Hawaiian Seniors pun dilarang tampil. Padahal, musik-musik saat itu, seperti lagu-lagu pop dan dangdut yang merajalela, juga bukan musik asal Indonesia.

Alasan sebenarnya adalah karena Hoegeng bergabung dengan kelompok Petisi 50, yang kerap mengkritik pemerintah Orde Baru dan kepemimpinan Presiden Soeharto. Sejak dilarang tampil di *TVRI*, kelompok musik ini juga dilarang tampil di mana pun, hingga akhirnya bubar dengan sendirinya.

Dikira China

Hoegeng sebenarnya campuran Pekalongan dan Tegal, Jawa Tengah. Ayahnya, yang berasal dari Pekalongan adalah *ambtenaar* atau pegawai pemerintah Hindia Belanda, yang juga pernah menjadi jaksa. Ibunya dari Tegal. Meski demikian, wajah Hoegeng seperti orang China. Tak heran jika suatu saat Hoegeng dikira China dan dipanggil Koko atau Koh.

Ceritanya, tak lama setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965, pada sore hari, saat menjadi Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Hoegeng yang kebetulan berbaju koko atau kerah bergaya Shanghai, mengendarai *jeep* Willis-nya dari arah Kebayoran Baru menuju rumahnya di Menteng. Saat tiba di kawasan jalan Sudirman di sekitar Jembatan Semanggi, tiba-tiba ada seorang tentara yang menghentikan perjalanannya. Si tentara ingin menumpang ke suatu tempat. Hoegeng pun berhenti dan mengajaknya naik.

Tampaknya, mobil Hoegeng dihentikan karena Hoegeng dikira China. Pada masa itu, setelah terjadinya Gerakan 30 September, adalah suatu hal yang biasa jika ada satu-dua tentara yang seenaknya mencegat kendaraan dan ikut menumpang kendaraan yang dihentikannya. Setelah si tentara duduk di sampingnya, Hoegeng disapa," Koh, saya ikut menumpang ya," Hoegeng lalu mengangguk saja.

"Siapa namamu?" bentak tentara yang menumpang mobil. "Saya Hoegeng," jawabnya.

Hoegeng dan Meri berfoto bersama sejumlah artis pengisi acara *The Hawaiian Seniors* di *TVRI*. (Dok. Keluarga Hoegeng)

Hingga masa tuanya, Hoegeng tak pernah melepaskan kuas lukisannya. Namun, yang berubah adalah objek lukisannya. Dari semula melukis wajah, kemudian beralih ke pemandangan, dan akhirnya melukis bunga. Alasannya, jika melukis wajah seseorang, Hoegeng bisa dibohongi. (Dok. Keluarga Hoegeng)

Mungkin karena saat melirik ke pengendaranya si tentara pernah melihat wajah Hoegeng, akhirnya si tentara merasa malu dan tak lama minta diturunkan sebelum sampai di tempat tujuannya. Hoegeng hanya tersenyum dan bertanya. "Mengapa harus turun di sini? Mari Hoegeng antar ke tempat tujuan," kata Hoegeng. Sang tentara tak menjawab, dan malah buru-buru turun sambil mengucapkan terima kasih, tetapi tanpa berani melihat wajah Hoegeng lagi.

Jadi "Monyet" untuk Tangkap Orang Utan

Dalam buku *Hoegeng, Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa*, Hoegeng memiliki kegemaran memelihara binatang. Selain memiliki sejumlah burung dan ayam, Hoegeng juga memiliki monyet. Bahkan, Hoegeng pernah memiliki orang utan atau siamang.

Orang utan itu pemberian sejumlah orang, di antaranya dari Panglima Komando Pemulihan dan Keamanan Ketertiban (Pangkopkamtib) Laksamana (AL) Soedomo. Orang utan itu kemudian diberi nama "Soedomo", sesuai nama pemberinya. Demikian pula nama-nama binatang lainnya, yang merupakan pemberian orang lain. Hoegeng selalu memberi nama sesuai si pemberinya. Pemberian nama si pemberi buat Hoegeng bukan untuk menghinanya, tetapi justru untuk menghargai para pemberinya, sekaligus juga untuk mengingat orang-orang yang dinilainya baik memberikan hewan untuk dipeliharanya.

Bertahun-tahun diurus, tiga orang utan itu seolah seperti anaknya sendiri. Hoegeng tak sungkan bermain dan memeluk-memeluknya jika ada di rumah. Suatu saat, salah satu orang utan itu lepas dan masuk ke pekarangan rumah orang. Pengurus rumah tangganya mengejar ke rumah tetangganya itu. Namun, orang utan tersebut malah naik ke atas genteng. Saat dipanggil-panggil, orang utan itu tidak turun-turun.

Akhirnya, karena bingung, pengurus rumah tangga Hoegeng pulang dan melaporkan hal itu kepada Hoegeng.

Hoegeng pun turun tangan. Dia menuju ke rumah tetangganya. Setelah meminta izin untuk naik ke genteng untuk menangkap orang utannya yang lepas, Hoegeng pun memanjat. Saat tiba di genteng rumah tetangganya itu, Hoegeng segera memanggil-manggil agar orang utan tersebut menghampirinya. Namun, orang utan itu tetap bergeming.

Tanpa kehilangan akal, Hoegeng mengatur strategi. "Hoegeng pura-pura jadi monyet dengan menirukan gaya dan suara monyet, Mas Dharto. Mungkin karena dikira masih 'saudara'-nya, orang utan itu tiba-tiba mau. Dia mendekat dan minta dipeluk. Hoegeng pun langsung memeluk dan membawanya turun," tutur Hoegeng yang saat bercerita seraya menirukan gaya monyet kepada Dharto.

Ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai larangan memelihara hewan-hewan langka, orang utan-orang utan yang dimilikinya pun harus diserahkan kepada petugas perlindungan binatang. Meskipun sedih harus kehilangan binatang kesayangannya, Hoegeng harus menaati semua aturan yang ada.

Di balik keseriusannya jika tengah bekerja, Hoegeng juga sosok yang humoris. Bahkan, adakalanya ia juga suka iseng dan jahil. "Jika tengah mengikuti Sidang Kabinet yang dipimpin Bung Karno, Hoegeng suka membuat karikatur salah seorang menteri sehingga membuat rapat berhenti sesaat karena mendadak terdengar suara orang tertawa. Presiden Soekarno bukannya marah, tetapi malah ikut

tertawa," kata Didit. Salah satu karikatur yang sering dibuatnya adalah wajah seekor monyet.

Suatu saat, selesai mengikuti acara resepsi pernikahan di Balai Kartini, Jakarta, Hoegeng dan Meri yang diantar Didit, tanpa sengaja bertemu dengan B.J. Habibie yang waktu itu masih menjadi menteri. Habibie bersama dengan istrinya, Ainun, yang sejak mahasiswa dikenal dengan baik oleh Hoegeng sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Hoegeng pernah menyunatkan Didit kepada Ainun, yang waktu itu sudah menjadi dokter.

Ayahnya kemudian menyapa Ainun. "Nun, apa kabar?" Ainun membalasnya dengan menyatakan kabar baik. Setelah bersalaman, tanpa diduga ayahnya mendadak iseng. "Nun, masih ingat waktu menyunat Didit? Nih, sekarang Didit-nya sudah besar. Mau lihat hasil karya sunatanmu?" ujar Hoegeng terkekeh. Ainun tersenyum meringis, dan Habibie tertawa kecut. Hoegeng kemudian dicubit oleh Meri agar tak iseng. ❖

Bab VIII

Silaturahmi Terputus

Kapolri yang Memberi Hormat

Pada tanggal 3 Agustus 1966, Presiden Soekarno secara resmi memberhentikan Hoegeng sebagai Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, dan sekaligus mengangkatnya sebagai Deputi Menteri Muda Panglima Angkatan Kepolisian. Sebagai Wakil Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menteri/Pangak), Hoegeng ditunjuk untuk menangani tugas operasional kepolisian di Indonesia.

Situasi politik berkembang dengan cepat menyusul terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menewaskan sejumlah Jenderal TNI Angkatan Darat akibat penculikan. Kekuasaan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup mulai digerogoti. Aksi mahasiswa besar-besaran hampir setiap hari terjadi. Mereka menuntut pertanggungjawaban Presiden Soekarno atas kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada waktu itu. Kabinet yang dipimpinnya terus bergonta-ganti dan tak bertahan lama. *Reshuffle* kabinet atau pergantian kabinet pun tak terelakkan, terutama untuk menghilangkan sejumlah

Hoegeng pada tanggal 15 Mei 1968 diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai Kepala Polri menggantikan Soetjipto Joedodihardjo. (Dok. Keluarga Hoegeng)

Tak jarang, Hoegeng sebagai Kepala Polri masuk ke pedalaman untuk melihat langsung keadaan masyarakat. Hoegeng saat bersama penduduk Papua di pedalaman Waimena. (Dok. Keluarga Hoegeng)

menteri yang dinilai terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tersebut.

Setelah munculnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata (Menhamkam/Pangab), terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Satu di tangan Presiden Soekarno—yang sebenarnya kewenangannya mulai digerogoti—dan satunya berada di tangan Jenderal Soeharto.

Beberapa bulan setelah menjadi Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, pada awal Agustus 1966, Hoegeng ditarik kembali ke kesatuannya di polisi sebagai salah satu dari

Sebagai Kepala Polri, Hoegeng menghadiri pengadilan penembakan mahasiswa ITB, Rene Conrad, pada tahun 1970-an. Duduk di belakang Hoegeng, orangtua Rene Conrad yang mencari keadilan menyusul terjadinya keributan antara mahasiswa ITB dengan taruna Akabri dalam pertandingan sepakbola. (Dok. *Kompas*)

Deputi Menteri Muda Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Operasi. Saat itu, Menteri Panglima Angkatan Kepolisiannya dijabat oleh Jenderal (Pol.) Soetjipto Joedodihardjo.

Dalam tugasnya itu, Hoegeng tak hanya berkoordinasi dan mengawasi Brigade Mobil (Brimob), tetapi juga berkoordinasi dan mengawasi Kesatuan Polisi Perairan dan Udara (Polair dan Udara), Direktorat Tugas Umum dan Direktorat Lalu Lintas.

Tugas tersebut dijalaninya sekitar setahun. Sebab, pada tahun 1967, Hoegeng memegang pimpinan harian dan mengendalikan urusan operasional kepolisian. Termasuk, mewakili Menteri/Pangak Jenderal Soetjipto jika dia berhalangan mengikuti sidang kabinet di Istana.

Namun, beberapa hari kemudian, Hoegeng dipanggil oleh Soetjipto ke ruang kerjanya di Markas Besar Angkatan Kepolisian (Mabak). Dalam pertemuan itu, Soetjipto menyatakan mundur sebagai Menteri/Pangak karena ingin lebih cepat pensiun. Setelah Jenderal Soetjipto mengundurkan diri sebagai Menpangak, Hoegeng diangkat untuk menggantikannya sebagai Menteri/Pangak. Menurut Soetjipto, atas pertimbangan deputi lainnya dan dirinya, Hoegeng dirasa pantas untuk menggantikannya sebagai Menteri/Pangak. Sebelum dilantik sebagai Menteri/Pangak pada tanggal 15 Mei 1968 di Mabak Kebayoran Baru, pangkat Hoegeng dinaikkan sebelumnya menjadi bintang tiga atau menjadi Komisaris Jenderal pada awal Mei 1968.

Penunjukan Hoegeng sebagai Menteri/Pangak dibarengi dengan penunjukan Tengku Azis sebagai Wakil Menteri/Pangak. Tepat pada tanggal 15 Mei 1968 di Mabak Kebayoran Baru, Hoegeng dan Tengku Azis dilantik menjadi Menteri/Pangak dan Wakil Menteri/Pangak. Pelantikannya dilakukan oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno setelah MPRS menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno terkait kondisi politik dan sosial ekonomi Indonesia.

Selanjutnya, Presiden Soeharto mengubah jabatan Menteri/Pangak dan Wakil Menteri/Pangak menjadi Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) dan Wakil Kapolri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969. Pergantian sebutan Kapolri dan Wakapolri diresmikan tepat pada peringatan Hari Bhayangkara pada tanggal 1

Juli 1969. Demikian pula, pada peringatan Hari ABRI pada tanggal 5 Oktober 1969, sebutan untuk Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara diubah menjadi Kepala Staf.

Saat Hoegeng diangkat sebagai Kapolri, Dharto masih bertugas di lingkungan Setneg. Waktu itu, Dharto pegawai Setneg. Meskipun sudah tak lagi jadi sekretaris, secara pribadi Dharto dan Hoegeng masih membina hubungan. Sesekali Dharto mengunjunginya di rumah. Jika Hoegeng ada suatu keperluan terkait kedinasan, Hoegeng adakalanya menghubungi Dharto. Demikian juga Dharto. Bersama istrinya, Dharto sering mengunjungi Hoegeng di rumahnya untuk bersilaturahmi.

Suatu hari, setelah upacara Proklamasi Kenegaraan di depan Istana Merdeka, Dharto bertemu dengan Hoegeng secara tak sengaja. Waktu itu, Hoegeng ditemani sejumlah stafnya akan meninggalkan Istana Merdeka menuju kendaraan dinasnya yang diparkir di belakang Istana Negara. Saat berjalan melewati halaman tengah antara Istana Merdeka dan Istana Negara, Hoegeng dan Dharto berpapasan.

Dharto langsung menyapanya. "Pak Hoegeng. Ini Dharto, apa kabar," kata Dharto seraya menjulurkan tangannya untuk menyalami Hoegeng. Namun, Hoegeng yang berpakaian resmi sebagai Kapolri, tak langsung menyambut tangan Dharto. Hoegeng justru memberikan

hormat lebih dulu kepada Dharto seperti kebiasaannya dulu saat masih menjadi Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet.

"Apa kabar juga Mas Dharto," sembari mencengkeram tangan Dharto cukup lama sehingga Dharto meringis kesakitan karena Hoegeng memakai cincin di jarinya. Berjabat tangan dengan erat dan hangat merupakan ciri Hoegeng kepada siapa pun sebagai tanda silaturahmi yang tulus dan tak dibuat-buat. Sebelum berpisah, Hoegeng mengenalkan sejumlah stafnya kepada Dharto.

Pada kesempatan lain, saat menghadiri undangan ulang tahun Kaisar Jepang di Kedutaan Besar Jepang, Hoegeng juga bertemu dengan Dharto. Namun, saat itu Hoegeng sudah lama diberhentikan lebih dulu sebagai Kapolri oleh Presiden Soeharto. Sedangkan Dharto waktu itu sudah berpindah tugas di Kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, yang dijabat oleh Menko Polkam Jenderal (TNI) M. Panggabean.

Hoegeng yang didampingi istrinya, Meri, waktu itu agak lupa dengan Dharto. Mungkin ini dikarenakan sudah malam hari sehingga penglihatan Hoegeng sudah tidak terlalu jelas. Saat disapa Dharto, Hoegeng sempat diam saja. Untung istrinya, Meri masih mengingatnya. "Pak, ini Dharto, mantan sekretarismu waktu jadi Menteri/Sekertaris Presidium Kabinet," kata Meri mengingatkan Hoegeng. Setelah itu, Hoegeng langsung menyalami dengan erat sekali. Hoegeng juga menanyakan kabar Dharto yang masih bekerja di Kantor Menko Polkam.

Hoegeng bebas bersepeda ke mana saja setelah diberhentikan sebagai Kepala Polri. (Dok.

Kompas)

Diberhentikan jadi Kapolri

Hoegeng akhirnya memang diberhentikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Oktober 1971. Sebelumnya, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata (Menhankam/Pangab) M. Panggabean menyurati Hoegeng bahwa masa jabatannya berakhir karena usia yang dinilai sudah tua, dan Hoegeng diusulkan untuk menjadi Duta Besar (Dubes) Swedia. Namun, Hoegeng menolak.

Karena menolak, pemerintah menawarkan Hoegeng menjadi Dubes di Kerajaan Belgia, Benelux dan Luxemburg (Benelux). Alasannya, istri Hoegeng, Meri, adalah keturunan Belanda dan Hoegeng sendiri fasih berbahasa Belanda. Diharapkan, dengan menjadi Dubes Kerajaan Benelux, Hoegeng bisa menerimanya. Namun, lagi-lagi Hoegeng menolak. Banyak yang menilai, tawaran menjadi dubes adalah cara pemerintahan Presiden Soeharto "membuang" Hoegeng ke luar Indonesia. Namun, Hoegeng sendiri merasa masa jabatannya sebagai Kapolri belum berakhir, dan dia tetap ingin mengabdi di Tanah Air. Pada akhirnya, Hoegeng dipanggil ke rumah Presiden Soeharto di Jalan Cendana.

Hoegeng saat itu memang tengah memperjuangkan kewajiban bagi para pengendara dan penumpang sepeda motor menggunakan helm untuk keselamatan. Namun, kebijakan itu ditentang berbagai kalangan karena masyarakat tidak terbiasa memakai helm. Meski demikian, banyak yang mendukung dan memuji kebijakan baru Hoegeng untuk

keselamatan pengendara dan penumpangnya. Kebijakan

yang diprotes sebagian orang ini, beberapa bulan kemudian akhirnya disetujui. Hingga saat ini, helm bagi pengendara dan penumpang menjadi keseharian sebagai perlengkapan keselamatan berkendaraan.

Keberhasilannya mewajibkan pemakaian helm membuat nama Hoegeng semakin populer. Apalagi Hoegeng juga dikenal sangat jujur dan transparan untuk mengungkapkan banyak kasus kejahatan dan tindak pidana selama kepemimpinannya pada periodenya itu, termasuk yang menyangkut dan melibatkan anak-anak pejabat negara serta institusi militer, misalnya dalam kasus pemerkosaan Sum Kuning di Yogyakarta, penembakan mahasiswa ITB Rene Conrad, dan kasus penyelundupan mobil kelas kakap oleh Robby Tjahjadi.

Saat dipanggil Presiden Soeharto, Hoegeng memang ditawari lagi menjadi dubes. "Tugas apa pun saya akan terima, asal jangan jadi dubes, Pak," jawab Hoegeng, dalam bukunya, *Hoegeng, Polisi Idaman dan Kenyataan*. Namun, Presiden Soeharto menampik, "Di Indonesia, tidak ada lagi lowongan buat Hoegeng." Ditantang seperti itu, Hoegeng langsung menyatakan berhenti jadi Kapolri pada saat itu juga.

Sebelum meninggalkan rumah Presiden Soeharto, pers yang bertugas di Istana Kepresidenan mencegatnya dan meminta Hoegeng memberikan keterangan pers. Awalnya, Hoegeng menolak karena tak siap dan merasa tidak enak di rumah Presiden Soeharto. Namun, karena kasihan dengan

para wartawan yang sudah menungguinya, Hoegeng pun akhirnya bersedia.

Dalam keterangan pers dadakan itu, Hoegeng hanya menjelaskan secara normatif alasan keputusannya berhenti sebagai Kapolri. Pers yang mempersoalkan usia Hoegeng yang pada waktu itu ternyata lebih muda dari Kapolri yang akan menggantikannya, tak dijawab oleh Hoegeng. Para wartawan pun kecewa. Hoegeng hanya ingin *mikul duwur mendem jero*. Sebagai orang Jawa, Hoegeng akhirnya harus menjunjung tinggi kehormatan seorang pemimpin, dengan menyimpan sendiri segala sesuatu yang kurang baik pada pemimpinnya.

Setelah diberhentikan, Hoegeng mengembalikan semua barang yang pernah digunakannya selama menjadi Kapolri. Tak hanya mobil dinas Kapolri, tetapi *handy talky* dan semua barang milik polisi juga dikembalikannya ke Mabak. Hoegeng kemudian digantikan oleh Jenderal (Pol.) Moh. Hasan, yang ternyata usianya jauh lebih tua daripada Hoegeng, yaitu sekitar 53 tahun. Hoegeng sendiri pada waktu itu baru berusia 49 tahun.

Meskipun jabatan Kapolri digantikan oleh Hasan, hubungan pribadi Hoegeng dengan Hasan sangat baik. Hal itu terbukti dengan pemberian hadiah rumah oleh Hasan kepada Hoegeng. Rumah itu adalah rumah sewaan yang ditempati oleh Hoegeng bersama keluarganya sejak tinggal di Jakarta. Rumah sewaan tersebut sebelumnya diproses pengalihannya oleh pemerintah DKI, yang waktu

itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin bekerjasama dengan kapolri baru.

Beberapa hari setelah mendengar Hoegeng berhenti sebagai Kapolri, Dharto kemudian datang ke rumah dan mengucapkan selamat. Hoegeng mengira Dharto memberikan ucapan selamat karena Hoegeng sudah pensiun. Namun, ternyata tidak. Di balik kontroversi pemberhentian Hoegeng sebagai Kapolri, Dharto justru ingin memuji sikap Hoegeng yang konsisten dengan sikap dan perkataan sebelumnya, yaitu menolak menjadi Dubes Kerajaan Benelux. "Hoegeng hanya ingin bertugas di Indonesia meskipun Hoegeng fasih bahasa Belanda, dan mungkin cocok sebagai Dubes di Kerajaan Benelux," ujar Hoegeng beralasan soal penolakannya sebagai dubes.

Sebelumnya, saat berkunjung ke rumah Hoegeng beberapa waktu sebelumnya, Hoegeng pernah menceritakan sikap seorang pejabat negara yang pernah sesumbar di media massa bahwa dirinya tak akan mau dijadikan dubes jika sudah memasuki masa purnawirawan dan mengakhiri tugasnya. "Daripada dibuang jadi dubes, lebih baik saya jadi lurah saja di desa," ujarnya. Namun, ketika Presiden Soeharto menawarinya menjadi dubes di salah satu negara, pejabat tersebut langsung menerimanya.

"Mas Dharto, itu namanya tidak konsekuen. Antara yang diucapkan dan dilakukan, tak sesuai. Sikap seperti itu memalukan diri sendiri," tandas Hoegeng. Siapa pejabat negara itu, sebenarnya Dharto mengetahuinya. Namun,

Dharto tak mau menyebutkannya, dengan pertimbangan tertentu.

Saat Hoegeng ditawari menjadi dubes, Didit juga menceritakan ayahnya menyampaikan hal itu juga kepada keluarganya di meja makan.

Hoegeng memberikan alasan mengapa dia tak mengambil jabatan tersebut. "Yang pertama, Papimu ini seorang polisi, dan harusnya ditugaskan sebagai polisi saja, bukan dubes. Untuk menjadi dubes, harus seorang diplomat," tandas Hoegeng.

Namun, anak-anaknya mencoba menawar agar ayahnya mengambil kesempatan tersebut. Dengan menjadi dubes, mereka bisa merasakan luar negeri. "Kita, kan, belum tahu luar negeri, Pap. Kalau Papi jadi dubes, kita bisa ke luar negeri gratis," ujar Didit.

Mendengar hal itu, Hoegeng marah. Sambil menggedor meja makan, Hoegeng mengatakan. "*God verdomme*! Kamu tahu, kalau papimu jadi dubes, kerjanya hanya seremonial seperti bertemu dengan perwakilan pemerintah negara asing sambil minum atau makan. Padahal, di negara kita ini banyak rakyat yang tengah kesulitan hidupnya, dan untuk makan dan minum saja sulit," tandasnya. Anak-anaknya langsung diam, dan tak membantah lagi.

Diminta Berhati-hati

Jabatan Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet dijalani Hoegeng sejak tanggal 27 Maret 1966 hingga tanggal 25

Dari Sekretariat Negara, Soedharto Martopoespito dipindah ke Menko Polkam yang saat itu dijabat oleh Jenderal (TNI) M. Panggabean. (Dok. Kel. Soedharto Martopoespito)

Juli 1966. Meskipun hampir lima bulan menjadi sekretaris Hoegeng di Menteri/Sekretaris Presidum Kabinet, Dharto mempunyai hubungan yang dekat dengan Hoegeng secara pribadi. Dharto adakalanya berkunjung ke rumah Hoegeng bersama istrinya atau sendirian. Adapun Hoegeng tiap kali menelponnya jika ingin menanyakan kabar Dharto dan keluarganya atau jika ingin meminta bantuan terkait tugasnya.

Pada saat proses akan diangkat menjadi Kepala Biro Umum atau Eselon III di Kantor Menko Polkam, Dharto juga berkunjung ke rumah Hoegeng. Waktu itu, Hoegeng sudah pensiun sebagai polisi. Kegiatannya selain berkumpul

bersama keluarganya, juga melukis dan rutin mengisi acara musik *The Hawaiian Seniors* di *TVRI*. Hoegeng tampil bersama istrinya, Meri, dan musisi lainnya.

Pada tahun 1978, Presiden Soeharto untuk pertama kalinya membentuk Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam, kini Menko Polhukam). Menteri Koordinator yang dipercaya menduduki jabatan tersebut adalah Jenderal (TNI) M. Panggabean, yang sebelumnya Menteri Hankam/Pangab. Sebelumnya, Panggabean menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan, yang juga merangkap sebagai Panglima Angkatan Bersenjata (Menhankam/Pangab). Berbarengan dengan pengangkatan Panggabean, Dharto juga ditunjuk oleh Menteri Sekretaris Negara Sudharmono pada waktu itu menjadi Kepala Biro Umum di kementerian baru tersebut.

Namun, kantor Menko Polkam pada waktu itu belum ada sehingga Dharto menyiapkan administrasi perkantoran Menko Polkam bersama Panggabean di rumah pribadi Panggabean di Jalan Teuku Umar, kawasan Menteng, Jakarta. Saat itu, kantor Menko Polkam di Jalan Medan Merdeka Barat 15 masih dalam tahapan renovasi dan pembangunan. Hampir enam bulan, Dharto mempersiapkan terbentuknya Kantor Menko Polkam yang baru. Karena rumah Panggabean dekat dengan rumah Hoegeng, Dharto sering bertamu ke rumah Hoegeng di kawasan yang sama.

Hingga suatu saat, Dharto pun menyampaikan kabar gembira pengangkatannya itu kepada Hoegeng saat berkunjung ke rumahnya. Hoegeng pun memberinya

berkunjung ke rumahnya. Hoegeng pun memberinya

selamat. "Wah, bagus itu, tetapi hati-hati ya Mas Dharto. Dalam tugasmu, banyak tantangan dan hambatan," kata Hoegeng memberi pesan. Itulah pesan yang pernah diterima Dharto sebelum pamit pulang.

Ternyata itu pesan Hoegeng terakhir kepada Dharto. Sebab, sejak Panggabean hingga Menko Polkam berikutnya, yaitu Jenderal (TNI) Soerono, Laksamana (AL) Sudomo, Jenderal (TNI) Soesilo Soedarman, Jenderal (TNI) Faisal Tanjung, dan Jenderal (TNI) Wiranto, Dharto tak lagi bisa bersilaturahmi dengan Hoegeng. Demikian pula Hoegeng, tak lagi mengontak Dharto. Sebab, Hoegeng kemudian bergabung dengan kelompok Petisi 50, yaitu kelompok yang selalu mengkritisi jalannya pemerintahan Presiden Soeharto.

Tak Berani Berkunjung

Sejak Hoegeng bergabung dengan Kelompok Petisi 50 pada tahun 1980 dan Dharto menjadi Kepala Biro Umum di Kantor Menko Polkam, praktis hubungan keduanya terputus. Sebagai anggota kelompok yang sering disebut *dissident* (pembangkang), Hoegeng seperti berada di seberang jalan dan berhadapan dengan Dharto, selaku orang pemerintahan. Namun, Dharto sangat menghargai sikap dan pilihan politik Hoegeng sebagai anggota Petisi 50.

Petisi 50 mulai unjuk gigi ketika pada 5 Juli 1980 mengeluarkan sebuah pernyataan keprihatinan atas sejumlah masalah politik, ekonomi, dan keamanan di

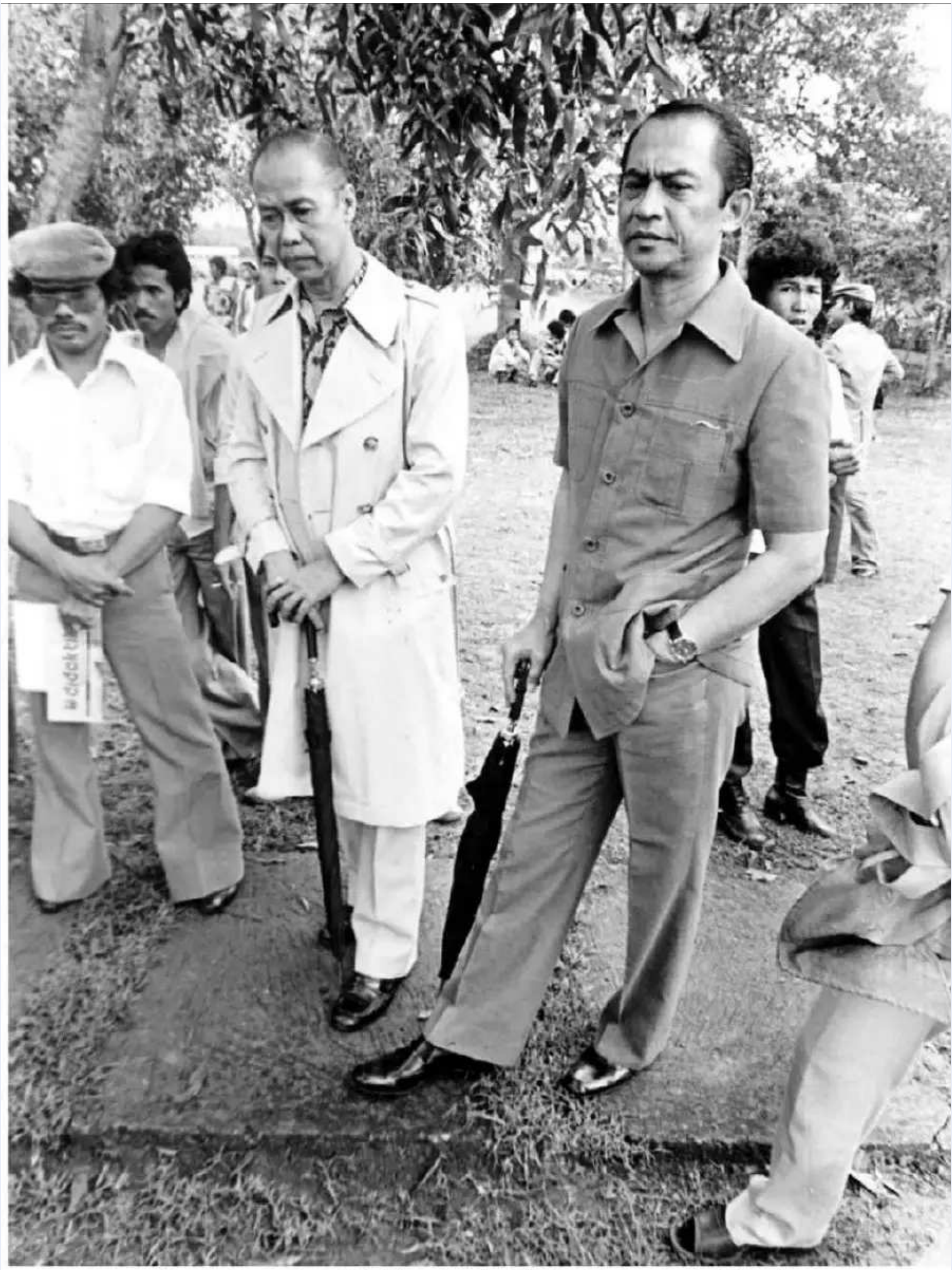

Hoegeng bersama Bang Ali Sadikin saat masih aktif sebagai sesama anggota kelompok Petisi 50 di Jakarta. (Dok. *Kompas*)

bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pernyataan keprihatinan itu dinilai sesuatu yang berani, dilakukan pada masa itu. Ibarat gayung bersambut, pernyataan keprihatinan kelompok tersebut memancing 19 anggota DPR memanfaatkan Hak Mengajukan Pertanyaan untuk pertama kalinya kepada Presiden Soeharto sehingga membuat kondisi politik Indonesia semakin memanas.

Kelompok ini beranggotakan sejumlah tokoh nasional. Ada mantan purnawirawan TNI, juga Polri. Sebut saja, seperti Jenderal seperti A.H. Nasution, Jenderal (Purn) M. Jasin, Azis Saleh, Bang Ali (Ali Sadikin), dan Hoegeng. Selain itu, juga ada tokoh-tokoh sipil seperti S.K. Trimurti, Chris Siner Key Timu, Judilhery Rustam, dan Anwar Harjono.

Mereka yang tergabung dalam kelompok Petisi 50 dimasukkan pemerintah dalam daftar hitam. Sebagian anggota kelompok ini tak hanya dicegah untuk bepergian ke luar negeri atau dikucilkan, tetapi juga diawasi secara ketat oleh sejumlah aparat intelijen. Pengawasan tak hanya dialami dalam acara-acara pertemuan kelompok tersebut, tetapi juga dalam hidup kesehariannya, termasuk pekerjaan dan bisnis anak-anaknya.

Misalnya, fasilitas kredit untuk mendapatkan pinjaman perbankan anak-anak kelompok Petisi 50 juga dipersulit sehingga sejumlah usaha bisnis mereka sebagian gulung tikar. Didit, putra Hoegeng, yang mencoba berbisnis juga merasakan kesulitan tersebut. Izin usahanya di Kementerian Perdagangan selalu ditolak. "Didit diminta mem-

buang nama Hoegeng di belakang nama Didit agar izin

usahanya bisa disetujui," ujar Didit. Namun, Didit menolak, dan berganti usaha lain yang tak memerlukan izin.

Bahkan, Hoegeng juga menjadi korban. Tayangan acara musiknya di stasiun milik pemerintah atau *TVRI*, yaitu *The Hawaiian Seniors*, yang sudah muncul sebelum menjadi Kapolri, ditutup. Alasannya, musiknya bukan musik asli Indonesia. Namun, alasan sebenarnya adalah karena di acara tersebut ada anggota Petisi 50.

Kelompok ini menjadikan rumah Bang Ali sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi untuk membahas setiap persoalan dalam negeri dan perkembangan politik terakhir. Meskipun demikian, aparat tak berani untuk membubarkan pertemuan-pertemuan yang diadakan kelompok tersebut, kecuali mengawasi dan memata-matainya.

Sebaliknya, sebagai Kepala Biro Umum di Kantor Menko Polkam, Dharto harus benar-benar menunjukkan sepenuhnya dedikasi, pengabdian, dan kesetiaannya yang tinggi sebagai abdi negara. Apalagi, kantor yang dipimpin Jenderal (TNI) M. Panggabean pada waktu itu merupakan bidang tugas baru yang dibentuk Presiden Soeharto. Tugasnya antara lain memelihara dan mengantisipasi situasi dan kondisi politik dan keamanan negara. Kantor ini dianggap penting, apalagi setelah memanasnya politik di Indonesia. Terutama, setelah terjadinya peristiwa Malari pada tanggal 15 Januari 1974, lahirnya gerakan-gerakan mahasiswa, dan munculnya kelompok-kelompok kritis seperti Petisi 50.

Tak bisa disalahkan jika sebagai orang pemerintah, tak ayal Dharto pun praktis larut dalam tugas kesehariannya di kantor Menko Polkam. Saat Menko Polkam dijabat oleh Jenderal (TNI) Soerono, misalnya, Dharto diberi kesempatan mengikuti Kursus Reguler Angkatan ke-XVII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 1985. Kursus yang digelar selama sembilan bulan itu menjadi prasyarat untuk pengangkatan seseorang menjadi pejabat Eselon 1 di pemerintahan.

Dharto kemudian memang diangkat menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan Menko Polkam, atau pejabat setingkat Eselon 1. Waktu itu, Menko Polkam dijabat oleh Soedomo. Selanjutnya, ketika Menko Polkam dijabat oleh Soesilo Soedarman, Dharto ditetapkan menjadi seorang penatar atau Manggala P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila/P4). Sebelumnya, Dharto mengikuti penataran tingkat nasional di Istana Bogor yang berlangsung selama 12 hari, bersama sejumlah pimpinan daerah dan pejabat pemerintah.

Atas pengabdian dan dedikasinya selama itu, Dharto kemudian mendapat anugerah Bintang Jasa Utama dan Satya Lencana Karya Satya atas pengabdiannya sebagai PNS selama 30 tahun dengan pangkat Pembina Utama (IVE) dari Presiden Soeharto. Setelah pensiun pada tahun 1998, Menko Polkam Faisal Tanjung mengusulkan Dharto menjadi Widya Iswara atau pengajar mata kuliah administrasi negara di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Meski demikian, selama enam bulan, Dharto masih diperbantukan

demikian, selama enam bulan, Dharto masih diperbantukan

untuk membantu Faisal Tanjung di Kantor Menko Polkam, sebelum menjadi Widya Iswara.

Meskipun sudah pensiun, saat Menko Polkam dijabat Wiranto, Dharto juga masih diminta untuk membantu selama tiga bulan sampai terisinya pejabat baru yang akan menggantikannya sebagai pejabat Eselon I yang diembannya. Dengan kesehariannya itu, tak heran jika Dharto selama itu tak berani mengunjungi Hoegeng. Dharto khawatir mendapat penilaian yang buruk jika masih berhubungan dengan Hoegeng yang dicap sebagai penentang pemerintah.

Sistem politik di pemerintahan Orde Baru saat itu dikenal represif. Meskipun kunjungannya ke Hoegeng hanya bersifat silaturahmi atau kekeluargaan, tentu tak bisa ditoleransi jika ada pejabat pemerintah yang melanggar aturan, termasuk berkomunikasi dengan mereka yang dianggap pembangkang. Kebetulan, rekan Dharto di LAN, Soeharto, mempunyai pengalaman yang kurang baik gara-gara anaknya berteman dan satu kuliah dengan putra Bang Ali.

Sebagai teman, putra pegawai LAN itu tentu sering berkunjung ke rumah putra Bang Ali. Saat berkunjung, putra pegawai LAN itu selalu membawa mobil ayahnya. Tanpa disadari, ternyata plat nomor mobilnya itu selalu dicatat oleh sejumlah intel yang tiap hari mengawasi rumah Bang Ali di jalan Borobudur.

Karena Soeharto pegawai LAN, maka nomor plat

mobilnya pun mudah ditelusuri oleh polisi. Soeharto pun

dipanggil atasannya. Sang atasan menanyakan mengapa mobilnya sering berada di rumah Bang Ali. Dalam seminggu, mobil bisa beberapa kali bolak-balik di rumah Bang Ali. Tentu saja, Soeharto terkejut bukan main.

Setelah menanyakan anaknya di rumah, ternyata anaknya membenarkan bahwa mobilnya memang sering dipakai untuk berkunjung ke rumah Bang Ali. Karena mobil hanya dipinjam untuk kunjungan anaknya ke rumah anak Bang Ali, Soeharto pun tidak mendapat sanksi. Namun, sang atasan menasihati Soeharto agar anaknya jangan berkunjung lagi ke rumah Bang Ali.

Pengalaman Soeharto membuat Dharto benar-benar tak berani menemui Hoegeng dan keluarganya di rumah. Apalagi, istrinya juga khawatir jika Dharto tetap berkunjung ke rumah Hoegeng. Dharto khawatir konduitenya juga jelek gara-gara hal itu. Sejak itu, Dharto memutuskan untuk tak datang ke Hoegeng, apalagi menghubunginya lewat telepon.

Tak Tahu Hoegeng Tiada

Sebagai pribadi, sebenarnya Dharto tak ada urusan dengan politik yang disikapi dan diyakini oleh Hoegeng. Bagi Dharto, itu adalah hak politik dan pilihan hidup Hoegeng, yang sejak muda memang memiliki sikap yang sederhana, jujur, lurus, dan tak mau kompromi. Namun, realitas politik harus diikuti. Akibat perbedaan tugas dan kondisi politik pada waktu itu, hubungan Dharto dengan Hoegeng pun terputus, seperti langit dan bumi.

Di usianya yang semakin senja, kesehatan Hoegeng terus menurun. Hoegeng didampingi Meri saat masih dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. (Dok. Keluarga Hoegeng)

Jarak yang semula dekat antara Dharto dengan Hoegeng, seperti jauh. Hubungan antara mantan sekretaris dan atasannya atau dua manusia yang saling mengenal, seperti terpisah dengan jarak dan waktu akibat situasi politik. Pilihan politik yang diambil Hoegeng dan jabatan Dharto sebagai Kepala Biro Umum di Kantor Menko Polkam, seperti memutuskan mata rantai hubungan silaturahmi dua manusia.

Dharto kemudian meniti kariernya hingga pensiun di kantor Menko Polkam pada tahun 1998, dan menjadi dosen di LAN selama lima tahun. Bahkan, Dharto juga masih diminta bantuannya oleh Menko Polkam Jenderal (TNI) Wiranto selama tiga bulan untuk mempersiapkan orang yang akan menggantikan Dharto.

Pada tanggal 14 Juli 2004, Hoegeng akhirnya menyelesaikan "tugasnya" menjaga iman yang teguh. Selama hidupnya, ia hanya mau menyebut namanya Hoegeng karena merasa belum memiliki iman yang teguh, meskipun nama lengkapnya adalah Hoegeng Iman Santoso. (Dok. Keluarga Hoegeng)

Dengan kesederhanaannya, Hoegeng terus menjalankan hidupnya sehari-hari sebagai pensiunan Polri yang kritis di Petisi 50. Bersama anak cucunya, Hoegeng juga melalui hari-harinya di rumahnya di kawasan Perumahan Pesona Kahyangan, Depok, Jawa Barat. Rumah itu dibelinya setelah dia menjual rumahnya di Menteng akibat kesulitan mendapatkan uang di masa pensiunnya. Uang hasil penjualan rumahnya dibagi rata kepada anak-anaknya, dan Hoegeng membeli sendiri rumah untuk hari tuanya bersama Meri di Pesona Kahyangan, Depok, Jawa Barat.

Pada tanggal 14 Juli 2004 pukul 00.30, setelah menderita *stroke* sekian lama, Hoegeng akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Hoegeng sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Ia meninggal dalam usia 83 tahun dengan meninggalkan tiga orang anak dan menantu serta sejumlah cucu. Hoegeng kemudian dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Giritama, Desa Tonjong, Kecamatan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Hoegeng sebenarnya pantas dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Namun, keluarganya tak menghendakinya. Hal itu sesuai dengan amanat Hoegeng yang sederhana dan berjuang tanpa pamrih.

Beberapa hari setelah kematian Hoegeng, baru Dharto mendengar kabar tersebut. Dharto waktu itu masih mengajar di LAN sama sekali tidak mengetahui, apalagi mendengar jika Hoegeng yang dihormatinya mendadak

berpulang ke surga.

Hoegeng telah tiada, tetapi semangatnya terus menggelora. Masyarakat terus merindukan hadirnya kembali sosok polisi seperti Hoegeng yang bersahaja, jujur, profesional, tanpa kompromi, dan anti-KKN di mana pun dia ditugaskan. Sebuah aksi demo yang mendukung kepolisian di Jakarta. (Dok. *Kompas*)

Meskipun kabar meninggalnya Hoegeng terlambat didengar, Dharto masih rikuh untuk datang ke rumah Hoegeng. Dharto sebenarnya ingin sekali menuliskan kenangannya mengenal Hoegeng. Artikelnya tentang Hoegeng ingin ditulis dan dimuatnya di media massa saat itu. Namun, lagi-lagi Dharto mengaku merasa tidak enak sebagai orang yang masih bertugas di lingkungan pemerintah. Akhirnya, Dharto pun tak jadi menuliskannya meskipun sudah ancang-ancang menuliskan ceritanya.

Setelah dipendam selama 48 tahun, baru pada Mei 2013, Dharto menuturkan pengalaman dan kenangannya

tentang Hoegeng dalam beberapa kali pertemuan dengan

penulis. Inilah hasil penuturannya. Dharto meyakini betapa dahsyatnya cengkeraman politik selama dan menjelang akhir kekuasaan Orde Baru yang dapat memutus hubungan dua orang manusia yang sebenarnya tidak ada memiliki persoalan apa-apa secara politik. Namun, realitas politik dalam budaya paternalistik memenjarakan seseorang untuk bisa berperan apa adanya dalam kehidupan nyata.

Hanya kenangan dan kebanggaan yang tersisa dalam benak Dharto. Ia bersyukur bisa mengenal dan melayani sosok yang profesional, sederhana, jujur, lurus, ramah tamah, baik, supel, humoris, tegas, disiplin, serta tanpa kompromi terhadap apa pun dan siapa pun jika tak sesuai prinsip dan pandangan pribadinya. Banyak pelajaran dan manfaat yang bisa dilakoni sebagai teladan hidup di tengah-tengah zaman yang semakin hilang contoh dan keteladanan yang baik.

Bagi Dharto, kesaksiannya dalam buku ini merupakan curahan rasa hormat dan kekaguman yang sangat besar terhadap sosok dan pribadi Hoegeng yang selamanya pantas dijadikan suri teladan bagi polisi, menteri, dan juga masyarakat lainnya. Kesaksiannya ini juga diharapkan menjadi sekelumit contoh bagi pendidikan budi pekerti dalam mewujudkan pembangunan karakter bangsa Indonesia yang memprihatinkan di masa sekarang ini. Semoga. ❖

Indeks

A

ABRI 81, 114
Adam Malik 6
Aglemeene Middelbare School 49
Agresi Belanda 61
AH Nasution 55, 68, 126
AKABRI 74, 78
Ali Sadikin 119, 125, 126
Ali Said 80
Amanat Penderitaan Rakyat 42
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 3, 74, 78
Angkatan Darat 57, 76, 87, 109, 114
antikorupsi xiii, 82
Anwar Harjono 126
Azis Saleh 126

B

Batalion Sukarelawan Satya Negara RI 3
Berita Minggu 74
Bhayangkara 113
Bhayangkari 91
B.J. Habibie 107
Boegie Soepeno 41
Brimob 53, 112

C

Chaerul Saleh 2, 7, 16
Chris Siner Key Timu 126
Corps Polisi Militer 57

D

Da'i Bachtiar 86
Dasaad Musin Concern 38
Dinas Pengawasan Keamanan Negara 47, 48, 54
Djoko Susilo ix, xii
DPA 16
DPR-GR 16

E

Eduard Douwes Dekker 87

F

Faisal Tanjung 124, 128, 129
Front Nasional 16

G

Gerakan 30 September 1965 102, 109, 111

H

Hoegeng Gallery 100
Hoegeng Iman Santoso xii, xv, xvii, 4, 84, 85, 86, 132
Hollandsch Inlandsche School 49

I

Idham Chalid 6, 29, 30
Ikhsan 6, 21, 43
ITB xiv, 77, 78, 97, 112, 118

J

Jack Lesmana 100
Johanes Leimena 2
Judilhery Rustam 126

K

Kabinet Dwikora 4, 5, 6, 22, 59, 62
Kabinet Dwikora II 5, 62
Kamtibmas 79
Kapolri xvii, xix, 24, 40, 53, 62, 63, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 80, 81, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 101, 109, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 127
Kejaksaan Agung 57
Komisi Pemberantasan Korupsi xi, xv
Kompas vi, 13, 78, 112, 116, 125, 134, 141, 142
komunisme 54
Korps Lalu Lintas Polri ix, xi

L

Lembaga Ketahanan Nasional 128

M

Malari 127
Mangil Martowidjojo 28
Marilyn Monroe 26
Max Havelaar 87
Meer Uitgebreid Lager Onderwijs 49
Megawati Soekarnoputri 99
Menko Polkam 115, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 131
Meriyati Roeslani 13, 23, 87
M Jasin 126
Mohammad Ikhsan 6
M. Panggabean 115, 117, 122, 123, 127
MPRS 3, 16, 113
Multatuli 87

N

Negara Kesatuan Republik Indonesia 50

O

Oei Tjoe Tat 16, 58, 59
Oemar Chatab 47
Ombudsman xviii

Orde Baru 101, 129, 135

P

Panca Tunggal 2
Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila 128
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia 50
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ix
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 47, 48, 84, 97, 98
Petisi 50 101, 124, 125, 126, 127, 133
politik 6, 23, 42, 58, 109, 113, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 135
Polri ix, xi, xii, xiii, xv, xx, 27, 33, 37, 53, 55, 71, 79, 86, 91, 94, 95, 110, 111, 112, 116, 126, 131, 133
PPATK xi
Presidium Kabinet xvii, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 21, 31, 35, 37, 40, 68, 69, 102, 109, 111, 115, 121

R

Radio Aldo 87, 89
Radio Hoso Kyoku 47
Radio Republik Indonesia 89
Recht Hoge School 49
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 99
Rene Conrad 78, 112, 118
Robby Tjahjadi 77, 80, 81, 118
Roeslan Abdulgani 6, 29

S

Saija dan Adinda 87, 89, 96
Sekolah Pendidikan Polisi 47
Sekretariat Negara xviii, 1, 122
S.K. Trimurti 126
Soebandrio 2, 7
Soedharto Martopoespito xvii, 1, 5, 13, 15, 122
Soedomo 105, 128
Soeharto 6, 21, 78, 81, 101, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130
Soekarno 3, 4, 5, 6, 10, 20, 21, 28, 38, 56, 58, 59, 61, 64, 66, 84, 85, 89, 106, 109, 111, 113
Soemardi 4
Soerono 124, 128
Soesilo Soedarman 124, 128
Soetjipto 64, 65, 66, 112, 113
Soetjipto Joedodihardjo 64, 110, 112
St Munadjat Danusaputro 16
Sudharmono 37, 43, 123
Sultan Hamengku Buwono 6, 59
Sum Kuning 78, 118
Supersemar 111

T

Tengku Azis 113
The Hawaiian Seniors 100, 101,

represif 129
103, 123, 127

Tjakrabirawa 28
Tjoek Soejono 6
TNI xiv, 6, 57, 80, 87, 109, 115, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 131
TVRI 101, 103, 123, 127

U

UKP4 xix
Universitas Gajah Mada 1
Universitas Indonesia 107

W

Widigda Sudigman 56
Widodo Boedidharmo 92
Wiranto 124, 129, 131

Y

Yayasan Eka Kapti 4
Yayasan Soedirman 31, 32, 33

Daftar Pustaka

Yusra, Abrar dan Ramadhan KH. 1993. *Hoegeng, Polisi Idaman dan Kenyataan*, cetakan pertama. Jakarta: Sinar Harapan.

Santoso, Aris, Ery Sutrisno, Hasudungan Sirait, Imran Hasibuan, dan Stanley (editor). 2009. *Hoegeng, Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa*, cetakan kedua. Jakarta: Bentang.

Berbagai kliping Harian *Kompas*, sejak 7 September 1965 hingga 30 Maret 2013.

Tentang Penulis

Suhartono lahir pada tanggal 13 Januari 1964 di Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Ia dibesarkan dalam didikan guru sekolah dasar, S Siswojo, dan ibu rumah tangga, Sri Mulatsih (almarhumah), hingga menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, pada tahun 1989. Ia telah menulis sejak menjadi mahasiswa dan anggota pencinta alam di C'mara Buana, Fakultas Hukum UKI. Kemudian ia menjadi jurnalis di koran mingguan *Sentana*, tabloid hiburan *Monitor*, majalah berita bergambar *Jakarta-Jakarta*, dan wartawan Harian *Kompas*, Jakarta. Setelah bertugas di desk ekonomi dan muda Harian *Kompas*, penulis ditempatkan di Istana Kepresidenan (Juli 2004-Maret 2010) dan di desk investigasi *Kompas*. Kini ayah dua anak, Anya dan Aga, dari pernikahannya dengan Retno Galih Kurniawati ini adalah Wakil Editor Desk Nusantara *Kompas*. ❖

"DI INDONESIA HANYA ADA TIGA POLISI YANG TAK BISA DISUAP: PATUNG POLISI, POLISI TIDUR, DAN HOEGENG"

— KH ABDURRAHMAN WAHID

GENERASI muda kini mungkin tak lagi tahu, Hoegeng yang dimaksud Presiden Abdurrahman Wahid dalam kata-katanya di atas adalah almarhum Jenderal (Pol.) Hoegeng Iman Santoso, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di zaman transisi Orde Lama menuju Orde Baru. Sebagai polisi, Hoegeng dikenal jujur, sederhana, dan tak kenal kompromi. Karenanya, seperti polisi tidur, ia tak bisa disuap.

Namun, bagaimana kiprah Hoegeng ketika ia dipercaya Presiden Soekarno menjadi Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet dan Menteri Iuran Negara, serta Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia pada periode tahun 1961-1966?

Buku ini tak hanya menuturkan keteladanan Hoegeng sebagai polisi dan birokrat. Juga ada kisah hubungan Hoegeng dan Soedharto Martopoespito yang berakhir tragis. Cengkeraman kekuasaan Orde Baru memutuskan hubungan akrab di antara keduanya. Setelah Hoegeng bergabung dengan kelompok Petisi 50, sebagai PNS di kantor Menko Polkam, Dharto tak pernah berani lagi berhubungan secara pribadi dengan mantan atasannya itu.

Ditulis oleh Suhartono, wartawan harian *Kompas* berdasarkan kisah Soedharto Martopoespito, mantan sekretaris Hoegeng.

Dalam buku ini terungkap Hoegeng ternyata pernah menjual sepatunya untuk menambah ekonomi keluarga. Tentu tak mengherankan. Sebagai menteri, Hoegeng juga tak punya tabungan, apalagi rekening "gendut". Jangankan rekening, uang pensiunnya saja hanya Rp 1.170.000. Coba bayangkan jika Hoegeng hidup di masa sekarang ini. Buku yang wajib dibaca siapa pun yang menginginkan adanya tokoh-tokoh seperti Hoegeng."

KUNTORO MANGKUSUBROTO,
Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

"Beruntung kita pernah punya figur pemimpin nasional yang bersih dan sederhana seperti sosok Pak Hoegeng, sehingga kita bisa menepis anggapan yang cenderung memberi pembenaran terhadap realitas perilaku pejabat publik yang kotor sebagai sesuatu yang lumrah dalam kultur birokrasi di Indonesia. Sosok Pak Hoegeng adalah polisi pejuang, dan bukan produk akademi kepolisian seperti kebanyakan polisi sekarang."

TETEN MASDUKI, *aktivis antikorupsi, pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW)*

ISBN: 978-979-709-769-1
KMN 20205130086